



BANK INDONESIA

Laporan Perekonomian Provinsi Riau

AGUSTUS 2025



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI RIAU



Laporan Perekonomian
Provinsi Riau

AGUSTUS 2025



BANK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Riau

www.bi.go.id





Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju

Misi

- 1 Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah** melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia;
- 2 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan** melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan makroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
- 3 Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital** melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
- 4 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan** melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
- 5 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan** untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
- 6 Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah** di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
- 7 Mewujudkan bank sentral berbasis digital** dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.





Nilai Nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia



Kejujuran dan integritas
(*trust & integrity*)



Profesionalisme
(*profesionalism*)



Keunggulan
(*excellence*)



Mengutamakan kepentingan umum
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim
(*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai

“
duduk di rumah memegang amanah
duduk di tanah memegang petuah
duduk di kampung menjadi payung
duduk di banjar bertunjuk ajar
duduk di ladang tenggang menenggang
duduk di negeri tahukan diri
duduk di dusun ia penyantun
duduk beramai elok perangai

apa tanda melayu bertuah
tahu berguru pada yang sudah
tahu berbuat pada yang ada
tahu memandang jauh ke muka
apa tanda melayu terbilang
dada lapang pandangan panjang

“





Kata Pengantar



Panji Achmad
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI (LPP) RIAU ini merupakan kajian triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 dengan penekanan pada kondisi makroekonomi regional antara lain asesmen pertumbuhan ekonomi daerah, asesmen inflasi daerah, asesmen keuangan pemerintah daerah, asesmen pembiayaan daerah dan pengembangan akses keuangan UMKM, asesmen penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, asesmen ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian daerah tahun 2025

dan 2026 berdasarkan indikator terkini. Analisis dilakukan berdasarkan data bulanan bank umum, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, hasil survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, data perekonomian dan ketenagakerjaan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data pendukung yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dan instansi/lembaga lainnya, termasuk informasi anekdotal terkait.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 29 Agustus 2025
Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Riau

Panji Achmad
Direktur



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih	xiii
Ringkasan Eksekutif	xvi
<hr/>	
Bab 1	
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	
1. Kondisi Umum	2
2. PDRB Sisi Penggunaan	3
2.1. Konsumsi	3
2.2. Investasi (PMTB)	4
2.3. Ekspor dan Impor	5
2.3.1. Ekspor Luar Negeri	5
2.3.2. Impor Luar Negeri	5
2.3.3. Net Ekspor Antardaerah	6
3. PDRB Lapangan Usaha	6
3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6
3.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	8
3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8
3.5. Lapangan Usaha Konstruksi	9
Boks 1	10
Mendukung Investasi Berkelanjutan di Provinsi Riau Melalui Riau Economic Forum (REF) dan Riau Investment Forum (RIF)	
<hr/>	
Bab 2	
Keuangan Pemerintah	
1. Kondisi Umum	14
2. APBD Provinsi Riau Triwulan II 2025	15
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan II 2025	15
2.2. Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan II 2025	17
3. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Kabupaten / Kota	18
4. Strategi Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah	20



Bab 3 Perkembangan Inflasi Daerah	1. Kondisi Umum 22 2. Perkembangan Inflasi Riau 22 2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran 24 2.2. Analisis Inflasi Spasial Riau 27 3. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan III 2025 28 4. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah 29
Boks 2 Penerapan Digital Farming di Riau Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Komoditas Pangan	32
Bab 4 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	1. Perkembangan Kinerja Perbankan Riau 36 1.1. Pembiayaan Daerah 37 1.2. Pembiayaan Korporasi 38 1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum 40 1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bank Umum 40 2. Total Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 41 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset 41 2.2. Perkembangan Penghimpunan DPK 41 3. Perkembangan Kinerja Perbankan Secara Spasial 43 4. Perkembangan Perbankan Syariah 43 5. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM 44
Bab 5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	1. Kondisi Umum 48 2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Riau 48 2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar di Bank Indonesia Riau (<i>Inflow - Outflow</i>) 48 2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar 48 2.3. Temuan Uang Rupiah Tidak Asli / Palsu 50 3. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai 50 3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) 50 3.2. Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS) 51 3.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 51 3.4. Transaksi Uang Elektronik 52 3.5. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai 53 3.6. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) 54
Boks 3 Pekan Qris Nasional (PQN) – Serindit (Semarak Rupiah dengan Transaksi Digital Bersama Qris) Tahun 2025 di Provinsi Riau	55



Bab 6
Ketenagakerjaan &
Kesejahteraan Daerah

1. Gambaran Umum	60
2. Ketenagakerjaan Daerah	60
3. Kesejahteraan Daerah	63
3.1. Kemiskinan	63
3.2. Garis Kemiskinan	64
3.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)	65
3.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	66

Bab 7
Prospek
Perekonomian Daerah

1. Prospek Ekonomi Global 2025	70
2. Prospek Ekonomi Regional 2025	73
2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2025	73
2.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Permintaan	73
2.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Lapangan Usaha	75
2.2. Prospek Inflasi Provinsi Riau 2025	77
3. Risiko	77

Daftar Istilah

81



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan	2
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel 2.1	Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Riau Tahun 2025	14
Tabel 2.2	Anggaran Belanja APBD Provinsi Riau Tahun 2025	14
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan Provinsi Riau	16
Tabel 2.4	Komponen Pendapatan Pajak Provinsi Riau	17
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Provinsi Riau	18
Tabel 2.6	Realisasi Pendapatan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau	19
Tabel 2.7	Realisasi Belanja Kabupaten / Kota di Provinsi Riau	20
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Tahunan	24
Tabel 3.2	Perkembangan Inflasi Spasial Riau (% yoy)	27
Tabel 3.3	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Kab/Kota IHK Riau Triwulan II 2025 (% andil yoy)	27
Tabel 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Kab/Kota IHK Riau Triwulan II 2025 (% yoy) ..	28
Tabel 3.5	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Riau Juli 2025 (% andil yoy)	29
Tabel 4.1	Kredit Lokasi Proyek Menurut Lapangan Usaha	38
Tabel 4.2	Perkembangan Kredit di Riau Secara Spasial	43
Tabel 5.1	Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau	51
Tabel 5.2	Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau	53
Tabel 6.1	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribu Orang)	62
Tabel 6.2	Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	62
Tabel 6.3	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	62
Tabel 6.4	Garis Kemiskinan Provinsi Riau	65
Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global	72
Tabel 7.2	Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Indonesia	73
Tabel 7.3	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Tahun 2025	79



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Riau, Sumatera, dan Nasional.....	2
Grafik 1.2	Nilai Tukar Petani	3
Grafik 1.3	Kredit Konsumsi.....	3
Grafik 1.4	Kredit Investasi	4
Grafik 1.5	PMDN Riau	4
Grafik 1.6	PMA Riau.....	4
Grafik 1.7	Ekspor Riau.....	5
Grafik 1.8	Ekspor CPO	5
Grafik 1.9	Ekspor <i>Pulp & Paper</i>	5
Grafik 1.10	Impor Riau	6
Grafik 1.11	Impor Barang Modal	6
Grafik 1.12	Impor Barang Konsumsi	6
Grafik 1.13	Perkembangan PDRB Net Ekspor Antar Daerah	6
Grafik 1.14	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7
Grafik 1.15	Harga TBS Riau	7
Grafik 1.16	Ekspor Migas	8
Grafik 1.17	Harga Batubara	8
Grafik 1.18	Kredit Industri Pengolahan	8
Grafik 1.19	Penjualan Kendaraan Bermotor	9
Grafik 1.20	Kredit Perdagangan	9
Grafik 1.21	Konsumsi Semen	9
Grafik 1.22	Kredit Konstruksi	9
Grafik 2.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di wilayah Riau	15
Grafik 2.2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di wilayah Riau	15
Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Transfer	17
Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (% yoy)	22
Grafik 3.2	Inflasi Seluruh Provinsi di Sumatera (% yoy)	22
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi 4 Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Riau (% yoy)	23
Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran (% yoy)	24
Grafik 3.5	Perkembangan Harga Emas Global	25
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Bulanan Riau dan Nasional (% yoy)	28
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota/Kabupaten IHK	28



Grafik 4.1	Perkembangan Indikator Perbankan Riau	36
Grafik 4.2	Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 4.3	Pertumbuhan Kredit RT	38
Grafik 4.4	Kredit Multiguna	39
Grafik 4.5	Kredit Kendaraan Bermotor	39
Grafik 4.6	Kredit Perumahan	39
Grafik 4.7	Kredit <i>Durable Goods</i>	39
Grafik 4.8	Suku Bunga Kredit Perbankan Riau	40
Grafik 4.9	Suku Bunga DPK Perbankan Riau	40
Grafik 4.10	Perkembangan NPL Kredit Perbankan Riau	41
Grafik 4.11	Perkembangan Aset Perbankan Riau	41
Grafik 4.12	Perkembangan DPK Perbankan Riau	42
Grafik 4.13	DPK Berdasarkan Kepemilikan	42
Grafik 4.14	DPK Perorangan per Kelompok Nominal	42
Grafik 4.15	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	44
Grafik 4.16	Perkembangan Aset Perbankan Syariah	44
Grafik 4.17	Perkembangan DPK Perbankan Syariah	44
Grafik 4.18	Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM	45
Grafik 4.19	Perkembangan NPL Kredit UMKM	45
Grafik 5.1	Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan	48
Grafik 5.2	Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total <i>Inflow</i>	49
Grafik 5.3	Nominal Penukaran	49
Grafik 5.4	Nominal Kas Titipan	49
Grafik 5.5	Perkembangan Temuan Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau	50
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Riau	50
Grafik 5.7	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Riau	51
Grafik 5.8	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Riau	51
Grafik 5.9	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debet di Riau	52
Grafik 5.10	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debet di Riau	52
Grafik 5.11	Nominal Transaksi Uang Elektronik di Riau	52
Grafik 5.12	Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Riau	52
Grafik 5.13	Perkembangan <i>Merchant QRIS</i> di Riau	53
Grafik 5.14	Perkembangan Pembelian Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau	54
Grafik 5.15	Perkembangan Penjualan Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau	54



Grafik 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera	60
Grafik 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera	61
Grafik 6.3	Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Dunia Usaha di Provinsi Riau	61
Grafik 6.4	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau	61
Grafik 6.5	Perkembangan TPT Nasional dan TPT Provinsi Riau	61
Grafik 6.6	Perkembangan TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	63
Grafik 6.7	Perkembangan Penduduk Miskin Riau	63
Grafik 6.8	Sebaran Penduduk Miskin Riau	64
Grafik 6.9	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	65
Grafik 6.10	Perkembangan <i>Gini Ratio</i>	66
Grafik 6.11	Perkembangan Nilai Tukar Petani	67
Grafik 7.1	Perkembangan Inflasi Global	70
Grafik 7.2	Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan	71
Grafik 7.3	Prakiraan Evolusi PDB Dunia 2025	72
Grafik 7.4	Indeks Ketidakpastian dan Volatilitas Global	72
Grafik 7.5	Ekspektasi Inflasi	77



Tabel Indikator Ekonomi Terpilih

A. Inflasi dan PDRB

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Laju Inflasi Tahunan (%yoy) :												
- Provinsi Riau	5,54	2,37	1,96	2,60	2,60	3,57	3,56	1,38	1,25	1,25	0,68	0,98
- Kota Pekanbaru	5,54	2,35	1,82	2,50	2,50	2,86	3,12	1,25	1,24	1,24	0,90	1,08
- Kota Dumai	6,25	2,70	2,77	2,78	2,78	0,90	3,78	1,64	2,36	2,36	1,03	1,11
- Kota Tembilahan	3,49	1,73	1,45	1,53	1,53	3,16	3,14	1,75	2,61	2,61	2,91	2,19
- Kabupaten Kampar						4,89	4,38	1,46	0,69	0,69	(0,16)	0,57
PDRB – ADHB (Rp Juta)	251.305.954	249.717.903	261.230.074	264.218.120	1.026.472.051	264.231.260	274.062.519	284.929.278	289.246.643	1.112.481.615	293.409.835	293.048.130
PDRB – ADHK (Rp Juta)	134.324.941	136.036.225	140.660.846	140.806.474	551.828.486	138.918.429	141.063.626	145.534.084	145.758.171	571.233.590	145.335.676	147.545.761
Pertumbuhan PDRB (%yoy)												
	3,90	4,92	4,01	4,02	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52	3,52	4,65	4,59
Penggunaan												
- Konsumsi RT	3,95	4,66	4,47	4,13	4,30	4,91	4,74	4,63	4,84	4,78	4,86	4,69
- Konsumsi Pemerintah	8,62	8,89	(1,37)	15,38	7,94	17,34	7,58	2,53	(1,17)	6,99	4,06	(7,41)
- PMTB	2,68	2,71	7,20	7,07	4,89	3,69	3,24	5,55	0,50	3,25	1,17	2,47
- Ekspor LN	7,81	15,71	(12,92)	(8,68)	(1,61)	(7,38)	(0,49)	(11,55)	1,44	(4,34)	14,98	12,77
- Impor LN	7,77	(5,74)	(14,78)	(28,50)	(11,91)	(17,90)	(12,46)	9,42	(0,16)	(5,57)	(10,22)	1,63
Lapangan Usaha												
- Pertanian	2,90	2,85	3,40	3,74	3,23	2,09	3,84	0,79	1,94	2,23	5,15	4,38
- Pertambangan & Penggalan	3,33	3,03	2,58	1,14	2,52	(0,12)	(0,61)	1,63	0,94	0,36	0,44	(0,10)
- Industri Pengolahan	4,28	6,57	1,97	1,96	3,63	2,49	3,57	3,37	5,19	3,72	5,23	6,63
- Konstruksi	1,75	4,19	15,89	14,91	9,17	6,95	6,72	7,95	4,55	6,52	5,19	4,95
- Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi	6,61	6,76	6,64	4,60	6,12	8,82	4,61	6,51	5,07	6,05	6,13	5,94
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	4.731,35	4.418,15	4.964,46	4.759,65	18.873,61	4.118,77	4.302,53	4.590,21	4.864,27	17.875,78	4.808,84	4.678,53
Volume Ekspor Non Migas (ribu Ton)	6.627,97	6.516,35	7.468,98	7.333,73	27.947,03	6.201,48	6.315,92	6.434,28	6.190,50	25.142,18	5.849,43	5.894,18
Nilai Impor Non Migas (Juta USD)	708,89	579,61	551,94	537,04	2.377,48	517,54	422,71	545,27	296,49	1.782,01	351,44	414,56
Volume Impor Non Migas (ribu Ton)	1.172,66	1.238,00	1.198,84	1.248,59	4.858,09	1.198,50	1.663,06	1.830,64	1.001,19	5.693,39	1.360,78	1.450,06

B. Perbankan

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Bank Umum												
Total Aset (dalam Rp Juta)	140.941.529	139.449.301	143.252.659	146.749.842	146.749.842	147.357.803	149.444.952	153.958.854	156.987.316	156.987.316	157.288.004	158.684.719
Pertumbuhan DPK (%yoy)	0,35	-3,51	0,52	3,12	3,12	5,61	7,06	7,43	4,92	4,92	5,22	3,90
DPK (dalam Rp Juta)	114.558.059	114.450.129	117.329.599	121.165.499	121.165.499	120.985.149	122.524.924	126.050.301	127.123.381	127.123.381	127.300.940	129.958.149
- Giro	22.220.838	20.178.878	22.392.732	23.234.058	23.234.058	24.419.965	24.348.076	25.748.582	230.600.617	230.600.617	22.694.936	24.146.148
- Tabungan	62.353.023	63.311.090	63.677.203	65.674.728	65.674.728	64.339.719	65.661.136	67.617.522	695.827.203	695.827.203	70.832.182	71.960.109
- Deposito	29.984.198	30.960.161	31.259.664	32.256.712	32.256.712	32.225.464	32.515.712	32.684.197	34.480.600	34.480.600	33.773.822	33.851.892
Pertumbuhan Kredit Lok. Proyek (%yoy)	15,64	10,87	0,14	3,77	3,77	8,19	6,89	7,70	3,52	3,52	4,75	8,66
Kredit Lokasi Proyek (dalam Rp Juta)	139.999.141	144.539.016	138.117.349	148.414.423	148.414.423	151.466.514	154.498.339	148.746.756	153.641.769	153.641.769	157.506.258	167.875.608
- Modal Kerja	43.458.204	47.536.187	47.754.897	53.077.529	53.077.529	53.065.416	55.440.435	51.134.905	52.675.282	52.675.282	54.665.594	60.764.215
- Investasi	58.371.491	58.214.478	50.672.307	54.885.841	54.885.841	56.676.055	56.450.821	53.790.826	55.867.630	55.867.630	56.897.440	60.655.602
- Konsumsi	38.169.447	38.788.352	39.690.146	40.451.052	40.451.052	41.725.044	42.607.083	43.821.025	45.098.857	45.098.857	45.943.224	46.455.790
Pertumbuhan Kredit Lok. Bank (%yoy)	9,04	9,22	7,17	8,36	8,36	9,26	8,04	9,64	9,03	9,03	8,89	7,92
Kredit Lokasi Bank (dalam Rp Juta)	85.970.436	88.562.058	89.973.695	93.058.090	93.058.090	93.928.710	95.681.317	98.647.048	101.463.451	101.463.451	102.281.315	103.261.929
- Modal Kerja	27.271.828	28.130.675	27.730.236	28.425.489	28.425.489	27.221.902	27.539.557	28.498.974	29.230.224	29.230.224	29.092.583	28.637.023
- Investasi	25.064.729	26.446.046	27.565.128	29.571.724	29.571.724	30.649.476	31.456.923	32.518.966	33.564.412	33.564.412	33.999.608	35.139.615
- Konsumsi	33.633.879	33.985.337	34.678.331	35.060.877	35.060.877	36.057.332	36.684.837	37.629.108	38.668.815	38.668.815	39.189.124	39.485.291
- LDR (%)	75,05	77,38	76,68	76,80	76,80	77,64	78,09	78,26	79,81	79,81	80,35	79,46
- NPL (%)	1,37	1,68	1,82	1,66	1,66	1,61	1,60	1,69	1,60	1,60	1,70	1,62
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	11,83	11,37	12,22	12,64	12,64	13,44	10,67	10,30	6,49	6,49	4,50	4,64
Kredit UMKM (dalam Rp Juta)	33.373.094	35.293.358	36.274.976	37.934.965	37.934.965	38.508.538	39.059.809	40.009.704	40.398.699	40.398.699	40.241.659	40.870.748
- Mikro	14.305.949	16.906.144	17.824.409	19.031.610	19.031.610	19.394.065	19.611.154	19.658.561	19.793.761	19.793.761	19.581.172	19.453.423
- Kecil	13.549.959	12.885.582	13.119.392	13.384.651	13.384.651	13.553.245	13.891.846	14.767.258	15.000.301	15.000.301	15.252.751	15.730.046
- Menengah	5.517.186	5.501.632	5.331.175	5.518.704	5.518.704	5.561.227	5.556.809	5.583.885	5.604.638	5.604.638	5.407.736	5.687.279
NPL UMKM (%)	3,02	3,02	2,98	2,70	2,70	3,13	3,20	3,08	3,05	3,05	3,03	3,02
Bank Syariah												
Total Aset (dalam Rp Juta)	40.576.206	37.522.577	38.419.834	40.816.572	40.816.572	41.223.684	40.529.993	41.269.757	43.511.528	43.511.528	42.616.827	43.163.976
Pertumbuhan DPK (%yoy)	96,30	79,27	-3,85	11,31	11,31	8,47	7,70	5,28	-2,14	-2,14	-4,06	5,07
DPK (dalam Rp Juta)	24.274.498	23.702.849	24.588.841	26.125.665	26.125.665	26.331.563	25.528.011	25.887.964	25.565.986	25.565.986	25.263.534	26.822.878
- Giro	5.637.693	4.867.488	5.538.327	5.074.508	5.074.508	6.696.015	5.796.166	5.438.329	3.082.200	3.082.200	3.764.898	5.067.422
- Tabungan	10.449.176	10.451.864	10.934.743	12.023.940	12.023.940	11.432.845	11.380.728	11.671.334	12.343.125	12.343.125	12.493.009	12.147.468
- Deposito	8.187.629	8.383.497	8.115.771	9.027.217	9.027.217	8.202.703	8.351.117	8.778.301	10.140.660	10.140.660	9.005.627	9.607.988
Pertumbuhan Pembiayaan (%yoy)	123,21	103,65	7,55	6,84	6,84	7,00	7,08	8,27	9,58	9,58	8,59	7,30
Pembiayaan (dalam Rp Juta)	23.244.124	23.621.211	24.035.024	24.439.268	24.439.268	24.871.908	25.294.731	26.022.864	26.779.629	26.779.629	27.007.751	27.140.637
- Modal Kerja	2.205.582	2.327.129	2.435.315	2.386.910	2.386.910	2.371.841	2.392.348	2.453.342	2.445.079	2.445.079	2.331.438	2.239.708
- Investasi	4.208.275	4.399.979	4.446.073	4.644.570	4.644.570	4.801.135	5.005.336	5.197.403	5.352.199	5.352.199	5.417.485	5.428.187
- Konsumsi	16.830.267	16.894.103	17.153.636	17.407.787	17.407.787	17.698.932	17.897.047	18.372.120	18.982.350	18.982.350	19.258.828	19.472.742



C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Posisi Kas Gabungan (dalam Rp Juta)	2.821.133	(2.449.942)	(1.146.857)	(5.219.574)	(5.995.239)	133.446	(2.722.421)	(2.784.338)	(6.784.089)	(12.157.402)	(3.138.657)	(860.366)
Inflow (dalam Rp Juta)	5.080.304	3.640.412	1.925.762	1.172.379	11.818.856	3.595.941	3.423.613	1.270.836	533.999	8.824.389	2.104.683	2.482.847
Outflow (dalam Rp Juta)	2.259.171	6.090.353	3.072.619	6.391.952	17.814.096	3.462.495	6.146.034	4.055.174	7.318.088	20.981.791	5.243.340	3.343.213
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	1.052.193	1.381.804	1.020.786	810.717	4.265.500	1.015.687	374.700	89.156	184.556	1.664.099	72.576	110.709
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar *)	43.230	41.640	45.389	62.802	193.061	35.830	40.733	43.460	51.741	171.764	43.607	41.318
Volume Transaksi RTGS (lembar *)	20.073	17.991	21.201	21.776	81.041	17.936	18.042	20.412	21.038	77.428	15.360	16.334
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	709	661	744	1.013	782	587	668	712	848	704	715	677
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar)	329	286	348	351	328	294	296	335	345	317	252	268
Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar)	2.953	2.594	2.774	2.604	10.925	2.375	2.241	2.411	2.327	9.354	2.104	2.079
Volume Transaksi Kliring (lembar)	60.708	52.584	59.595	56.185	229.072	49.121	44.835	50.150	48.455	192.561	42.856	44.835
Rata-rata Harian Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar)	48	41	45	42	44	39	37	40	38	38	34	42.421
Rata-rata Harian Volume Transaksi Kliring (lembar)	995	835	977	906	928	805	735	822	794	789	703	735

D. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025	
	Feb/Mar	Feb/Mar	Agt/Sep	Agt/Sep		Feb/Mar	Feb/Mar	Agt/Sep	Agt/Sep		Feb/Mar	Feb/Mar
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	495,13	495,13	485,66	485,66	485,66	492,25	492,25	492,25	473,04	473,04	473,04	473,04
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,84	6,84	6,68	6,68	6,68	6,67	6,67	6,67	6,36	6,36	6,36	6,36
Gini Rasio	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	4,25	4,23	4,23	4,23	3,85	3,85	3,70	3,70	3,70	4,12	4,12

Ringkasan Eksekutif

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

AGUSTUS 2025

Perekonomian Riau pada TW-II 2025 tumbuh sebesar 4,59% (yoy), lebih lambat dari TW-I 2025 sebesar 4,65% (yoy).

I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

- Perekonomian Riau pada triwulan II 2025 tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 4,59% (yoy), lebih lambat dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 4,65% (yoy), yang disebabkan oleh perlambatan konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan perbaikan dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 4,87% (yoy) menjadi 5,12% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan II 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Indonesia, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 4,98%.
- Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Riau pada triwulan II 2025 terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja Konsumsi RT dan Ekspor LN. Konsumsi RT tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2025, hal tersebut disebabkan oleh momen HBKN yang telah lewat dan penurunan pendapatan masyarakat yang terindikasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2025 yang tumbuh melambat. Dari sisi ekspor LN pada triwulan II 2025 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, diduga dari produksi TBS yang lebih lambat pada triwulan II 2025. Volatilitas perdagangan internasional juga turut berkontribusi pada perlambatan ekspor komoditas *pulp & paper*.
- Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Pertambangan. Pada triwulan II 2025, LU Pertanian tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga TBS yang lebih rendah pada triwulan II 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditengarai harga *crude palm oil* (CPO) global yang tidak setinggi triwulan I 2025 menjadi penyebab penurunan harga TBS. Selain itu, LU Pertambangan mengalami kontraksi pada triwulan II 2025, dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh. Kontraksi disebabkan oleh natural *decline lifting* migas yang tidak dapat tertahan oleh metode peremajaan tambang migas yang telah diterapkan.



Realisasi APBD pada triwulan II 2025 lebih lambat dibandingkan triwulan II 2024.

II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH

- **Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2024.** Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran pendapatan sebesar Rp9,45 triliun, menurun dibandingkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp11,11 triliun. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp6,78 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 14,39% (yoy), dari Rp11,19 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp9,58 triliun pada tahun 2025. Dilihat dari rincian per komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 41,24% (yoy) menjadi senilai Rp1,44 triliun.
- **Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya.** Penurunan realisasi pendapatan daerah didorong oleh turunnya realisasi PAD dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp1.939,00 miliar atau terkontraksi 25,13% (yoy) dari triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.589,76 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 43,27% menjadi 37,40%.

III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- **Pada triwulan II 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,98% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 0,68% (yoy).** Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh peningkatan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran; Pakaian & Alas Kaki; serta Kesehatan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.
- Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking*, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan Pemerintah (*administered prices*), sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.



Kinerja intermediasi perbankan Riau pada triwulan II 2025 terpantau masih kuat, sejalan dengan kinerja positif perekonomian.

IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

- Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau masih kuat, mendukung pertumbuhan perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan II 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya.
- Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau pada triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 79,46%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 80,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.

V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Pada triwulan II 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi *net-outflow* yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan *net-outflow* dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp860,37 miliar, lebih rendah dibandingkan *net-outflow* triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,34 triliun.
- Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan II 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui SKNBI, BI-RTGS, kartu kredit, UE, dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi menggunakan kartu debit menunjukkan perlambatan. Lebih lanjut, nominal transaksi SKNBI di Provinsi Riau masih mengalami kontraksi sebesar 7,20% (yoy), namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,42% (yoy). Hal serupa juga terjadi pada volume transaksi melalui BI-RTGS yang terkontraksi 9,47% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,36% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi kartu kredit menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2025. Selain itu, kinerja nominal transaksi UE tercatat tumbuh 16,3% (yoy) atau senilai Rp2,02 triliun pada triwulan laporan. Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE yaitu senilai Rp1,46 triliun atau dengan pangsa sebesar 72,42%.



Kesejahteraan masyarakat Riau menunjukkan penurunan sebagaimana tercermin pada peningkatan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

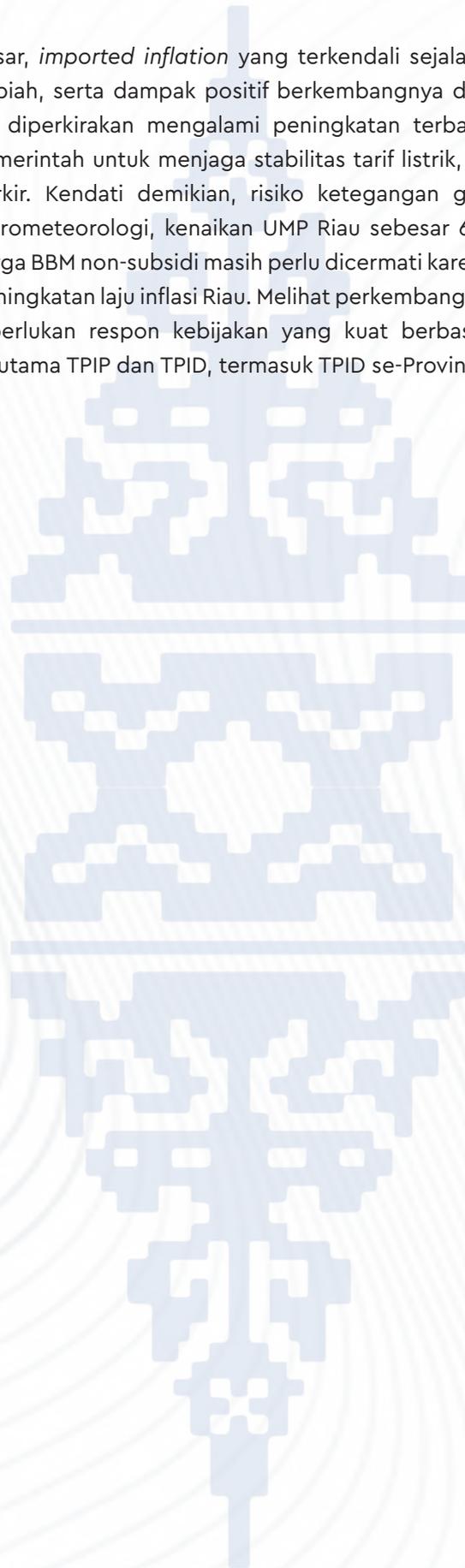
- Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Februari 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Riau. Pada periode laporan, jumlah Angkatan Kerja meningkat di Riau, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan TPT.
- Sementara itu, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terindikasi membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,16%, lebih rendah dari September dan Maret 2024 masing-masing 6,36% dan 6,67%. Berlanjutnya tren penurunan kemiskinan di Riau mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk yang relatif membaik. Tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 sebesar 6,16% merupakan persentase penduduk miskin terendah setidaknya sejak tahun 2016. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 mencapai 460,96 ribu jiwa, menurun sebanyak 31,29 ribu jiwa dari Maret 2024.

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh tinggi dibandingkan tahun 2024. Tekanan inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran 2,5%±1%.

- Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,19 – 4,85% (yoy), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja *net export* LN. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.
- Inflasi Riau pada tahun 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Terkendalnya inflasi Riau didukung oleh komponen VF dan CI, sementara komponen AP diperkirakan mengalami peningkatan inflasi yang terkendali. Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, inflasi CI diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih

besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, inflasi AP diperkirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar *stakeholders* terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.





BAB 1

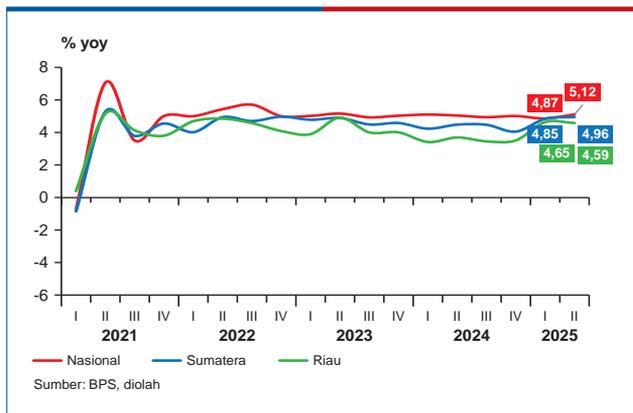
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Ekonomi Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan I 2025. Perlambatan ekonomi Riau disebabkan oleh penurunan kinerja rumah tangga dan ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha, pelambatan kinerja LU Pertanian dan LU Pertambangan menahan ekonomi Riau untuk tumbuh lebih tinggi. Provinsi Riau pada triwulan II 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB terbesar keenam se-Nasional dengan kontribusi terhadap total PDRB Indonesia mencapai 4,98%.



1. KONDISI UMUM

Perekonomian Riau pada triwulan II 2025 tumbuh tinggi meskipun sedikit melandai dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 4,59% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,65% (yoy) didorong oleh penurunan kinerja konsumsi Rumah Tangga. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 4,87% (yoy) menjadi 5,12% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan II 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 4,98%.



Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau, Sumatera, Nasional Secara Tahunan (% yoy)

Dari sisi pengeluaran, melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2025 disebabkan oleh pelambatan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kinerja ekspor non-migas terutama komoditas lemak dan minyak nabati terpantau, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 53,58% (yoy) menjadi 30,18% (yoy). Lebih lanjut, kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) juga mencatatkan pelambatan yaitu tumbuh 4,69% (yoy) dari 4,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring berlalunya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri

Namun demikian, peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menahan pelambatan ekonomi Riau yang lebih dalam. Pada triwulan II 2025, kinerja PTMB tumbuh sebesar 2,47% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,17% (yoy) didukung peningkatan investasi non-bangunan di Provinsi Riau.

Dari sisi lapangan usaha (LU), melandainya pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Konstruksi. Pada triwulan II 2025, LU Pertanian tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kinerja produksi Kelapa Sawit yang memasuki musim trek. Hal ini juga terindikasi dari penurunan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II dibandingkan

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (% yoy)

Komponen Penggunaan	Pertumbuhan (% yoy)								Kontribusi Pertumbuhan (% yoy)							
	2023	2024				2024	2025		2023	2024				2024	2025	
		I	II	III	IV		I	II		I	II	III	IV		I	II
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,30	4,91	4,74	4,63	4,84	4,78	4,86	4,69	1,49	1,67	1,67	1,57	1,69	1,65	1,68	1,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8,90	37,26	11,45	5,19	2,34	13,01	-1,25	-0,76	0,05	0,18	0,06	0,03	0,01	0,07	-0,01	0,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,94	17,34	7,58	2,53	-1,17	6,99	4,06	-7,41	0,26	0,46	0,30	0,08	-0,05	0,23	0,13	-0,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,89	3,69	3,24	5,55	0,50	3,25	1,17	2,47	1,51	1,15	1,01	1,71	0,17	1,01	0,37	0,77
5. Ekspor Luar Negeri	-1,61	-7,38	-0,49	-11,55	1,44	-4,34	14,98	12,77	-0,59	-2,53	-0,16	-4,15	0,52	-1,50	4,62	3,92
6. Impor Luar Negeri	-11,91	-16,54	-12,46	9,42	-0,16	-5,57	-10,22	1,63	-0,90	-1,19	-0,77	0,56	-0,02	-0,36	-0,59	0,09
7. Net Ekspor	2,77	-0,15	2,82	0,15	6,10	2,02	20,73	18,36	0,85	-0,05	0,85	0,05	1,82	0,61	6,00	5,89
PDRB	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52	3,52	4,65	4,59	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52	3,52	4,65	4,59

Sumber : BPS



dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar 186,81, dari 193,57. Selain itu, LU Pertambangan dan Penggalian juga berkontraksi pada triwulan II 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh. *Natural decline lifting* migas pada blok rokan ditenggarai menjadi faktor utama penyebab kontraksi LU Pertambangan.

Pelambatan kinerja lapangan usaha yang lebih dalam tertahan utamanya oleh kinerja positif LU Industri Pengolahan. Ekspor dan investasi yang kuat pada LU Industri Pengolahan mendorong pertumbuhan pada Tw. II 2025 sebesar 6,63% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

2. PDRB SISI PENGGUNAAN

Pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih landai pada triwulan II 2025 dipengaruhi oleh *net* ekspor luar negeri serta konsumsi RT. Namun demikian, percepatan PMTB menahan pelambatan yang lebih dalam.

2.1. Konsumsi

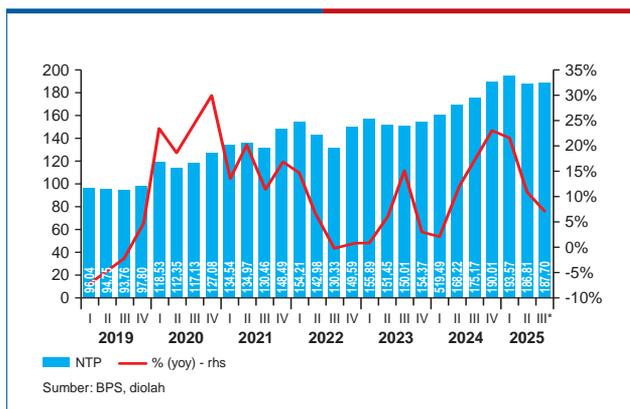
Konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, Konsumsi RT tumbuh 4,69% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,86 (yoy). Pelambatan dipengaruhi oleh berlalunya momen HBKN serta daya beli

masyarakat yang tidak sekuat triwulan sebelumnya terindikasi melalui Nilai Tukar Petani (NTP)..

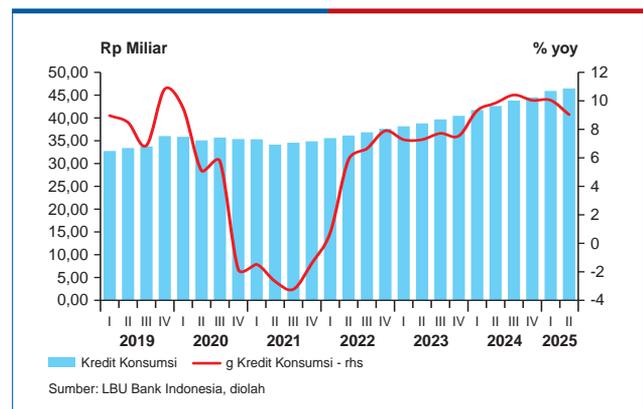
Meskipun demikian, Daya beli masyarakat di Provinsi Riau masih tetap baik. Hal tersebut didukung oleh berlanjutnya tren kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sehingga mendorong peningkatan penerimaan petani di Riau. Kenaikan harga TBS mendorong kenaikan NTP Perkebunan sehingga mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada 187,70 pada triwulan II 2025 atau tumbuh 7,15% (yoy). Dari sisi pembiayaan, kinerja konsumsi RT yang tetap baik tercermin dari penyaluran kredit konsumsi yang tetap tumbuh. Penyaluran kredit konsumsi masih tumbuh positif sebesar 9,03% (yoy), meski melandai dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,04% (yoy).

Sejalan dengan dengan konsumsi RT, kinerja konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dan masuk pada zona kontraksi. Pada triwulan II 2025, konsumsi pemerintah berkontraksi 7,41% (yoy), melemah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,06% (yoy). Penurunan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh pergeseran pencairan gaji ke-13 ke triwulan I 2025.

Sementara itu, konsumsi LNPRRT pada triwulan II 2025 tercatat berkontraksi 0,76% (yoy), membaik dibandingkan triwulan I 2025 yang berkontraksi 1,25% (yoy). Intensitas pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan yang tidak sekuat triwulan sebelumnya serta momen Pemilu yang lewat ditenggarai menyebabkan kontraksi konsumsi LNPRRT.



Grafik 1.2. Nilai Tukar Petani



Grafik 1.3. Kredit Konsumsi

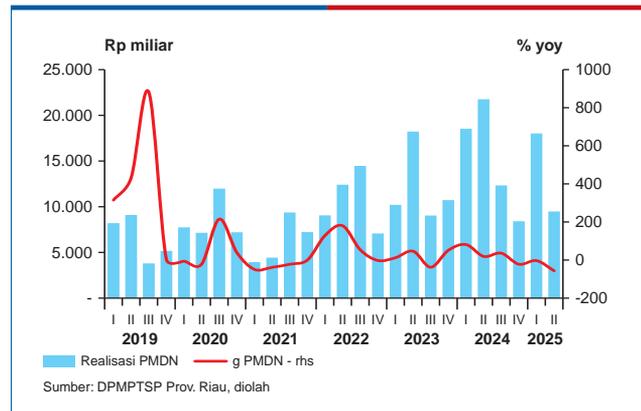


2.2. Investasi (PMTB)

Kinerja investasi Riau yang tercermin pada komponen PMTB tumbuh sebesar 2,47% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih baik dari triwulan I 2025 yang tumbuh 1,17% (yoy). Percepatan kinerja investasi terjadi pada kelompok investasi non-bangunan seiring pelaksanaan *replanting* yang terindikasi dari peningkatan impor pupuk dari luar negeri.

Kinerja investasi nonbangunan mencatatkan peningkatan pada triwulan II 2025. Hal ini tercermin dari peningkatan impor pupuk (HS 29) dan perbaikan impor barang modal. Dari sisi pembiayaan, peningkatan investasi juga terindikasi dari penyaluran kredit investasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Kredit investasi tercatat tumbuh 7,45% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,65% (yoy).

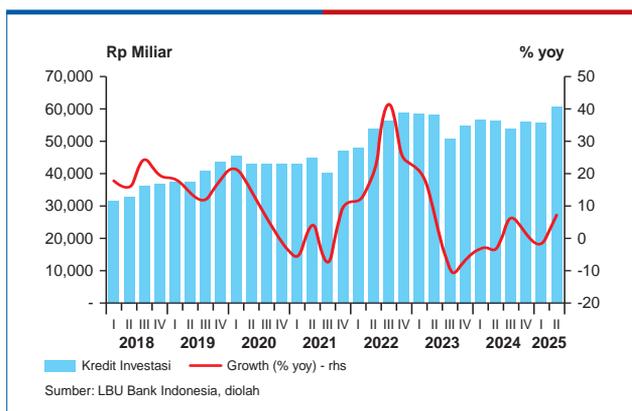
Pada triwulan II 2025, realisasi penanaman modal di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp12,3 triliun atau 36% dari target investasi oleh BKPM RI selama tahun 2025. Pencapaian tersebut lebih rendah dari pencapaian pada triwulan II 2024 yang sebesar 38,86% dari target BKPM RI. Penurunan disebabkan pelambatan investasi yang berasal dari modal asing. Kinerja investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat terkontraksi makin dalam sebesar 56,42% (yoy), setelah terkontraksi 2,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



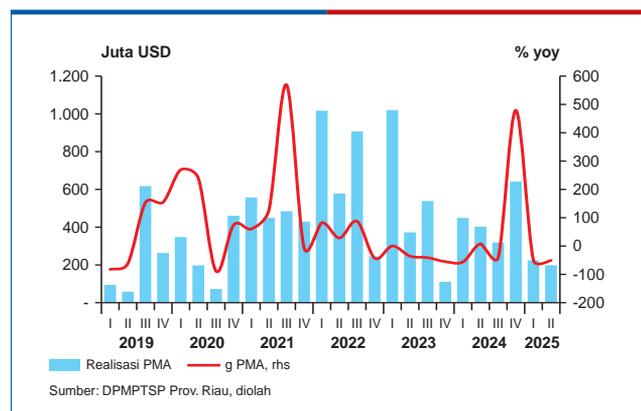
Grafik 1.5. PMDN Riau

Mengacu pada data realisasi investasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP), sektor usaha yang menyumbang capaian realisasi pada triwulan II 2025 adalah sektor Kehutanan sebesar Rp2,43 triliun atau 19%, Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp2,41 triliun atau 19%, industri makanan sebesar Rp2,08 triliun atau 16%, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar Rp1,33 triliun atau 11%.

Sementara itu, ditinjau dari negara asalnya, aliran modal asing yang masuk ke Provinsi Riau terutama berasal dari Singapura sebesar US\$64,81 juta, Kepulauan Virgin Inggris sebesar US\$51,45 juta, dan Malaysia sebesar US\$37,64 juta masing-masing dengan pangsa sebesar 33%, 26%, dan 19% dari keseluruhan PMA di Riau.



Grafik 1.4. Kredit Investasi



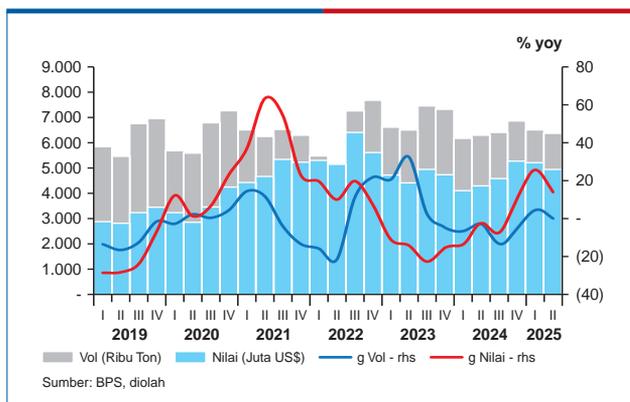
Grafik 1.6. PMA Riau



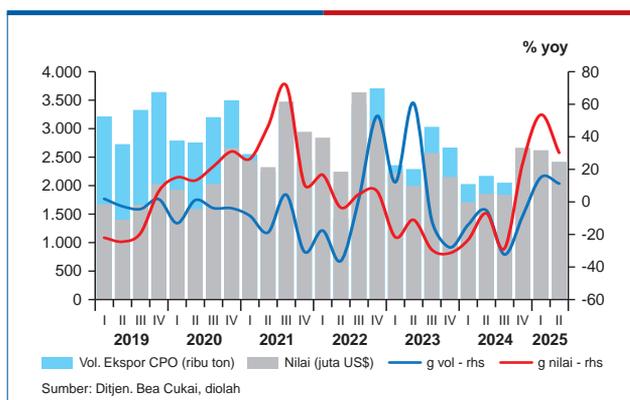
2.3. Ekspor dan Impor

2.3.1. Ekspor Luar Negeri

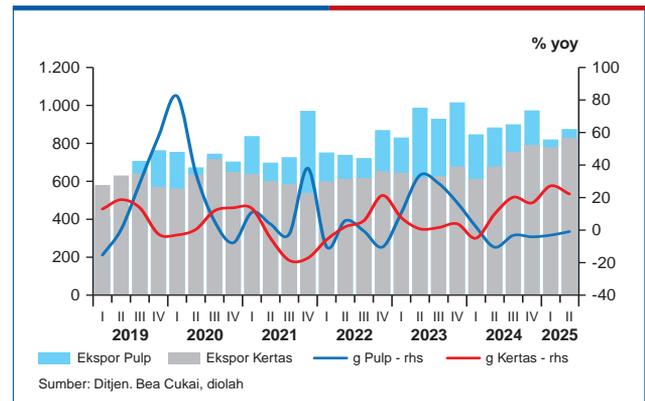
Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Riau mengalami penurunan pada triwulan II 2025. Berdasarkan data neraca perdagangan yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau, nilai ekspor Riau pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 14,96% (yoy), melambat dari 26,18% (yoy) pada triwulan I 2025. Berdasarkan perkembangan volume, ekspor Riau tumbuh sebesar 1,26% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,81% (yoy). Pelambatan kinerja ekspor luar negeri pada triwulan II 2025 terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor kelompok nonmigas yang mencatatkan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 19,06% (yoy).



Grafik 1.7. Ekspor Riau



Grafik 1.8. Ekspor CPO



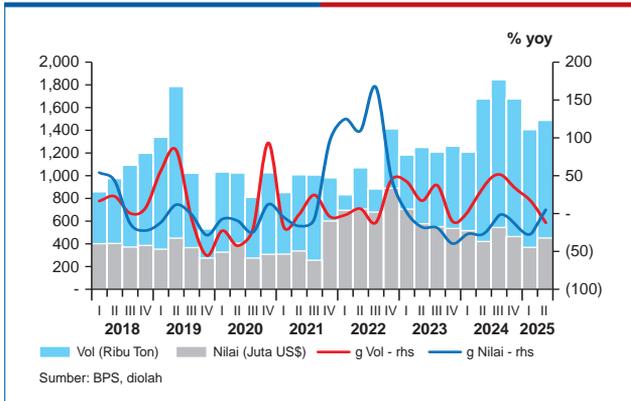
Grafik 1.9. Ekspor Pulp & Paper

Ditinjau dari komoditasnya, melandainya ekspor luar negeri terjadi pada komoditas utama Riau, seperti lemak dan minyak nabati atau CPO dan bubur kayu/*pulp*. Nilai ekspor CPO mencatatkan pertumbuhan sebesar 30,18% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 53,58% (yoy) didorong oleh penurunan produksi TBS pada Tw. II 2025.

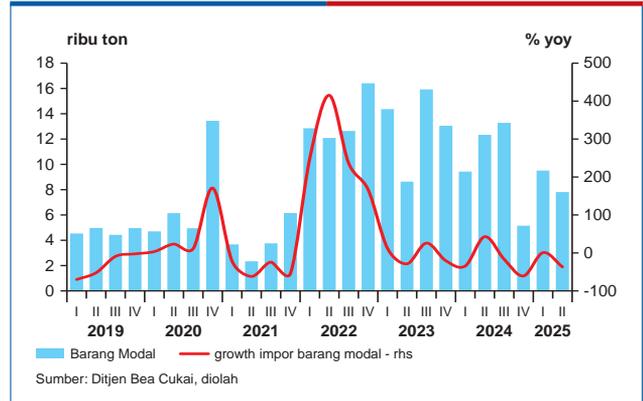
Sejalan dengan komoditas CPO, ekspor komoditas *Paper* juga mengalami pelambatan. Nilai ekspor *paper* tumbuh 22,20% (yoy) pada triwulan II 2025, melambat dibandingkan triwulan I 2024 yang tumbuh 27,19% (yoy) disebabkan oleh volatilitas perdagangan internasional.

2.3.2. Impor Luar Negeri

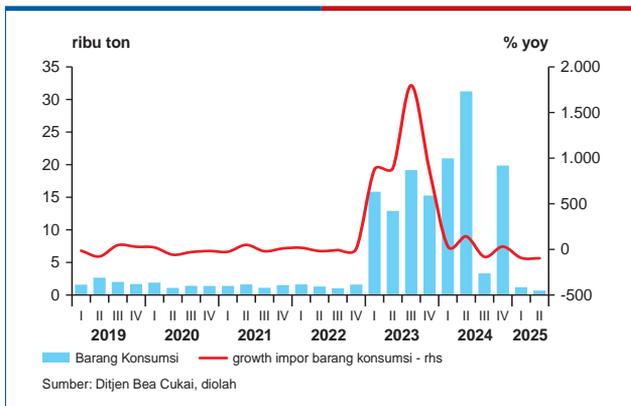
Berbeda dengan kinerja ekspor luar negeri, kinerja impor luar negeri mengalami perbaikan yaitu tumbuh sebesar 1,63% (yoy) pada triwulan II 2025, setelah terkontraksi sebesar 10,22% (yoy) pada triwulan I 2025. Peningkatan impor luar negeri terkonfirmasi dari pertumbuhan nilai perdagangan impor BPS yang mencatatkan pertumbuhan yang meningkat dari -26,87% (yoy) menjadi 3,49% (yoy). Sementara itu, volume impor tercatat terkontraksi 10,51% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,06% (yoy).



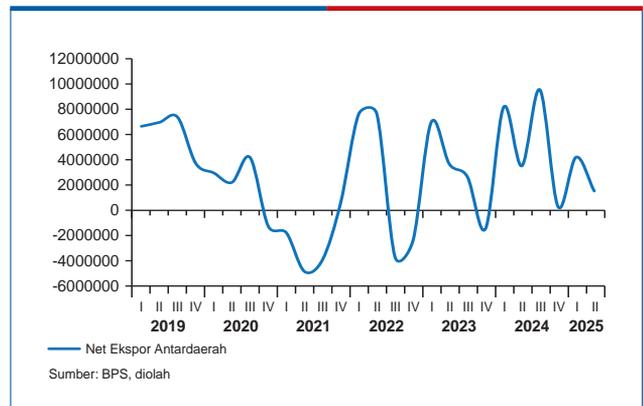
Grafik 1.10. Impor Riau



Grafik 1.11. Impor Barang Modal



Grafik 1.12. Impor Barang Konsumsi



Grafik 1.13. Perkembangan PDRB Net Ekspor AD

Jika ditinjau dari jenis barangnya, perbaikan kinerja impor nonmigas didorong oleh impor antara. Pada triwulan II 2025, berdasarkan nilai impor barang antara tercatat tumbuh 8,54% (yoy). Akan tetapi, secara volume, impor barang antara mengalami kontraksi 9,71% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 28,04% (yoy).

2.3.3. Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan II 2025, nominal PDRB neto ekspor antardaerah atas dasar harga konstan (ADHK) mencatat surplus sebesar Rp1,52 triliun, atau terkontraksi 56,74% (yoy). Penurunan net ekspor antardaerah ditengarai oleh penurunan ekspor antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor LN.

3. PDRB LAPANGAN USAHA

Dari sisi sektoral, melandainya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Pertambangan dan Penggalian akibat penurunan produksi dan ekspor komoditas utama. Namun demikian, kinerja LU Industri Pengolahan menahan perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam.

3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

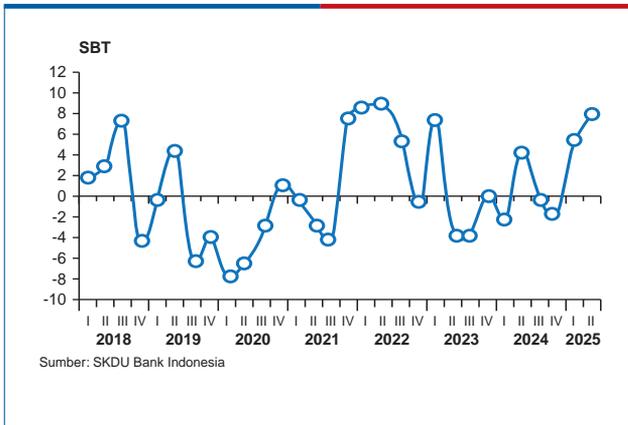
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh 4,38% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebelumnya yang tumbuh



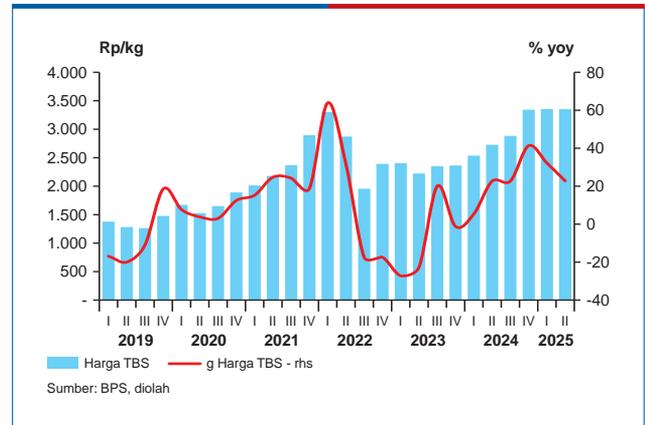


5,15% (yoy). Penurunan rerata harga TBS dari Rp Rp.3.414,91 menjadi Rp3.356,11 pada triwulan II 2025 atau tumbuh melambat 22,87% (yoy) menjadi alasan

utama perlambatan kinerja LU Pertanian. Penurunan harga TBS sejalan dengan harga CPO yang tidak setinggi triwulan I 2025.



Grafik 1.14. Perkembangan Kegiatan Usaha LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



Grafik 1.15. Harga TBS Riau

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Komponen Sektoral	Growth (% yoy)								Kontribusi Pertumbuhan (% yoy)							
	2023	2024				2024	2025		2023	2024				2025		
		I	II	III	IV		I	II		I	II	III	IV	I	II	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,23	2,09	3,84	0,79	1,94%	2,23%	5,15%	4,38%	0,88	0,56	1,02	0,22	0,51%	0,60%	1,36%	1,17%
Pertambangan dan Penggalian	2,52	-0,12	-0,61	1,63	0,94%	0,36%	0,44%	-0,10%	0,38	-0,02	-0,09	0,23	0,13%	0,05%	0,06%	-0,01%
Industri Pengolahan	3,63	2,49	3,57	3,37	5,19%	3,72%	5,23%	6,63%	1,17	0,81	1,13	1,07	1,68%	1,19%	1,68%	2,09%
Pengadaan Listrik, Gas	1,45	9,58	6,75	2,69	9,27%	6,99%	15,04%	-0,66%	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Pengadaan Air	5,52	4,17	4,18	1,72	4,81%	3,71%	4,17%	7,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Konstruksi	9,17	6,95	6,72	7,95	4,55%	6,52%	5,19%	4,95%	0,77	0,59	0,57	0,73	0,42%	0,59%	0,46%	0,43%
Perdagangan Besar, Eceran, Rep. Mobil Motor	6,12	8,82	4,61	6,51	5,07%	6,05%	6,13%	5,94%	0,61	0,86	0,50	0,61	0,53%	0,63%	0,63%	0,65%
Transportasi dan Pergudangan	8,31	9,85	7,56	9,92	5,27%	6,55%	5,25%	3,89%	0,06	0,07	0,06	0,08	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,22	8,91	14,20	13,42	9,83%	10,70%	3,37%	2,39%	0,02	0,04	0,06	0,06	0,05%	0,05%	0,02%	0,01%
Informasi dan Komunikasi	7,67	8,88	6,73	8,91	6,70%	7,56%	5,07%	5,30%	0,09	0,10	0,08	0,11	0,08%	0,09%	0,06%	0,07%
Jasa Keuangan	4,07	1,63	5,79	6,12	-7,95%	1,30%	1,62%	1,45%	0,04	0,02	0,06	0,06	-0,07%	0,01%	0,02%	0,01%
Real Estate	3,94	5,95	3,82	3,76	2,13%	3,85%	2,92%	5,36%	0,04	0,05	0,04	0,04	0,02%	0,04%	0,03%	0,05%
Jasa Perusahaan	6,58	7,47	7,41	9,28	9,36%	8,37%	7,62%	9,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos.	5,40	15,62	9,29	11,28	4,77%	9,45%	8,81%	-0,79%	0,09	0,24	0,17	0,17	0,09%	0,17%	0,15%	-0,02%
Jasa Pendidikan	3,76	5,84	3,04	5,85	3,62%	4,42%	11,68%	7,56%	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02%	0,02%	0,06%	0,04%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,97	5,19	7,22	9,45	6,43%	6,62%	10,82%	7,71%	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%
Jasa lainnya	6,26	8,56	8,85	8,14	4,81%	7,54%	8,90%	9,37%	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%
PDRB	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52%	3,52%	4,65%	4,59%	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52%	3,52%	4,65%	4,59%

Sumber : BPS

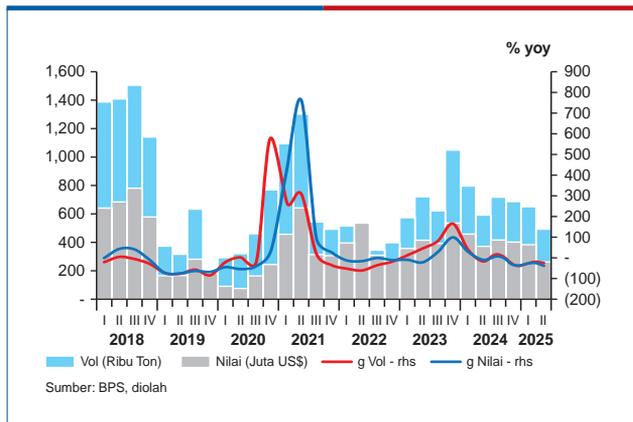




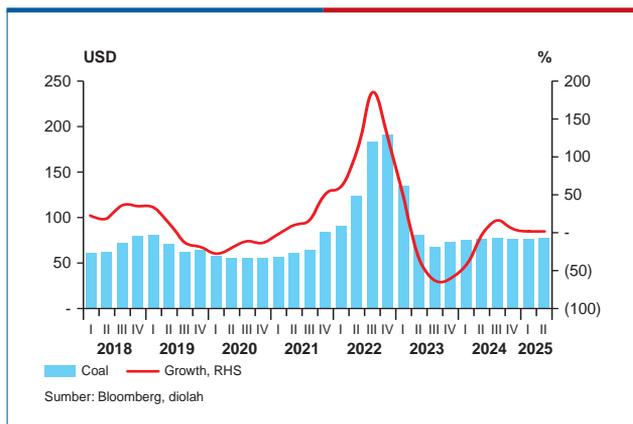
3.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2025 tercatat terkonsentrasi 0,10% (yoy), melambat dari triwulan I 2025 yang tumbuh 0,44% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh penurunan produksi migas yang terindikasi dari ekspor migas yang terkonsentrasi. Pada triwulan II 2025, nilai dan volume ekspor migas terkonsentrasi masing-masing sebesar 28,18% (yoy) dan 14,59% (yoy) dan melanjutkan tren konsentrasi dari triwulan sebelumnya.

Meskipun demikian, harga batubara menunjukkan perbaikan. Harga batubara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar US\$78.038 per metrik ton atau tumbuh 1,43% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh 1,27% (yoy) (Grafik 1.16).



Grafik 1.16. Ekspor Migas



Grafik 1.17. Harga Batubara

3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

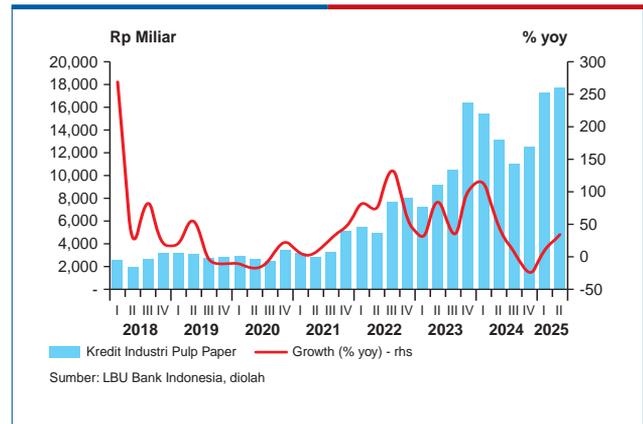
Pada triwulan II 2025, LU Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yang tumbuh 5,23% (yoy). Pertumbuhan industri pengolahan ditengarai disebabkan oleh peningkatan penjualan ekspor komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *oleochemical* yang merupakan produk turunan CPO. Hal ini terindikasi dari peningkatan ekspor bahan kimia organik yang tumbuh 50,50% (yoy) pada triwulan II 2025.

Grafik 1.18.

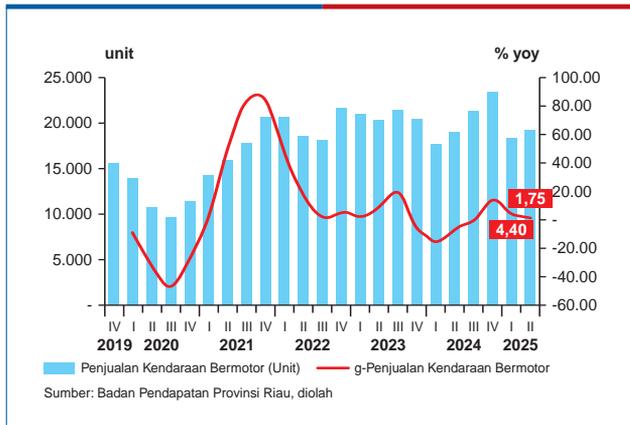
Berdasarkan subsektornya, kinerja positif LU Industri Pengolahan juga didukung oleh kinerja positif subsektor *pulp & paper*. Kondisi tersebut terindikasi dari pertumbuhan nilai ekspor kertas sebesar 22,20% (yoy), dan pertumbuhan penyaluran kredit kepada industri *pulp & paper* sebesar 34,78% (yoy).

3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

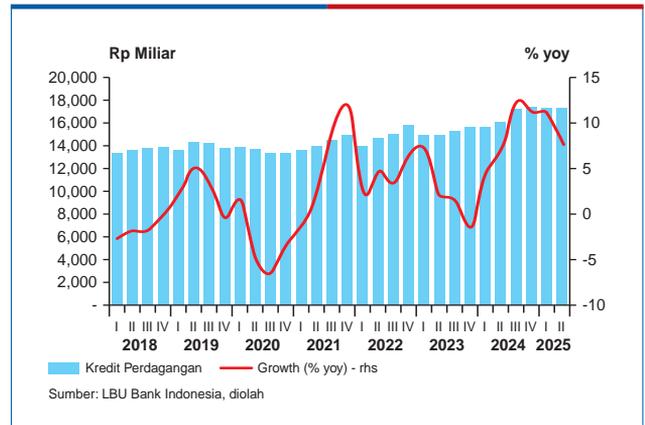
Pada triwulan II 2025, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 5,94% (yoy), meski melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,13% (yoy). Berlaluinya momen HBKN triwulan I dan melambatnya penyaluran kredit perdagangan yang



Grafik 1.18. Kredit Industri Pengolahan



Grafik 1.19. Penjualan Kendaraan Bermotor



Grafik 1.20. Kredit Perdagangan

tumbuh 7,75% (yoy) ditengarai menjadi penyebab perlambatan LU Perdagangan.

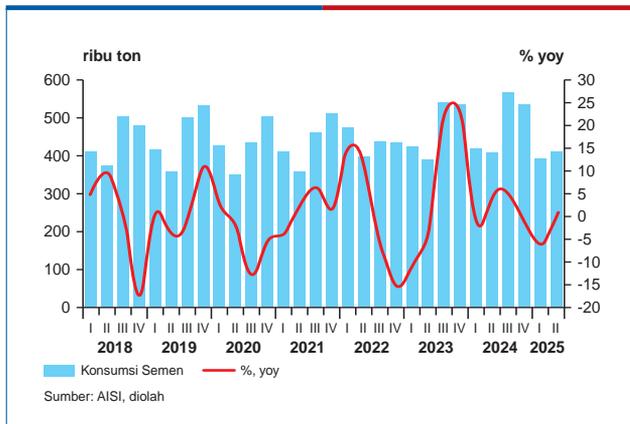
Pertumbuhan LU Perdagangan juga tertahan oleh penjualan kendaraan bermotor yang melambat. Pada triwulan II 2025, rerata penjualan kendaraan bermotor tumbuh 1,75% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,40% (yoy).

3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

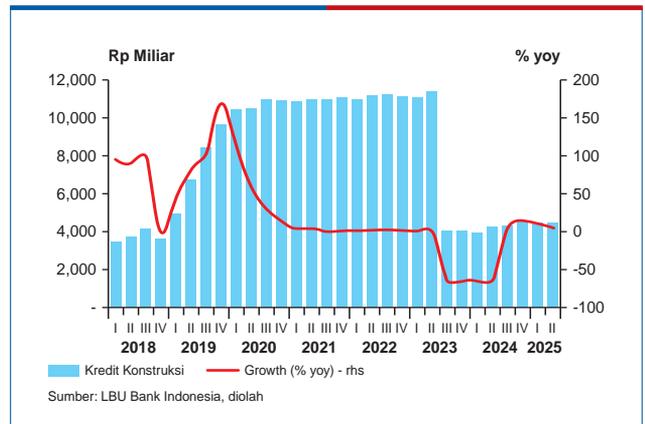
LU Konstruksi Riau pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih lambat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,19% (yoy). Aktivitas konstruksi yang lebih rendah pada periode laporan serta perlambatan penyaluran kredit konstruksi menjadi 5,18% (yoy) dari 9,60% (yoy) mengindikasikan hal tersebut

Di sisi lain, perlambatan kinerja LU Konstruksi tertahan oleh konsumsi semen. Pada triwulan II 2025, konsumsi semen Provinsi Riau mengalami pertumbuhan sebesar 0,57% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,05% (yoy).



Grafik 1.21. Konsumsi Semen



Grafik 1.22. Kredit Konstruksi





BOKS 1

Mendukung Investasi Berkelanjutan di Provinsi Riau Melalui Riau Economic Forum (REF) dan Riau Investment Forum (RIF)

Pelaksanaan Riau Economic Forum Tahun 2025

Bertepatan dengan Ulang Tahun Provinsi Riau ke-68, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menyelenggarakan *Riau Economic Forum* (REF). REF diadakan untuk mendorong percepatan investasi yang berkelanjutan di Provinsi Riau dengan harapan mendukung pertumbuhan ekonomi Riau. REF dihadiri beberapa tokoh nasional seperti:

- Kepala BPS RI, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D
- Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H.
- Gubernur Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid, M.Si
- Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM RI, Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D
- Ekonom Senior Bank Mandiri, Ibu Dian Ayu Yunita

Adapun rangkaian kegiatan REF 2025, yaitu:

- ***Ekspos Perekonomian Nasional dan Riau Triwulan II 2025:***

Penyampaian *welcoming speech* oleh Kepala Perwakilan BI Riau, *opening remarks* oleh Gubernur Riau, dan *keynote speech* oleh Kepala BPS RI. Dalam paparannya, Kepala BPS RI menjelaskan secara komprehensif perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Riau, serta rencana Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam memberikan data dan informasi yang akurat.

- ***Signing MoU Investasi di Riau USD 2,8 Miliar (Rp45,5 Triliun) yaitu:***

- 1) MoU antara PT Tata Buana Persada dan Oriens Asset Management utk pengembangan pembukaan perkebunan 20 ribu hektar tebu dan pabrik gula modern;
- 2) MoU antara PT Rangsang Sindo Energy dan Oriens Asset Management untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 2 Gigawatt di Pulau Rangsang Provinsi Riau.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Riau, Kepala BPS RI, Deputi Kepala BKPM RI, dan Ketua Komisi Kejaksaan RI.



- **Launching QRIS Tap oleh Gubernur Riau dan Kepala BPS RI:** *Launching QRIS TAP* pada perangkat *ticketing* Trans Metro Pekanbaru yang dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Riau, Kepala BPS RI, dan Kepala Perwakilan BI Riau disaksikan oleh pemangku kepentingan, termasuk Walikota Pekanbaru, Kepala OJK Provinsi Riau, dan seluruh peserta.
- **Diskusi Panel bersama** Deputi Kepala BKPM, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Kapolda Riau, Dinas Pariwisata, Bappeda Riau, dan Ekonom Senior Bank Mandiri bertemakan **"Memacu Pertumbuhan Ekonomi Riau melalui Investasi Berkelanjutan"**. Benang merah diskusi ini adalah sinergi program dan kebijakan antara Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, dan Pelaku Usaha di Provinsi Riau masih perlu ditingkatkan untuk membuat iklim investasi lebih atraktif dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan begitu, upaya untuk mendorong investasi berkelanjutan dengan memanfaatkan sektor-sektor prioritas serta keunggulan komparatif dan kompetitif Riau dapat tercapai sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi Riau yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

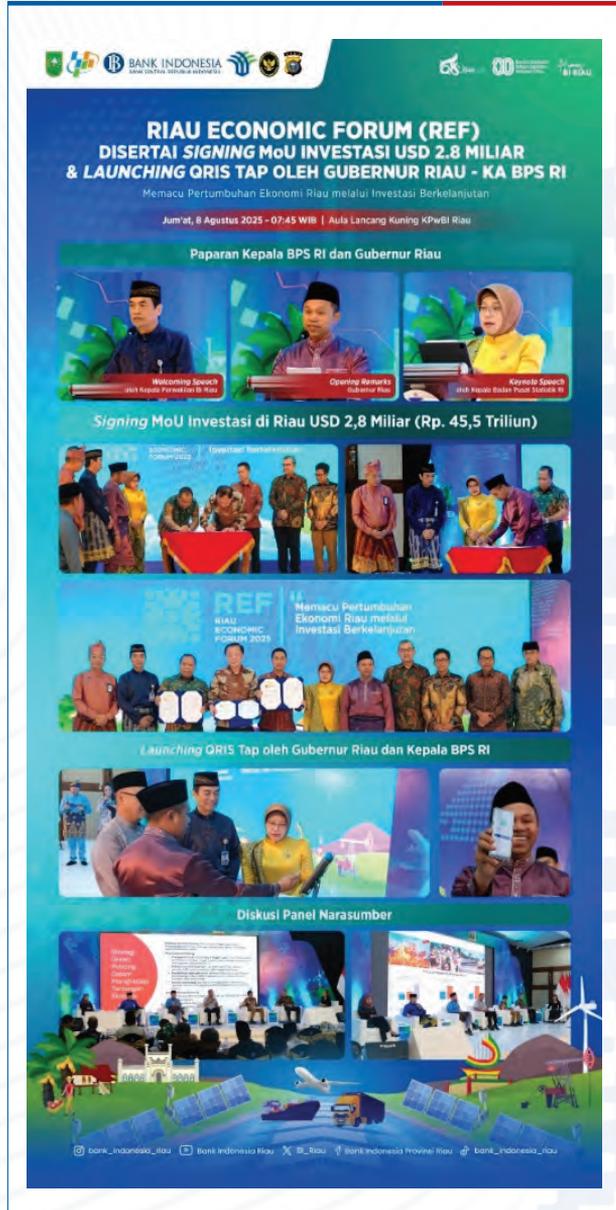
Pelaksanaan Riau Investment Forum: Enhancing Investment Productivity and Downstream Industry

Bank Indonesia Provinsi Riau mengikuti *Riau Investment Forum* (RIF) yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada 19 Agustus 2025 di Pekanbaru. Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Riau, Duta Besar dari berbagai negara mitra, Forkopimda, serta akademisi. Rangkaian RIF berupa *investment award* yang bertujuan memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, pemerintah daerah, dan instansi yang berperan aktif menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di Provinsi Riau. Selain itu, terdapat *Panel Discussion* untuk menampilkan potensi investasi strategis di Provinsi Riau yang memiliki daya tarik bagi investor, baik di sektor primer, industri pengolahan, maupun sektor jasa.

Diskusi ini dimoderatori oleh Prof. Dr. Sri Endang Kornita dengan narasumber:

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Bapak Dr. Panji Achmad
2. Direktur *Market & Statistics Internasional Coconut Community*, Bapak Alit Pirmansah
3. Kepala Bidang di DPMPTSP Provinsi Riau, Bapak Hasan

Lebih lanjut, sasaran diskusi meliputi peluang investasi, dukungan kebijakan, prospek perekonomian, kerjasama investasi, dan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan Riau Economic Forum 2025



Gambar 2. Kegiatan Riau Investment Forum 2025

REF
RIAU
ECONOMIC
FORUM 2025“
Memacu Pertumbuhan
Ekonomi Riau melalui
Investasi Berkelanjutan
”

BAB 2

Keuangan Pemerintah

Pada triwulan II 2025, realisasi Pendapatan APBD Provinsi Riau tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi di hampir seluruh komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkontraksi sejalan dengan turunnya realisasi penerimaan pajak. Lebih lanjut, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga mencatatkan penurunan akibat turunnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Provinsi Riau. Sejalan dengan Pendapatan, Belanja APBD pada triwulan II 2025 juga mengalami perlambatan. Realisasi belanja pada triwulan II 2025 didominasi oleh penyerapan pada Belanja Operasi khususnya sub-komponen Belanja Pegawai.



1. KONDISI UMUM

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran sebesar Rp9.447 miliar, menurun dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar Rp10.062 miliar. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp5.985 miliar menjadi Rp5.184 miliar (Tabel 2.1). Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 13,07% (yoy), menjadi Rp9.580 miliar pada tahun 2025 dari Rp11.020 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 32,65% (yoy) menjadi Rp1.492 miliar (Tabel 2.2).

Kinerja APBD secara agregat di Provinsi Riau terkontraksi pada triwulan II 2025. Realisasi pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mencapai Rp13.840 miliar atau terkontraksi 13,14% (yoy) dibandingkan

Tabel 2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Riau Tahun 2025

KOMPONEN BELANJA DAERAH	Rp Miliar			Perubahan (%)
	2024	2025	Selisih	
BELANJA OPERASI	6.535	6.514	-22	-0
Belanja Pegawai	2.942	2.962	20	1
Belanja Barang dan Jasa	2.981	3.126	145	5
Belanja Bunga	-	-	0	0
Belanja Subsidi	-	-	0	0
Belanja Hibah	568	406	-162	-29
Belanja Bantuan Sosial	44	19	-25	-56
BELANJA MODAL	2.216	1.492	-724	-33
Belanja Modal Tanah	4	2	-2	-60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310	450	140	45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	383	328	-55	-14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.482	650	-832	-56
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37	62	25	69
Belanja Modal Aset Lainnya	0	1	1	203
BELANJA TIDAK TERDUGA	13	50	37	278
Belanja Tidak Terduga	13	50	37	278
BELANJA TRANSFER	2.256	1.524	-732	-32
Belanja Transfer Bagi Hasil	1.795	1.291	-504	-28
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	461	233	-228	-49
BELANJA DAERAH	11.020	9.580	-1440	-13
PEMBIAYAAN DAERAH	575	69	-506	-87,98
Penggunaan SILPA	69	29	-41	-58,69

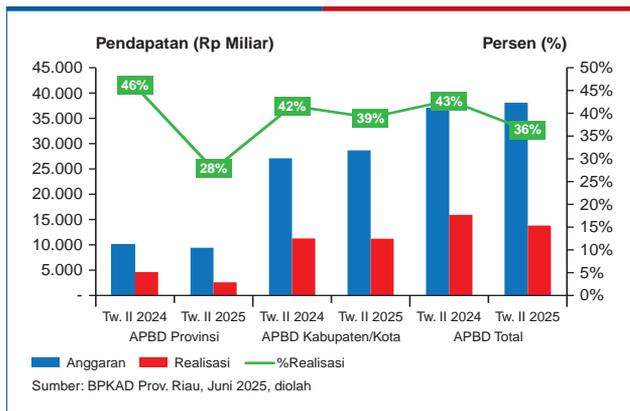
Sumber: BPKAD Provinsi Riau, data posisi Juni 2025, diolah

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Riau Tahun 2025

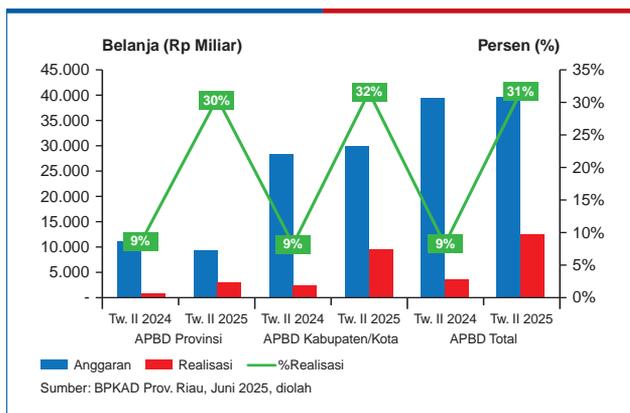
URAIAN	Rp Miliar			Perubahan (%)
	2024	2025	Selisih	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.985	5.184	-801	-13
Pajak Daerah	4.382	3.725	-657	-15
Retribusi Daerah	26	15	-11	-42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.098	815	-282	-26
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	479	629	149	31
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.069	4.254	185	5
Dana Bagi Hasil	1.351	1.508	157	12
Dana Alokasi Umum	1.619	1.611	-8	-0
Dana Alokasi Khusus	1.099	1.135	36	3
Dana Insentif Daerah	-	-	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8	9	1	17
PENDAPATAN DAERAH	10.062	9.447	-615	-6

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, data posisi Juni 2025, diolah

triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp15.935 miliar. Hingga periode laporan, rasio realisasi penerimaan pendapatan terhadap pagu juga melambat dari 42,86% menjadi 36,29%. Sejalan pendapatan, realisasi belanja daerah secara konsolidasi di Provinsi Riau juga terkontraksi 14,42% (yoy) menjadi Rp12.395 miliar pada triwulan II 2025 dari Rp14.484 miliar pada triwulan II 2024. Rasio realisasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga turun dari 35,96% menjadi 31,36%.



Grafik 2.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di wilayah Riau



Grafik 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di wilayah Riau

2. APBD PROVINSI RIAU TRIWULAN II 2025

Realisasi APBD Provinsi Riau untuk komponen pendapatan daerah pada triwulan II 2025 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun

persentase terhadap pagu anggaran. Komponen pendapatan daerah Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp3.793,29 miliar atau terkontraksi 18,24% (yoy) dari realisasi triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp4.639,31 miliar. Rasio penerimaan pendapatan terhadap pagu pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 40,15%. Secara spasial, komponen Pendapatan Asli Daerah terkontraksi 25,13% (yoy) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga terkontraksi 9,56% (yoy).

Selanjutnya, realisasi komponen belanja daerah Provinsi Riau juga mengalami perlambatan pada triwulan II 2025. Realisasi belanja daerah Provinsi Riau tercatat mencapai Rp2.916,10 miliar (30,44% dari pagu) atau terkontraksi 26,90% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 yang terealisasi Rp3.989,20 miliar (36,20% dari pagu). Perlambatan realisasi belanja daerah terjadi pada seluruh sub komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang terkontraksi 11,16% (yoy), Belanja Modal yang terkontraksi 98,70% (yoy), dan Belanja Transfer yang terkontraksi 49,23% (yoy).

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan II 2025

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan daerah didorong oleh turunnya realisasi PAD dan pendapatan transfer pemerintah pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp1.939,00 miliar atau terkontraksi 25,13% (yoy) dari triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.589,76 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 43,27% menjadi 37,40%.

Berdasarkan subkomponennya, lemahnya realisasi PAD disebabkan oleh melambatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi subkomponen Pajak Daerah pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp1.537,24 miliar atau terkontraksi 13,95% (yoy) dibanding triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.786,44 miliar.



Sementara berdasarkan komponen pembentuk pendapatan pajak daerah, penurunan penerimaan pajak daerah terjadi pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Realisasi penerimaan PKB pada triwulan II 2025 mencatatkan kontraksi sebesar 21,81% (yoy) dari yang sebelumnya senilai Rp586,18 miliar pada triwulan II 2024 menjadi Rp458,32 miliar pada triwulan II 2025.

Lebih lanjut, penerimaan pajak daerah dari komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga terpantau melambat pada triwulan II 2025. Penerimaan pajak daerah dari komponen BBNKB terealisasi sebesar Rp262,99 miliar, terkontraksi 38,00% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp424,21 miliar. Perlambatan juga terjadi pada komponen realisasi pajak daerah yang bersumber dari Pajak Air Permukaan sebesar yang terkontraksi 2,84% (yoy), yaitu dari Rp26,87 miliar pada triwulan II 2024 menjadi Rp26,11 miliar pada triwulan II 2025.

Di sisi lain, komponen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat tumbuh 6,19% (yoy) pada

triwulan II 2025 atau senilai Rp579,02 miliar. PBBKB tersebut tumbuh dibandingkan triwulan II 2024 yang mencatatkan realisasi pendapatan senilai Rp545,29 miliar.

Sejalan dengan penerimaan dari Pajak Daerah, penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah juga mengalami perlambatan. Pada triwulan II 2025 realisasi penerimaan dari subkomponen ini tercatat senilai Rp5,29 miliar, lebih rendah dibanding realisasi triwulan II 2024 yang tercatat senilai Rp6,69 miliar atau melambat 20,93% (yoy).

Penurunan penerimaan daerah dari PAD juga diikuti oleh penurunan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat. Pada triwulan II 2025, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1.851,68 miliar atau terkontraksi 9,56% (yoy) dibandingkan realisasi triwulan II 2024 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp2.047,30 miliar. Rasio realisasi pendapatan transfer terhadap target tahunan juga mengalami perlambatan yang sebelumnya mencatatkan realisasi sebesar 50,31% dari pagu, menjadi 43,53% pada triwulan II 2025.

Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Triwulan II 2024 dan 2025

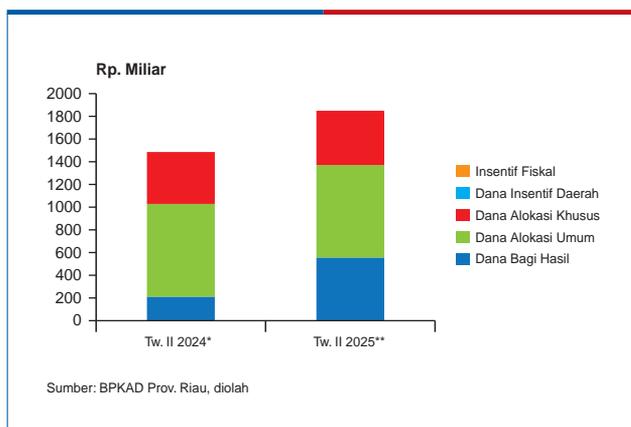
Akun Anggaran (Satuan Miliar)	Tw. II 2024*			TW II 2025**			Growth (% yoy)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
PENDAPATAN DAERAH	10.061,90	4.639,31	46,11	9.447,26	3.793,29	40,15	-18,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.984,94	2.589,76	43,27	5.183,95	1.939,00	37,40	-25,13
Pajak Daerah	4.382,17	1.786,44	40,77	3.725,13	1.537,24	41,27	-13,95
Retribusi Daerah	25,97	6,69	25,76	15,01	5,29	35,25	-20,93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.097,54	581,71	53,00	815,13	101,61	12,47	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	479,25	214,92	44,84	628,69	294,86	46,90	37,20
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.069,18	2.047,30	50,31	4.254,24	1.851,68	43,53	-9,56
DANA PERIMBANGAN	4.069,18	2.047,30	50,31	4.254,24	1.851,68	43,53	-9,56
Dana Bagi Hasil	1.351,08	211,07	15,62	1.508,32	556,11	36,87	163,48
Dana Alokasi Umum	1.618,64	818,41	50,56	1.610,76	816,16	50,67	-0,27
Dana Alokasi Khusus	1.099,47	458,30	41,68	1.135,15	479,41	42,23	4,61
Dana Alokasi Khusus – Fisik	255,63	14,18	5,55	137,17	-	-	-
Dana Alokasi Khusus – Non-Fisik	843,84	444,12	52,63	997,98	479,41	48,04	7,95
DANA INSENTIF DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
INSENTIF FISKAL	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	7,78	2,25	28,92	9,08	2,61	28,75	16,00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah
Keterangan: *) Data Posisi Juni 2024, **) Data Posisi Juni 2025

Tabel 2.4. Komponen Pendapatan Pajak Provinsi Riau Triwulan II 2024 dan 2025

Komponen Pembentuk Pendapatan Pajak Daerah	Tw II 2024*			Tw II 2025**			Growth
	Realisasi (Rp miliar)	% Realisasi	Pangsa	Realisasi (Rp miliar)	% Realisasi	Pangsa	%yoy
Pajak Kendaraan Bermotor	586,18	39,29%	66,91%	458,32	30,41%	29,83%	-21,81
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	424,21	37,27%	48,42%	262,99	23,11%	17,12%	-38,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	545,29	47,45%	62,24%	579,02	50,38%	37,69%	6,19
Pajak Air Permukaan	26,87	56,63%	3,07%	26,11	51,84%	1,70%	-2,84
Pajak Rokok	203,89	36,72%	23,27%	209,93	30,47%	13,66%	2,96

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah
Keterangan: *) Data Posisi Juni 2024, **) Data Posisi Juni 2025



Grafik 2.3. Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II 2024 dan 2025

Berdasarkan komponennya, penurunan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disebabkan oleh turunnya realisasi dana perimbangan. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada triwulan II 2025 terkontraksi sebesar 0,27% (yoy) dari yang sebelumnya mencatatkan realisasi sebesar Rp818,41 miliar pada triwulan II 2024 menjadi Rp816,16 pada triwulan II 2025.

Berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU), dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) mencatatkan realisasi sebesar Rp556,11 miliar atau tumbuh 163,48% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp211,07 miliar. Pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen DBH Pajak yang mencatatkan realisasi senilai Rp359,3 miliar pada triwulan II 2025. Peningkatan nilai realisasi tersebut disertai dengan peningkatan rasio realisasi. Rasio penerimaan dari

DBH terhadap pagu pada triwulan II 2025 mencapai 36,87% lebih tinggi dari rasio capaian pada triwulan II 2024 yang sebesar 15,62%.

2.2. Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan II 2025

Kinerja belanja pemerintah Provinsi Riau juga mencatatkan perlambatan pada triwulan II 2025. Realisasi belanja daerah Provinsi Riau tercatat sebesar Rp2.916,10 miliar atau terkontraksi 26,90% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 yang mencatatkan realisasi senilai Rp3.989,20 miliar. Sejalan dengan perlambatan nilai realisasi, rasio realisasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga melambat dari 36,20% menjadi 30,44%. Perlambatan realisasi belanja didorong oleh lemahnya realisasi pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer.

Realisasi belanja operasi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp2.542,14 miliar (39,03% dari pagu anggaran) atau terkontraksi 11,16% (yoy) dari triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.861,38 miliar (43,78% dari pagu anggaran). Berdasarkan subkomponennya, kontraksi dimaksud disumbang oleh belanja barang dan jasa yang tercatat mengalami perlambatan dari Rp1.096,99 miliar menjadi Rp714,28 miliar atau terkontraksi 34,89% (yoy). Selain itu, realisasi komponen belanja hibah juga turut menyumbang perlambatan tersebut. Belanja hibah terpantau menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Serapan belanja hibah pada triwulan


Tabel 2.5. Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2024 dan 2025

Akun Anggaran (Rp. Miliar)	Tw. II 2024*			TW II 2025**			Growth (% yoy)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
BELANJA DAERAH	11.020,38	3.989,20	36,20	9.580,09	2.916,10	30,44	-26,90
BELANJA OPERASI	6.535,18	2.861,38	43,78	6.513,65	2.542,14	39,03	-11,16
Belanja Pegawai	2.941,77	1.520,42	51,68	2.961,78	1.740,87	58,78	14,50
Belanja Barang dan Jasa	2.981,39	1.096,99	36,79	3.126,44	714,28	22,85	-34,89
Belanja Hibah	567,89	237,82	41,88	406,04	83,61	20,59	-64,84
Belanja Bantuan Sosial	44,13	6,15	13,94	19,40	3,37	17,39	-45,16
BELANJA MODAL	2.215,90	401,46	18,12	1.492,31	5,21	0,35	-98,70
Belanja Modal Tanah	3,84	0,16	4,30	1,54	-	-	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310,38	64,28	20,71	450,08	4,82	1,07	-92,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382,93	23,07	6,02	328,39	0,03	0,01	-99,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.481,87	275,21	18,57	649,67	0,00	0,00	-100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36,61	38,67	105,60	61,82	0,37	0,59	-99,05
Belanja Modal Aset Lainnya	0,27	0,07	24,32	0,81	-	-	-100,00
BELANJA TAK TERDUGA	13,33	-	-	50,34	-	-	-
Belanja Tak Terduga	13,33	-	-	50,34	-	-	-
BELANJA TRANSFER	2.255,97	726,36	32,20	1.523,80	368,75	24,20	-49,23
Belanja Transfer Bagi Hasil	1.794,97	599,40	33,39	1.290,89	349,59	27,08	-41,68
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	461,00	126,96	27,54	232,91	19,15	8,22	-84,91

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah
 Keterangan: *) Data Posisi Juni 2024, **) Data Posisi Juni 2025

Il 2025 tercatat sebesar Rp83,61 miliar, terkontraksi 20,59% (yoy) dari triwulan II 2024 yang terealisasi Rp237,82 miliar. Di sisi lain, perlambatan tersebut ditahan oleh komponen belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai pada triwulan II 2025 tercatat meningkat dari Rp1.520,42 miliar menjadi Rp1.740,87 miliar atau tumbuh 14,50% (yoy). Peningkatan didorong oleh realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp883,46 miliar atau mencapai 61,16% dari pagu anggaran.

Sejalan dengan serapan belanja operasi, realisasi belanja modal juga tercatat melambat pada periode laporan. Penyerapan belanja modal pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp5,21 miliar (0,35% dari pagu), turun 98,70% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp401,46 miliar. Berdasarkan

jenisnya, penurunan belanja modal terutama terjadi pada realisasi belanja modal tanah dan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang hingga triwulan II 2025 belum mencatatkan realisasi belanja.

3. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN / KOTA

Sejalan dengan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Riau yang menurun, pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota secara agregat juga menunjukkan perlambatan. Secara umum, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota tercatat sebesar Rp11.224 miliar, terkontraksi 0,63% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi Rp11.295 miliar.





Tabel 2.6. Realisasi Pendapatan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Triwulan II 2024 dan 2025

(Rp Miliar) Kab/Kota	Tw. II 2024*			Tw. II 2025**			Growth (% yoy)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Kampar	2.863	1.148	40,09	3.003	1.183	39,39	3,09
Bengkalis	3.929	1.699	43,25	4.132	1.687	40,83	-0,71
Indragiri Hulu	1.637	682	41,68	1.652	678	41,05	-0,60
Indragiri Hilir	2.171	946	43,56	2.201	892	40,54	-5,67
Pelalawan	1.848	813	43,99	1.896	756	39,87	-6,99
Rokan Hulu	1.807	848	46,92	1.941	875	45,08	3,18
Rokan Hilir	2.129	757	35,57	2.464	794	32,24	4,88
Siak	2.901	1.016	35,03	3.000	937	31,23	-7,82
Kuantan Singingi	1.519	581	38,29	1.642	530	32,27	-8,88
Kep. Meranti	1.338	509	38,06	1.272	479	37,69	-5,88
Pekanbaru	2.996	1.312	43,78	3.209	1.467	45,72	11,87
Dumai	1.973	983	49,83	2.280	945	41,43	-3,92
Provinsi Riau	10.062	4.639	46,11	9.447	2.616	27,69	-43,61
Realisasi Kab/Kota	27.113	11.295	41,66	28.692	11.224	39,12	-0,63
Total Pendapatan	37.174	15.935	42,86	38.139	13.840	36,29	-13,14

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi Juni 2024, **) Data Posisi Juni 2025

Secara spasial, perlambatan realisasi pendapatan terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Adapun realisasi pertumbuhan pendapatan paling lambat terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang terkontraksi sebesar 8,88% (yoy) dari realisasi pada triwulan II 2024. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah terjadi di Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Rokan Hulu dengan pertumbuhan tertinggi di Kota Pekanbaru yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11,87% (yoy).

Sejalan dengan realisasi pendapatan, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp9.479 miliar atau melambat

dibandingkan realisasi triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp10.495 miliar atau terkontraksi 9,68% (yoy). Rasio serapan belanja daerah terhadap pagu anggaran juga mengalami penurunan dari 35,87% menjadi 23,98%.

Perlambatan realisasi belanja terjadi hampir di seluruh Kab/Kota di Provinsi Riau. Perlambatan terdalam terjadi di Kota Pekanbaru yang mencatatkan kontraksi realisasi belanja sebesar -22,11% (yoy). Sementara itu, masih ada daerah yang mengalami pertumbuhan penyerapan belanja daerah yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti dengan pertumbuhan masing-masing 1,76% (yoy) dan 1,53% (yoy). Pertumbuhan realisasi belanja daerah di kabupaten tersebut terutama didorong oleh tingginya belanja pegawai pada triwulan laporan.




Tabel 2.7. Realisasi Belanja Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Triwulan II 2024 dan 2025

(Rp Miliar) Kab/Kota	Tw. II 2024*			Tw. II 2025**			Growth (% yoy)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Kampar	2.927	1.213	41,44	3.038	1.203	39,59	-0,83
Bengkalis	4.439	1.353	30,49	4.258	1.377	32,34	1,76
Indragiri Hulu	1.824	691	37,86	1.762	582	33,02	-15,75
Indragiri Hilir	2.568	840	32,69	2.405	726	30,18	-13,54
Pelalawan	2.122	698	32,89	2.000	633	31,65	-9,31
Rokan Hulu	1.823	760	41,71	1.967	629	31,99	-17,27
Rokan Hilir	2.252	731	32,45	2.554	687	26,88	-6,05
Siak	3.107	1.106	35,60	3.201	890	27,80	-19,55
Kuantan Singingi	1.783	606	34,00	1.934	538	27,81	-11,28
Kep. Meranti	1.378	412	29,89	1.362	418	30,69	1,53
Pekanbaru	2.986	1.260	42,20	3.189	982	30,78	-22,11
Dumai	2.050	825	40,25	2.270	815	35,90	-1,22
Provinsi Riau	11.020	3.989	36,20	9.580	2.916	30,44	-26,90
Realisasi Kab/Kota	29.259	10.495	35,87	39.521	9.479	23,98	-9,68
Total Belanja	40.279	14.484	35,96	39.521	12.395	31,36	-14,42

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi Juni 2024, **) Data Posisi Juni 2025

4. STRATEGI KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas perekonomian Riau. Pemerintah daerah melalui kebijakan fiskalnya, telah menempuh beberapa langkah strategis seperti (i) memberikan insentif kepada para pelaku usaha berupa insentif pajak terutama bagi pelaku usaha, (ii) meningkatkan belanja produktif sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah seperti untuk pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan (iii) melakukan penguatan pengawasan, manajemen keuangan, serta pemantauan pelaksanaan program yang tersebar di seluruh instansi daerah terkait agar belanja daerah dapat terealisasi tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan. Langkah strategis yang diambil diharapkan dapat bertindak sebagai katalis perekonomian Riau.

Pada tahun 2025, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Riau difokuskan pada peningkatan PAD melalui upaya optimalisasi

penerimaan dari sektor andalan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Terdapat dua strategi baru yang diimplementasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan PKB, yaitu (1) penyusutan nilai kendaraan bermotor sebesar 2% untuk keluaran tahun 2020 ke bawah; dan (2) keringanan denda keterlambatan bayar PKB sebesar 2% per bulan maksimal selama 15 bulan. Untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar PKB, Pemerintah Provinsi Riau juga terus memperkuat fasilitas pembayaran PKB melalui Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, maupun aplikasi Samsat Digital Nasional.

Selain itu, keberlanjutan implementasi elektronifikasi keuangan pemerintah daerah tetap diperkuat dan berlanjut hingga tahun 2025. Elektronifikasi keuangan pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai sarana efisiensi peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.





BAB 3 Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 0,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,68% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya serta Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran. Di sisi lain, peningkatan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi Makanan, Minuman dan Tembakau terutama komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM). Secara spasial, terdapat variasi laju inflasi Kota/Kab pantauan IHK Riau dengan peningkatan tekanan inflasi tercatat terjadi di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, serta Tembilahan. Sementara itu, Kabupaten Kampar terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ke depan, inflasi Riau diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ untuk keseluruhan tahun 2025.



1. KONDISI UMUM

Pada triwulan II 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,98% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 0,68% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh peningkatan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran; Pakaian & Alas Kaki; serta Kesehatan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

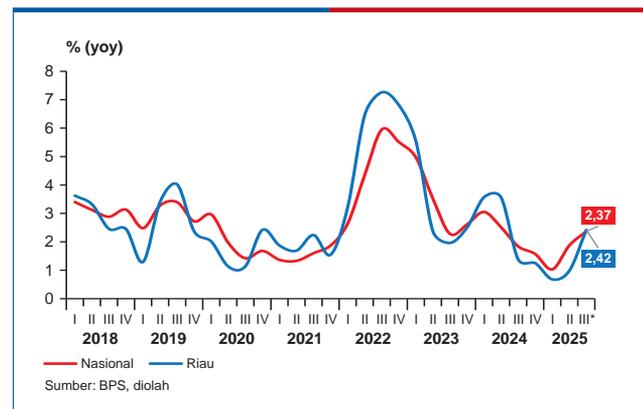
Ke depan, inflasi Riau pada triwulan III 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025. Perkiraan peningkatan inflasi tersebut didukung oleh (i) peningkatan harga komoditas cabai merah dan bawang merah sejalan dengan periode musim hujan dan risiko gagal panen di sentra produksi; (ii) peningkatan harga komoditas daging ayam ras sejalan dengan keterlambatan masuknya pasokan dari distributor; (iii) peningkatan tarif angkutan udara sejalan dengan cuti bersama HBKN Maulid Nabi; dan (iv) potensi kenaikan harga emas seiring dengan peralihan investasi ke *safe-haven asset*. Di sisi lain, peningkatan inflasi tersebut diperkirakan akan tertahan oleh (i) efektivitas upaya intervensi harga, peningkatan produksi, dan jaminan kelancaran distribusi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat (TPID dan TPIP), seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Kerjasama Antar Daerah (KAD), pembentukan kios pengendali inflasi di pasar pantauan, serta (ii) optimalisasi peran BUMD Pangan dalam pengendalian inflasi daerah melalui kehadiran Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN).

Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking*, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim

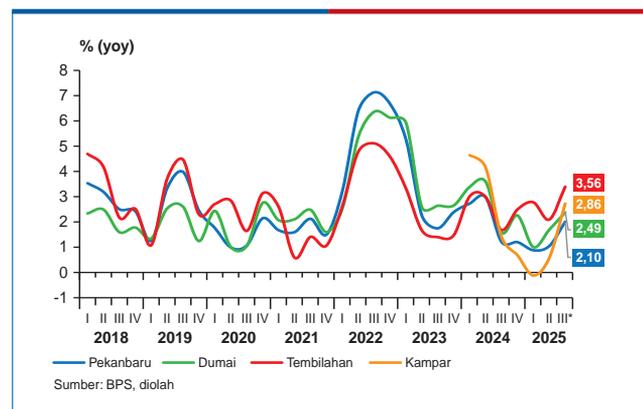
Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan pemerintah (*administered prices*) Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.

2. PERKEMBANGAN INFLASI RIAU

Pada triwulan II 2025, Riau mengalami inflasi sebesar 0,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 0,68% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Nasional yang juga mengalami peningkatan dari 1,03% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 1,87% (yoy) pada triwulan II 2025. Peningkatan tekanan inflasi tahunan Riau



Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (% yoy)



Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi 4 Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Riau (% yoy)





dipengaruhi oleh inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, sehingga menahan laju penurunan inflasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi terjadi di 3 (tiga) kabupaten/kota pantauan IHK di Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Kampar. Pada triwulan II 2025, Kota Pekanbaru tercatat mengalami peningkatan inflasi dari 0,90% (yoy) menjadi 1,08% (yoy). Selanjutnya, Kota Dumai mengalami peningkatan inflasi dari 1,03% (yoy) menjadi 1,76% (yoy), serta Kabupaten Kampar yang mengalami peningkatan inflasi dari -0,16% (yoy) menjadi sebesar 0,58% (yoy). Di sisi lain, penurunan inflasi terjadi pada Kota Tembilahan dari 2,91% (yoy) menjadi 2,19% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

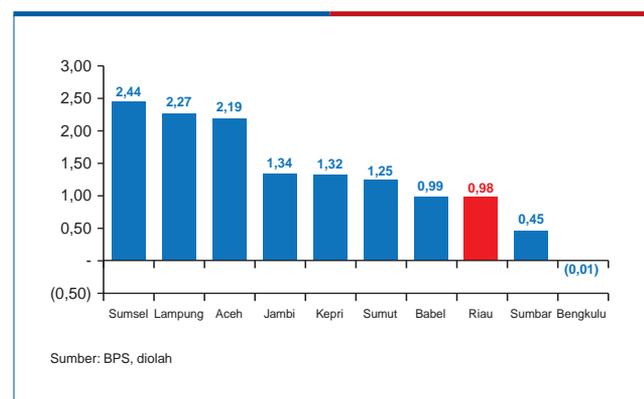
Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau pada triwulan II 2025 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran; Pakaian & Alas Kaki; serta Kesehatan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut ditahan oleh deflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; dan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi Riau pada Triwulan II 2025 berada pada urutan ketiga terendah setelah Bengkulu dan Sumbar dan di bawah realisasi inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy).

Lebih lanjut, berdasarkan komoditas utama penyumbang inflasi/deflasi, peningkatan inflasi Riau terutama didorong oleh Emas Perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Minyak Goreng, Daging Ayam Ras, Beras, dan Nasi Dengan Lauk. Hal tersebut dipengaruhi oleh (i) ketidakpastian kondisi geopolitik dunia yang mendorong permintaan *safe-haven*

asset; (ii) transmisi kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok pada 1 Januari 2025 (PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rata-rata kenaikan 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok Elektrik dengan rata-rata kenaikan 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau dengan rata-rata kenaikan 6,19%; (iii) kecenderungan produsen CPO di Riau untuk melakukan pemenuhan permintaan ekspor dibandingkan dengan domestik yang tergambar melalui tren penurunan *Nett-export* Antar Daerah (NAD) pada triwulan I dan II 2025 secara tahunan sehingga ditengarai mengakibatkan penurunan bahan baku yang dapat berdampak pada penurunan produksi minyak goreng; (iv) penurunan jumlah pasokan daging ayam ras sejalan dengan keterlambatan distribusi pasokan oleh *supplier*; (v) penurunan jumlah produksi beras pasca periode panen raya, serta (vi) peningkatan harga Nasi dengan Lauk pada periode libur anak sekolah.

Di sisi lain, peningkatan inflasi ini tertahan oleh deflasi komoditas cabai merah dan bawang merah. Penurunan harga cabai merah masih menjadi penyumbang deflasi terbesar pada triwulan II 2025 melanjutkan deflasi dari triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh surplus produksi yang terjadi di sentra produksi a.l Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Hal serupa terjadi pada komoditas bawang merah, kentang, cabai rawit dan cabai hijau sehingga mengakibatkan turunnya harga di tingkat pedagang.



Grafik 3.3. Inflasi Seluruh Provinsi di Sumatera Juni 2025 (% yoy)





Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Tahunan Riau (% andil yoy)

PENYUMBANG INFLASI			
TW I 2025		TW II 2025	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Emas Perhiasan	0,61	Emas Perhiasan	0,66
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,22	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,18
Minyak Goreng	0,22	Minyak Goreng	0,16
Beras	0,13	Daging Ayam Ras	0,10
Nasi dengan Lauk	0,12	Beras	0,09
Ikan Serai	0,07	Nasi dengan Lauk	0,09

Sumber: BPS, diolah

PENYUMBANG DEFLASI			
TW I 2025		TW II 2025	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Cabai Merah	(0,73)	Cabai Merah	(0,98)
Tarif Listrik	(0,63)	Bawang Merah	(0,26)
Ayam Hidup	(0,09)	Kentang	(0,06)
Tomat	(0,08)	Cabai Rawit	(0,05)
Jengkol	(0,07)	Ikan Baung	(0,04)
Bawang Merah	(0,07)	Cabai Hijau	(0,03)

2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

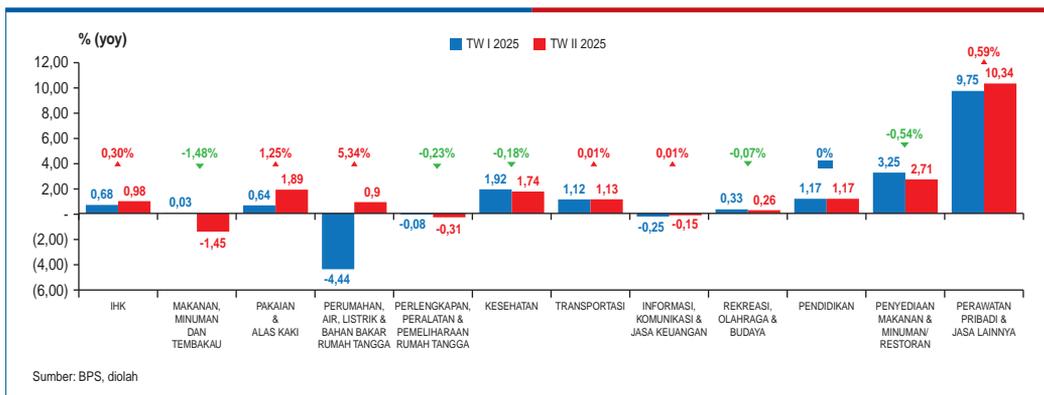
Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II 2025 terjadi pada 5 (lima) kelompok, yaitu Pakaian & Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Transportasi; Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan; serta Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi yang lebih lanjut tertahan oleh 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu Makanan, Minuman dan Tembakau; Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga; Kesehatan; Rekreasi, Olahraga & Budaya; serta Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya. Sementara itu kelompok Pendidikan berada pada level stabil.

KELOMPOK PENDORONG PENINGKATAN TEKANAN INFLASI

1. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki tercatat menjadi salah satu penyumbang peningkatan inflasi di Provinsi Riau. Pada triwulan II 2025, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki tercatat mengalami inflasi sebesar 1,89% (yoy), meningkat dari triwulan I 2025 sebesar 0,64% (yoy). Hal ini tercermin dari kenaikan indeks dari 103,14 pada Juni 2024 menjadi 105,09 pada Juni 2025.

Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi utamanya disumbang oleh sandal karet pria, seragam sekolah pria, seragam sekolah anak, baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria, baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak,



Grafik 3.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Riau (% yoy)



baju muslim pria masing-masing sebesar 0,01%. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan pakaian serta baju muslim pria pada momentum HBKN Idul Adha, serta kebutuhan perlengkapan sekolah memasuki periode tahun ajaran baru.

2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada triwulan II 2025, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat mengalami inflasi sebesar 0,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang mencatatkan deflasi sebesar -4,44% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh inflasi sewa rumah sejalan dengan penyesuaian harga tahunan dengan andil sebesar 0,09%, serta peningkatan harga semen dan bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 0,01%.

3. Kelompok Transportasi

Pada triwulan II 2025 kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 1,13% (yoy), sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,12% (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan harga angkutan udara dan sepeda motor dengan

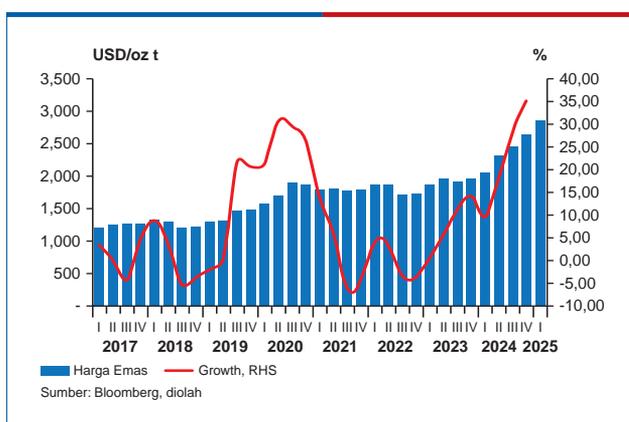
masing-masing andil tahunan sebesar 0,06%. Hal ini terjadi sejalan dengan (i) peningkatan permintaan angkutan udara selama periode cuti bersama dan libur sekolah; (ii) peningkatan permintaan sepeda motor yang didukung oleh peningkatan indeks penjualan ritel kendaraan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia pada triwulan II 2025.

4. Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan

Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan tercatat mengalami kenaikan tekanan inflasi dibandingkan dengan triwulan I 2025. Deflasi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 0,15% (yoy), atau tidak lebih dalam dibandingkan dengan deflasi pada triwulan I 2025 sebesar 0,25%. Hal ini terutama disumbang oleh peningkatan harga telepon seluler dengan andil sebesar 0,02%.

5. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya tercatat mengalami tekanan inflasi terbesar pada Triwulan II 2025, yaitu sebesar 10,34% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 9,75% (yoy). Komoditas penyumbang utama tekanan inflasi berasal dari emas perhiasan sebesar 0,66%. Hal ini sebagai akibat dari peningkatan harga emas dunia yang tertransmisi ke kenaikan harga emas perhiasan domestic. Kenaikan harga ini terus menunjukkan tren peningkatan setiap triwulannya seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan, ketegangan geopolitik, dan ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral utama sehingga melemahkan nilai dolar AS. Kondisi ini mendorong investor beralih ke emas sebagai aset lindung nilai (*safe-haven*) untuk menjaga nilai kekayaan mereka, sehingga permintaan naik dan harga emas terdorong lebih tinggi.



Grafik 3.5. Perkembangan Harga Emas Global



KELOMPOK PENAHAN PENINGKATAN TEKANAN INFLASI

1. Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau tercatat sebagai kelompok yang mengalami deflasi dengan tekanan sebesar -1,45% (yoy) pada triwulan II 2025, atau berbalik arah dari triwulan I 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,03% (yoy). Penurunan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh komoditas sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,18%, diikuti minyak goreng sebesar 0,16%, daging ayam ras sebesar 0,10%, dan beras sebesar 0,10%. Kondisi ini sejalan dengan (i) transmisi kenaikan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok pada 1 Januari 2025 (PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rata-rata kenaikan 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok Elektrik dengan rata-rata kenaikan 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau dengan rata-rata kenaikan 6,19%; (ii) kecenderungan produsen CPO Provinsi Riau untuk melakukan pemenuhan permintaan ekspor dibandingkan dengan domestik yang tergambar melalui tren penurunan *Nett-export* Antar Daerah (NAD) pada triwulan I dan II 2025 secara tahunan, sehingga mengakibatkan penurunan ketersediaan bahan baku yang dapat berdampak pada penurunan produksi minyak goreng; (iii) penurunan jumlah pasokan daging ayam sejalan dengan keterlambatan distribusi pasokan oleh *supplier*; (iv) penurunan jumlah produksi beras pasca periode panen raya.

2. Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga

Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga juga turut mencatatkan deflasi. Kelompok ini mengalami deflasi pada triwulan II 2025 sebesar -0,31% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,08% (yoy). Deflasi pada periode laporan terutama disumbang oleh sabun cair/cuci piring sebesar 0,03%.

3. Kesehatan

Kelompok Kesehatan tercatat mengalami perlambatan tekanan inflasi yaitu dari sebesar 1,92% (yoy) pada triwulan I 2025, menjadi 1,74% (yoy) pada triwulan II 2025. Berdasarkan komoditas, penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh tarif rumah sakit sebesar 0,02% serta obat gosok dan tarif dokter spesialis masing-masing sebesar 0,01%.

4. Rekreasi, Olahraga & Budaya

Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya turut mengalami penurunan tekanan inflasi pada triwulan II 2025 yaitu menjadi 0,26% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,33% (yoy). Subkelompok yang mengalami penurunan yaitu subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah sebesar 2% dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah tas sekolah sebesar 0,02% sejalan dengan periode memasuki tahun ajaran baru sekolah.

5. Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran

Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran mengalami penurunan inflasi pada triwulan II 2025 dengan tingkat inflasi sebesar 2,71% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,25% (yoy). Inflasi terutama didorong oleh andil komoditas nasi dan lauk sebesar 0,09%, serta diikuti oleh ketupat/lontong sayur sejalan dengan peningkatan permintaan akibat peningkatan mobilisasi masyarakat pada periode libur anak sekolah.

6. Pendidikan

Kelompok Pendidikan berada pada level stabil dengan tingkat tekanan inflasi sebesar 1,17% pada triwulan II 2025 atau sama seperti triwulan I 2025. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan, yaitu biaya taman





kanak-kanak sebesar 0,02%, biaya SMP dan biaya SD masing-masing sebesar 0,01% sejalan dengan periode memasuki tahun ajaran baru sekolah.

2.2. Analisis Inflasi Spasial Riau

Pada triwulan II 2025, terdapat perbedaan arah laju inflasi pada Kota/Kab IHK di Riau. Sejalan dengan Riau, Kota Pekanbaru turut mengalami peningkatan inflasi dari 0,90% (yoy) menjadi sebesar 1,08% (yoy); Kota Dumai juga mengalami peningkatan inflasi dari 1,03% (yoy) menjadi 1,76% (yoy); dan Kampar dari

deflasi sebesar 0,16% (yoy) menjadi inflasi sebesar 0,58% (yoy). Sementara itu, Kota Tembilahan mencatatkan penurunan inflasi dari 2,91% (yoy) menjadi 2,19% (yoy).

Berdasarkan 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi, terdapat kemiripan pada seluruh kab/kota IHK. Komoditas emas perhiasan terpantau menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di setiap kab/kota, namun dengan andil inflasi yang bervariasi. Di sisi lain, cabai merah dan bawang merah terpantau menjadi komoditas utama penyumbang deflasi di setiap kab/kota, sejalan dengan melimpahnya pasokan cabai merah dan bawang merah pada periode panen raya yang didukung oleh distribusi yang lancar. Secara khusus, komoditas emas perhiasan terpantau memberikan andil inflasi tertinggi di Kota Tembilahan, dan andil deflasi cabai merah terdalam terjadi di Kab. Kampar. Hal ini sejalan dengan pangsa/bobot komoditas tersebut yang relatif lebih tinggi pada masing-masing kota/kab IHK dibandingkan kota IHK lainnya.

Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Spasial Riau (% yoy)

Wilayah	TW I 2025	TW II 2025	Arah
Provinsi Riau	0,68	0,98	▲
Kota Pekanbaru	0,90	1,08	▲
Kota Dumai	1,03	1,11	▲
Kota Tembilahan	2,91	2,19	▼
Kab. Kampar	(0,16)	0,57	▲

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Kab/Kota IHK Riau Triwulan II 2025 (% andil yoy)

	RIAU		PEKANBARU		DUMAI		TEMBILAHAN		KAMPAR	
	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
INFLASI	Emas Perhiasan	0,66	Emas Perhiasan	0,73	Emas Perhiasan	0,60	Emas Perhiasan	1,36	Emas Perhiasan	0,45
	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,18	Nasi Dengan Lauk	0,16	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,21	Minyak Goreng	0,23	Minyak Goreng	0,30
	Minyak Goreng	0,16	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,12	Minyak Goreng	0,15	Kangkung	0,22	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,29
	Daging Ayam Ras	0,10	Beras	0,11	Beras	0,13	Bayam	0,19	Daging Ayam Ras	0,16
	Beras	0,09	Angkutan Udara	0,11	Ikan Serai	0,12	Beras	0,18	Sewa Rumah	0,16
	Nasi Dengan Lauk	0,09								
DEFLASI	Cabai Merah	(0,98)	Cabai Merah	(0,90)	Cabai Merah	(0,90)	Cabai Merah	(0,62)	Cabai Merah	(1,22)
	Bawang Merah	(0,26)	Bawang Merah	(0,15)	Bawang Merah	(0,10)	Bawang Merah	(0,12)	Bawang Merah	(0,54)
	Kentang	(0,06)	Kentang	(0,07)	Cabai Rawit	(0,09)	Jeruk	(0,10)	Ikan Baung	(0,11)
	Cabai Rawit	(0,05)	Ikan Nila	(0,05)	Telur Ayam Ras	(0,09)	Daging Ayam Ras	(0,09)	Cabai Rawit	(0,06)
	Ikan Baung	(0,04)	Tarif Parkir	(0,04)	Kentang	(0,04)	Kol Putih/Kubis	(0,07)	Sabun Cair/Cuci Piring	(0,06)
	Cabai Hijau	(0,03)								

Sumber: BPS, diolah



Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Kab/Kota IHK Riau Triwulan II 2025 (% yoy)

Kelompok Pengeluaran	Riau	Pekanbaru	Dumai	Tembilahan	Kampar
UMUM	0,98	0,90	1,76	2,19	0,58
Makanan, Minuman, dan Tembakau	(1,45)	(1,87)	2,26	0,41	(1,50)
Pakaian dan Alas Kaki	1,89	0,83	1,47	0,67	4,34
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	0,90	0,49	0,32	0,56	1,80
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	(0,31)	(0,28)	0,66	1,69	(1,06)
Kesehatan	1,74	2,02	1,54	3,78	0,32
Transportasi	1,13	1,46	0,66	0,94	0,73
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(0,15)	(0,25)	0,15	0,19	(0,12)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,26	(0,77)	0,79	(0,18)	1,89
Pendidikan	1,17	1,05	0,56	2,73	1,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,71	3,87	1,21	0,88	0,69
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	10,34	11,03	8,60	16,33	8,35

Sumber: BPS, diolah

■ Lebih tinggi dari inflasi Riau

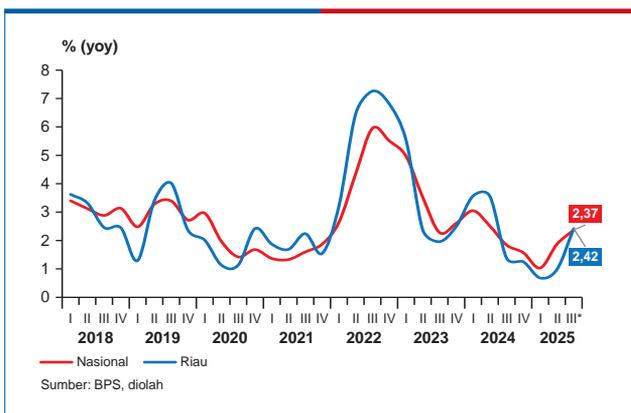
3. TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2025

Pada triwulan III 2025 (hingga Juli 2025) inflasi Riau masih menunjukkan tren peningkatan tekanan inflasi. Pada Juli 2025, inflasi Riau tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 0,98% (yoy), terutama dipengaruhi oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

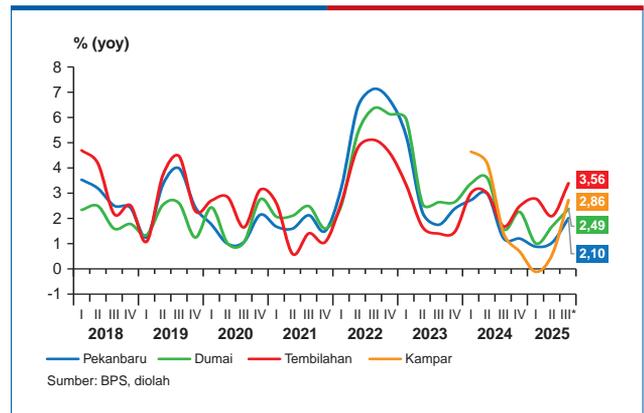
Secara spasial, inflasi terendah terjadi di Kab. Kampar sebesar 2,86% (yoy), diikuti Kota Pekanbaru sebesar 2,10% (yoy), Kota Dumai sebesar 2,49% (yoy) dan Kota Tembilahan 3,56% (yoy).

Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan pada bulan Juli 2025 terutama didorong oleh kenaikan harga Emas Perhiasan, Daging Ayam Ras, Bawang

Merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Minyak Goreng, dan Ayam Hidup seiring dengan (i) peningkatan harga emas global sejalan dengan peningkatan ketidakpastian global dan kenaikan permintaan investor terhadap *safe-haven asset*, (ii) penurunan jumlah pasokan daging ayam ras dan ayam hidup sejalan dengan keterlambatan distribusi pasokan oleh *supplier*, (iii) peningkatan harga bawang merah sejalan dengan gagal panen di sentra produksi akibat musim kemarau, (iv) transmisi kenaikan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok pada 1 Januari 2025 (PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rata-rata kenaikan 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok Elektrik dengan rata-rata kenaikan 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau dengan rata-rata kenaikan 6,19%, serta



Grafik 3.6. Perkembangan Inflasi Bulanan Riau dan Nasional (% yoy)



Grafik 3.7. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota/Kabupaten IHK (% yoy)



Tabel 3.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Riau Juli 2025 (% andil yoy)

INFLASI		DEFLASI	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Emas Perhiasan	0,63	Cabai Merah	(0,48)
Daging Ayam Ras	0,23	Kentang	(0,08)
Bawang Merah	0,20	Cabai Rawit	(0,07)
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,18	Wortel	(0,03)
Minyak Goreng	0,17	Sabun Cair/Cuci Piring	(0,03)
Ayam Hidup	0,16	Bawang Putih	(0,03)

Sumber: BPS, diolah

(v) kecenderungan produsen CPO Provinsi Riau untuk melakukan pemenuhan permintaan ekspor dibandingkan dengan domestik yang tergambar melalui tren penurunan *Nett-export* Antar Daerah (NAD) pada triwulan I dan II 2025 secara yoy, sehingga mengakibatkan penurunan ketersediaan bahan baku yang dapat berdampak pada penurunan produksi minyak goreng.

Ke depan, laju inflasi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan seiring dengan beberapa *upside risks* yang membayangi perkembangan harga dan jasa, di antaranya peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada periode *peak season* HBKN, dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau sebesar 6,5% pada tahun 2025, peningkatan permintaan pangan seiring dengan program Makan Bergizi Gratis dan Bansos, peningkatan Indeks Harga *Imported Inflation* (IHIM) Pangan, kenaikan tarif tol Pekanbaru – Bangkinang – Kota Kampar dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, serta peningkatan harga emas perhiasan pada tahun 2025. Meskipun terdapat sejumlah *upside risks*, inflasi Riau untuk tahun 2025 diperkirakan dapat terkendali, seiring dengan perbaikan produksi hortikultura dan beras sepanjang tahun 2025 (Program OPSI PADI RIAU), cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, prognosa peningkatan produksi jagung, kebijakan pemerintah untuk menjaga laju inflasi *administered prices* (a.l tarif angkutan udara, tarif parkir, tarif listrik), serta efektivitas penguatan sinergi TPIP dan TPID melalui Program GNPIP bersinergi dengan

BUMD Pangan yang diharapkan dapat menjaga laju inflasi agar tetap berada pada rentang sasaran target inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy).

4. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mengendalikan inflasi, terutama melalui Program GNPIP. Pengendalian inflasi yang dilakukan terus berfokus pada Kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), sebagai berikut:

a. Keterjangkauan Harga

TPID se-Provinsi Riau rutin menyelenggarakan pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan berbagai inovasi, di antaranya:

- Pengembangan gerai/toko pangan murah di Provinsi Riau, yaitu Hortimart, Kedai Puantipa, dan Kios Puan Berseri yang dikelola oleh TPID Provinsi Riau dan TPID Kota Pekanbaru. Selain itu, BUMD Pangan Riau juga telah mengoperasikan 3 kios pengendali inflasi di pasar pantauan Kota Pekanbaru, serta 1 kios pengendali inflasi di Kota Dumai.
- Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah oleh OPD, instansi vertikal, dan pelaku usaha, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau sebagai anggota TPID turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah, Makin Murah dengan QRIS. Selain itu, kolaborasi pasar murah turut melibatkan perusahaan, pelaku usaha, dan komunitas daerah untuk berpartisipasi melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).





- Penguatan implementasi program inovatif yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, yaitu Mobil Pak Aman (Mobil Pangan Keliling Andalan, Murah, dan Amanah) atau dikenal juga dengan Mobil Pak Awan (Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan) yang rutin melaksanakan pasar murah ke titik rawan pangan di Kota Pekanbaru.
 - Pelaksanaan Pasar Tani dengan skema melibatkan petani untuk berjualan langsung di pasar, sehingga petani dapat menjual dengan harga di atas harga jual ke distributor atau pengepul, namun tetap lebih rendah dibandingkan harga pasar. Skema ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani di tengah deflasi komoditas hortikultura.
 - Pada tahun 2025, TPID Provinsi Riau telah mencanangkan 127 titik pasar murah.
- (alsintan) kepada kelompok tani yang potensial di Riau. Kegiatan ini disertai dengan pelatihan *best practice* budidaya bersama petani.
- Optimalisasi pemanfaatan program bantuan mobilisasi pangan yang disediakan oleh BAPANAS untuk mendukung GPM tahun dan Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Bank Indonesia.
 - Panen cabai merah di Kabupaten Kampar dan Beras di Rokan Hilir pada Februari 2025.
 - Peluncuran Toko Pengendalian Inflasi (TOPAN) sebagai swalayan pertama di Pulau Sumatera yang menyediakan pasokan *volatile food* dengan harga murah sebagai hasil kerjasama antara TPID Provinsi Riau dan PT. Riau Pangan Bertuah (PT. RPB) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pangan Provinsi Riau.
 - Pelaksanaan Festival FESPA UNIK (Festival Kampung Pangan Unggul dan Kreatif) yang menjadi inovasi program kerja TPID sekaligus sebagai bentuk kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dengan KPwBI Prov. Riau di dalam mendukung diversifikasi pangan yang bermuara pada pengendalian inflasi pangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan tertentu yang menyumbang inflasi, antara lain beras dan cabai segar yang dapat diganti dengan komoditas lain seperti sagu, singkong, dan komoditas turunan/olahan lainnya.

b. Ketersediaan Pasokan

Sebagai daerah yang defisit neraca pangan, pengendalian inflasi di Provinsi Riau cukup bergantung pada pasokan dari daerah penghasil, sehingga TPID Riau berkomitmen terus melakukan langkah sebagai berikut:

- Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang bersifat B2B antara BUMD Pangan Provinsi Riau (PT Riau Pangan Bertuah), PT Sarana Pangan Madani (PT SPM), dan Koperasi Propas Syariah dengan produsen beras, telur ayam ras, champion cabai merah, dan champion bawang merah di Provinsi Sumatera Barat.
- TPID se-Provinsi Riau bersama Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung peningkatan produktivitas pertanian Riau, terutama beras dan aneka cabai melalui penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) serta alat dan mesin pertanian

c. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjamin kelancaran distribusi pasokan, TPID di Provinsi Riau berupaya memberikan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi biaya distribusi, serta terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran jalur distribusi, terutama akses ke daerah rawan pangan, kepulauan, dan setiap momen *peak season*.





- TPID Kab. Kuantan Singingi berhasil mengembangkan <https://padi.kuansing.go.id/>, serta TPID Provinsi Riau memiliki WARUNG SEGAR yang merupakan pasar digital sederhana yang dapat menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen pangan secara digital.
- TPID se-Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan terus menjamin kelancaran distribusi pangan dan efisiensi rantai pasok, salah satunya melalui kebijakan di pelabuhan penyeberangan Riau untuk memprioritaskan kendaraan yang membawa komoditas pangan.
- TPID Riau telah menjalin KAD B2B dengan Provinsi Sumatera Barat melalui penandatanganan 12 MoU KAD. KAD ini juga telah ditindaklanjuti dengan transaksi sekitar 15.000 butir telur, 1.800 kg beras, dan 500 kg bawang merah untuk disalurkan langsung ke pasar murah selama Ramadan, dengan dukungan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) oleh Bank Indonesia.
- PT. RPB (BUMD Pangan Provinsi Riau) telah melaksanakan 2 MoU KAD untuk komoditas beras Sokan dan Anak Daro bersama dengan Huller Neraca dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat guna memastikan kelancaran distribusi dan pasokan ke Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN).

d. Komunikasi Efektif

Untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi TPID, serta menjalin komunikasi yang efektif baik internal TPID maupun dengan masyarakat, TPID Riau telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Komunikasi Efektif dan *Moral Suasion* dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga, kesediaan stok pangan, antisipasi spekulasi harga, serta himbauan berlanja bijak kepada masyarakat.
- Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi rutin setiap minggunya bersama TPIP.
- HLM TPID se-Provinsi Riau dalam rangka HBKN Ramadan dan Idulfitri pada 11 Maret 2025.
- HLM TPID Bengkalis dalam rangka HBKN Idul Adha pada 28 Mei 2025.
- HLM TPID dan TP2DD se-Provinsi Riau tanggal 29 Agustus 2025.
- Edukasi belanja bijak melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui TV Lokal dan melibatkan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat selama Ramadan.

Ke depan, koordinasi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka TPIP, TPID, dan program GNPIP menjadi kunci yang akan terus dioptimalkan sehingga inflasi Riau keseluruhan tahun 2025 tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau.





BOKS 2

Penerapan Digital Farming di Riau Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Komoditas Pangan

Salah satu tantangan terbesar pengendalian inflasi di Riau berasal dari kelompok pangan bergejolak (*volatile foods*). Data inflasi daerah menunjukkan bahwa komoditas pangan seperti beras, cabai merah, dan bawang merah sering menjadi penyumbang utama angka inflasi. Dalam kerangka kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia, langkah aplikatif tidak hanya dilakukan dari sisi permintaan (*demand side*), tetapi juga melalui intervensi di sisi pasokan (*supply side*). Atas dasar itu, Bank Indonesia sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi melakukan pengembangan klaster komoditas pangan dengan tujuan memperkuat ketersediaan, meningkatkan produktivitas, serta menekan potensi gejolak harga di tingkat konsumen.

Hingga saat ini, terdapat beberapa klaster pangan binaan Bank Indonesia di Provinsi Riau yang fokus pada komoditas pangan strategis, terutama padi. Melalui program ini, Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga fasilitasi sarana produksi, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas petani. Upaya ini selaras dengan misi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat regional.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, sektor pertanian dihadapkan pada tuntutan modernisasi agar mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. *Digital farming* hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan dunia pertanian seperti keterbatasan akses informasi cuaca, penggunaan pupuk yang belum efisien, dan ketidakpastian hasil panen. Dengan dukungan teknologi berbasis data, petani dapat mengoptimalkan proses budidaya, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya dapat berkontribusi secara nyata untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Gapoktan Mukti Jaya menjadi salah satu contoh sukses penerapan *digital farming* di Riau. Sejak difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui penyaluran sarpras *digital farming* berupa *Rapid Soil Check* untuk mengetahui kesuburan tanah secara cepat, serta alat pemantau cuaca berbasis digital, **dampaknya terlihat nyata seperti produktivitas padi meningkat signifikan dibanding sebelum penerapan teknologi yaitu sebesar $\pm 41,67\%$ atau dari 6 ton/ha menjadi 8,5 ton/ha.** Tidak hanya kuantitas hasil panen yang bertambah, efisiensi biaya produksi juga semakin baik, sehingga kesejahteraan petani pun ikut meningkat. Keberhasilan Mukti Jaya membuktikan bahwa adopsi teknologi digital benar-benar dapat mengubah wajah pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih adaptif.



Melihat keberhasilan Gapoktan Mukti Jaya, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah mendorong replikasi *digital farming* pada sejumlah kelompok tani lainnya. Gapoktan Tri Mukti Jaya di Kabupaten Rokan Hilir, misalnya, mulai mengadopsi teknologi ini pada tahun 2025. Selain itu, di Bunga Raya Kabupaten Siak, program serupa juga sedang diujicobakan untuk memperluas jangkauan *digital farming* di Riau. Harapannya, transformasi pertanian berbasis teknologi ini mampu memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung stabilitas inflasi di Riau secara berkelanjutan.



Gambar 1. Penggunaan alat *Rapid Soil Check*



Gambar 2. Penggunaan *Climate Station*



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 4 Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Kinerja intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit kepada sektor korporasi, rumah tangga, maupun UMKM di Provinsi Riau masih terjaga positif. Likuiditas perbankan terpantau turut berkontribusi mendorong kredit/pembiayaan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan di daerah. Terlebih lagi, kualitas kredit juga terpantau masih tetap terjaga dalam taraf risiko yang terkendali.

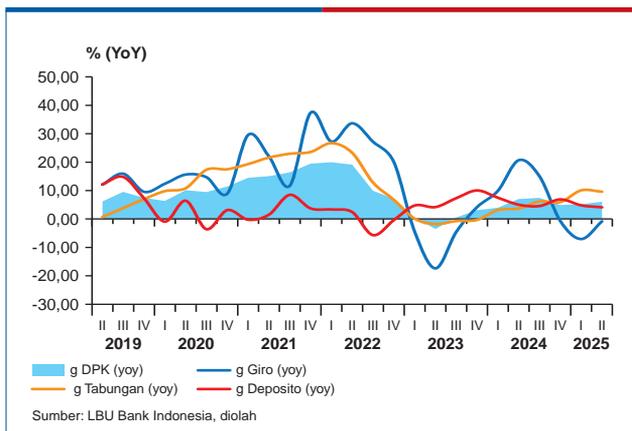


1. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN RIAU

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau masih kuat, mendukung pertumbuhan perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan II 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya.

Penyaluran kredit perbankan yang berlokasi di Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp167,88 triliun, atau tumbuh 8,66% (yoy) lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,75% (yoy). Penyaluran kredit dengan lokasi proyek pada triwulan II 2025 dikontribusikan terutama oleh kredit produktif terutama Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit investasi yang mencatatkan perbaikan pertumbuhan, sementara pertumbuhan kredit konsumsi (KK) terpantau sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2025.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh Bank Indonesia untuk mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, preferensi risiko atau *risk appetite* perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang masih terjaga baik turut mendorong peningkatan penyaluran kredit terutama di wilayah Provinsi Riau.



Grafik 4.1. Perkembangan Indikator Perbankan Riau

Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan *Loan to Deposit Ratio* perbankan Riau pada triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 79,46%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 80,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan tercatat tumbuh lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja DPK pada triwulan II 2025 tumbuh 6,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,22% (yoy). Kondisi ini ditengarai terjadi karena perilaku *wait and see* masyarakat dan korporasi pada triwulan laporan menyebabkan peningkatan penghimpunan DPK tersebut.

Di tengah sedikit melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2025, penyaluran pembiayaan di provinsi ini tetap mengalami pertumbuhan. Tumbuhnya penyaluran pembiayaan di Riau terlihat dari realisasi kredit yang tumbuh 8,66% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,75% (yoy). Lebih lanjut, berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan lebih tinggi tercatat pada jenis penggunaan investasi dan modal kerja, masing-masing 7,45% (yoy) dan 9,60% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan kinerja korporasi yang mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, tercermin dari indikator *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Bank Indonesia yang berada di zona ekspansi yaitu 50,89. Di sisi lain, pembiayaan untuk penggunaan konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 9,03% (yoy) dari 10,04% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perlambatan konsumsi masyarakat Riau pada triwulan II 2025.

Berbeda dengan perkembangan pada sektor korporasi, kinerja intermediasi perbankan pada sektor rumah tangga terpantau tumbuh melambat pada triwulan II 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perilaku *wait and see* masyarakat yang disebabkan ketidakpastian ekonomi di awal





tahun. Berdasarkan penggunaannya, perlambatan pada kredit sektor rumah tangga terutama dipengaruhi oleh kredit rumah tangga untuk kelompok kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan multiguna.

1.1. Pembiayaan Korporasi

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat masih tumbuh positif. Penyaluran kredit di Provinsi Riau pada triwulan laporan secara nominal tercatat mencapai Rp167,88 triliun atau tumbuh 8,66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp158,66 triliun atau mampu tumbuh 4,75% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, kinerja penyaluran kredit ditopang oleh laju pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja. Di sisi lain, kredit konsumsi terpantau tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Percepatan kinerja kredit korporasi tersebut terindikasi dari peningkatan kinerja kredit produktif, yakni kredit investasi dan modal kerja. Pada triwulan II 2025, kinerja kredit produktif tercatat tumbuh positif 8,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kredit modal kerja dan investasi sama-sama berperan besar dalam percepatan pertumbuhan tersebut. Tercatat kredit modal kerja dan investasi masing-masing terealisasi sebesar Rp60,76 triliun dan Rp60,66 triliun, atau masing-masing tumbuh sebesar 9,60%

(yoy) dan 7,45% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari triwulan I 2025 yang sebesar Rp57,01 triliun dan Rp55,74 triliun, atau tumbuh 7,44% (yoy) dan berkontraksi 1,65% (yoy).

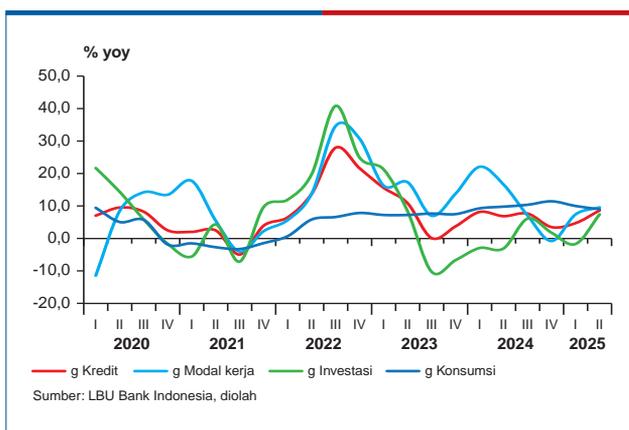
Berdasarkan pangsa penyalurannya, kredit korporasi terbesar di Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor industri pengolahan (21,92%); sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (20,56%); sektor pertambangan (10,51%); dan sektor perdagangan dan akomodasi (10,29%). Dari keempat sektor utama tersebut, percepatan kredit pada triwulan II 2025 disebabkan oleh percepatan pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, sektor perdagangan mengalami perlambatan pertumbuhan dan sektor perindustrian mengalami kontraksi.

Penyaluran kredit pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 secara nominal tercatat sebesar Rp34,51 triliun atau tumbuh 7,44% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp34,07 triliun. Pertumbuhan terutama terjadi pada subsektor Perkebunan kelapa sawit (pangsa 92,05% terhadap kredit pertanian, kehutanan, dan perikanan) yang tercatat tumbuh lebih tinggi, yaitu dari 1,47% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 8,02% (yoy) pada triwulan laporan.

Di sisi lain, kinerja kredit pada sektor industri pengolahan tercatat melemah dari kontraksi 0,84% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi kontraksi 5,29% (yoy) pada triwulan II 2025. Kendati demikian, *outstanding* kredit sektor ini terpantau mengalami peningkatan dari sebesar Rp34,73 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp36,80 triliun pada triwulan II 2025.

Selain itu, kinerja kredit perdagangan juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perdagangan pada triwulan II 2025 dilaporkan sebesar Rp17,28 triliun atau tumbuh 7,75% (yoy), lebih lambat dari triwulan lalu yang tumbuh 11,11% (yoy).

Risiko kredit korporasi tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari kualitas penyaluran kredit kepada



Grafik 4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Tabel 4.1. Kredit Lokasi Proyek Menurut Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Rp Miliar	2023				2024				2025		Pangsa Tw II 2025	% YoY Tw II 2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		
Pertanian	31,97	34,15	31,97	32,92	33,11	32,12	32,21	32,73	33,30	34,50	20,56	7,42
Pertambangan	12,21	11,12	10,87	11,00	11,23	9,96	6,69	8,70	11,95	17,65	10,52	77,16
Perindustrian	22,30	24,38	26,22	33,53	35,18	38,85	34,37	34,73	34,89	36,79	21,92	-5,31
Listrik, gas dan air	0,98	0,83	0,73	0,64	0,49	0,43	0,35	0,30	0,23	0,16	0,10	-62,37
Konstruksi	11,08	11,36	4,03	4,00	3,94	4,23	4,29	4,58	4,32	4,44	2,65	5,02
Perdagangan, restoran dan hotel	15,00	14,95	15,30	15,64	15,63	16,03	17,21	15,71	17,37	17,27	10,29	7,71
Pengangkutan, pergudangan	2,68	2,81	3,10	3,28	3,57	3,70	3,09	3,49	3,89	3,59	2,14	-2,89
Jasa	5,61	6,15	6,19	6,95	6,58	6,57	6,71	6,61	6,79	6,97	4,15	6,05
Rumah Tangga dan Lainnya	38,17	38,79	39,69	40,45	41,73	42,61	43,82	45,10	45,91	46,45	27,68	9,02
Total	140,00	144,54	138,12	148,41	151,47	154,50	148,75	151,95	158,66	167,82	100,00	8,62

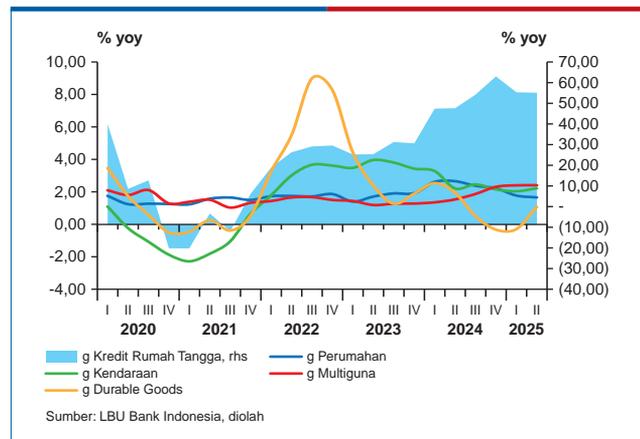
Sumber: Bank Indonesia, diolah

korporasi, terutama pada sektor-sektor utama selama triwulan II 2025 yang tetap terjaga dalam level yang rendah. Hal ini terlihat pada rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit pada sektor pertanian (1,77%), perindustrian (0,26%), dan perdagangan (3,11%) yang masih dalam batas aman yang ditetapkan sebesar yaitu 5%.

1.2. Pembiayaan Rumah Tangga

Perkembangan kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) sedikit melambat pada triwulan II 2025. Kinerja penyaluran kredit RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh 8,13% (yoy), sedikit melambat dari 8,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja penyaluran kredit RT terutama bersumber dari perlambatan kredit perumahan dan masih sedikit berkontraksinya kredit *durable goods*. Di sisi lain, kredit multiguna dan KKB mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga menahan penurunan yang lebih dalam. Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, kredit RT di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 masih didominasi oleh Kredit Multiguna (53,81%) dan Kredit Pemilikan Rumah/KPR (34,28%).

Penyaluran Kredit Multiguna pada triwulan II 2025 tercatat mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit multiguna yang tumbuh 10,47% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2025

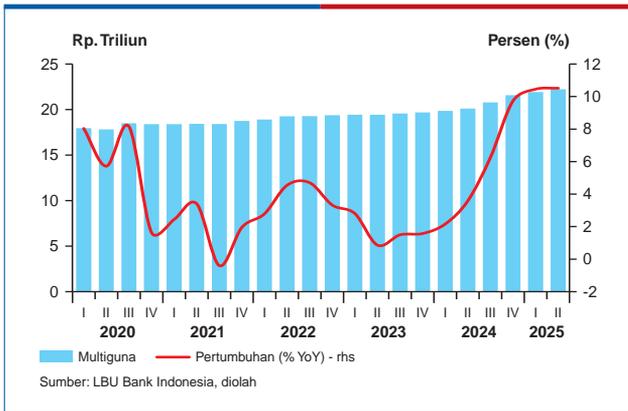


Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit RT

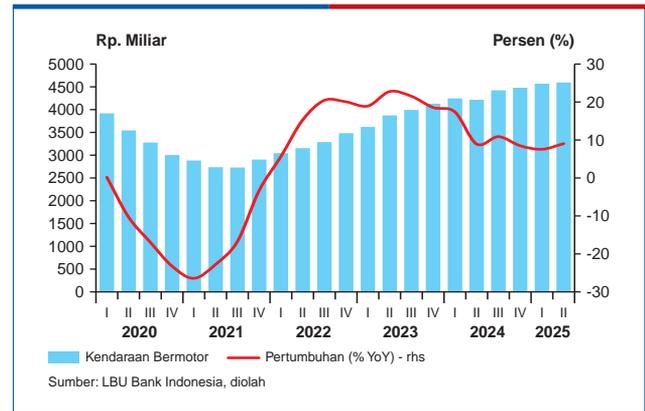
yang tumbuh 10,43% (yoy). Secara *outstanding* Kredit Multiguna juga tercatat mengalami peningkatan dari Rp21,88 triliun menjadi Rp22,18 triliun.

Selain itu, kinerja penyaluran Kredit KKB dan *durable goods* juga mengalami perbaikan pertumbuhan masing-masing dari 7,53% (yoy) dan -10,80% (yoy) menjadi 9,01% (yoy) dan -0,03% (yoy). Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan Kredit Perumahan terjadi dari 5,47% (yoy) menjadi 4,57% (yoy) pada triwulan laporan.

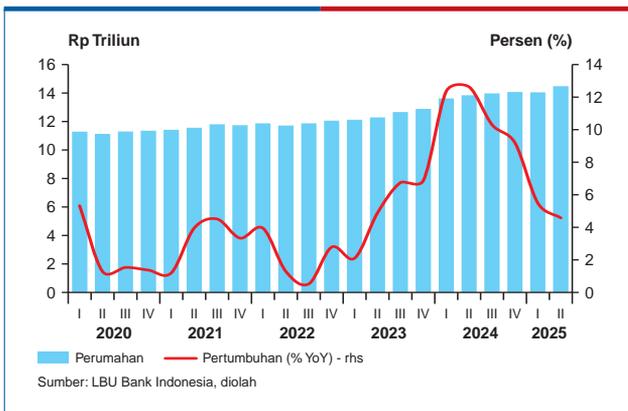
Lebih lanjut, perlambatan pertumbuhan kinerja Kredit Perumahan terjadi utamanya pada kelompok rumah tipe s.d. 70, rumah sederhana, dan rumah



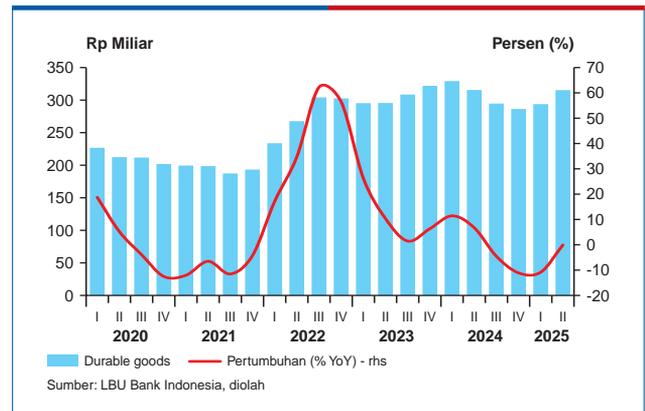
Grafik 4.4. Kredit Multiguna



Grafik 4.6. Kredit Kendaraan Bermotor



Grafik 4.5. Kredit Perumahan



Grafik 4.7. Kredit Durable Goods

mewah di atas tipe 70. Perumahan tipe 21 dan tipe 22 s.d. 70 pada triwulan laporan masing-masing tercatat tumbuh 9,56% (yoy) dan 4,44% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yaitu 152,3% (yoy) dan 10,69% (yoy). Sementara itu rumah sederhana dan rumah mewah di atas tipe 70 juga tercatat tumbuh 23,57% (yoy) dan 3,80% (yoy), melambat daripada triwulan sebelumnya yaitu 29,65% (yoy) dan 38,58% (yoy).

Berbanding terbalik dengan kredit perumahan, kinerja penyaluran KKB tercatat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kredit kendaraan bermotor pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 9,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,53% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan KKB tersebut ditopang oleh tumbuhnya kredit sepeda motor dari

yang sebelumnya terkontraksi 18,10% (yoy) menjadi tumbuh positif 1,20% (yoy). Namun demikian, kenaikan tersebut tertahan oleh melambatnya pertumbuhan kredit kendaraan roda empat dan kendaraan lainnya yaitu dari 11,57% (yoy) dan 547,94% (yoy) menjadi 10,68% (yoy) dan 199,21% (yoy).

Lebih lanjut, kinerja penyaluran kredit *durable goods* tercatat mengalami perbaikan dari semula mengalami kontraksi 10,80% (yoy) menjadi kontraksi 0,03% (yoy). Berdasarkan nominalnya, penyaluran kredit kepemilikan *durable goods* meningkat dari sebelumnya Rp294,10 miliar menjadi Rp315,84 miliar. Perbaikan tersebut utamanya disebabkan oleh alokasi kredit RT pemilik alat lainnya (pangsa 82,97%) yang tumbuh 6,09% (yoy), jauh meningkat dari sebelumnya yang terkontraksi 4,55% (yoy).

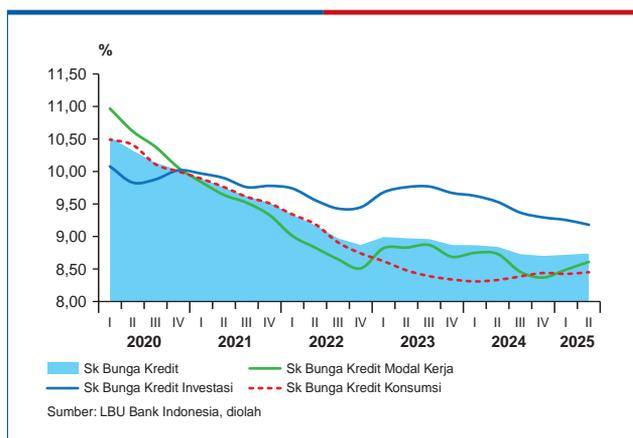




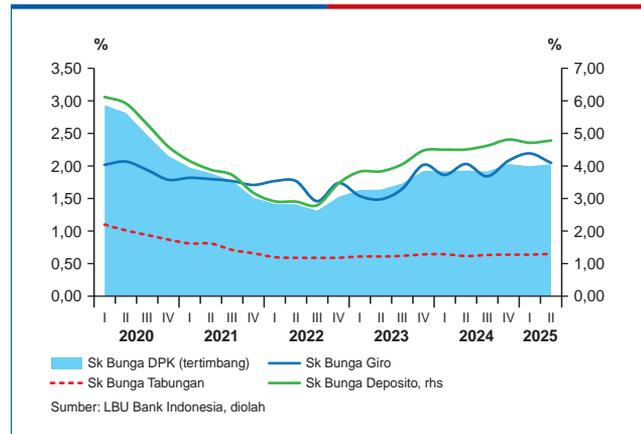
1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan kembali BI Rate menjadi 5,00%, kebijakan ini melanjutkan tren penurunan suku bunga yang telah dilakukan sejak awal 2025. Hal ini sejalan dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2025 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, penurunan BI Rate memiliki efek domino terhadap penurunan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan perbankan tetapi memerlukan jeda waktu (*lagging*) transmisi dampak.

Tren penurunan suku bunga kredit di Riau sebenarnya telah terlihat sejak beberapa triwulan sebelumnya. Namun demikian, pada triwulan II 2025, suku bunga kredit di Riau justru tercatat sedikit meningkat (2 basis poin) menjadi 8,74% dari triwulan sebelumnya yaitu 8,72%. Kenaikan ini terdorong oleh kenaikan suku bunga kredit konsumsi (pangsa kredit 38,24%) yaitu dari 8,42% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 8,45% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini ditengarai disebabkan oleh meningkatnya risiko (NPL) pada jenis kredit tersebut pada triwulan laporan yaitu 2,31% dari 2,16% pada triwulan I 2025. Di sisi lain, meningkatnya suku bunga kredit tertahan oleh turunnya suku bunga kredit investasi dari 9,25% pada triwulan I 2025 menjadi 9,18%. Penyebab terjadi hal



Grafik 4.3. Suku Bunga Kredit Perbankan Riau



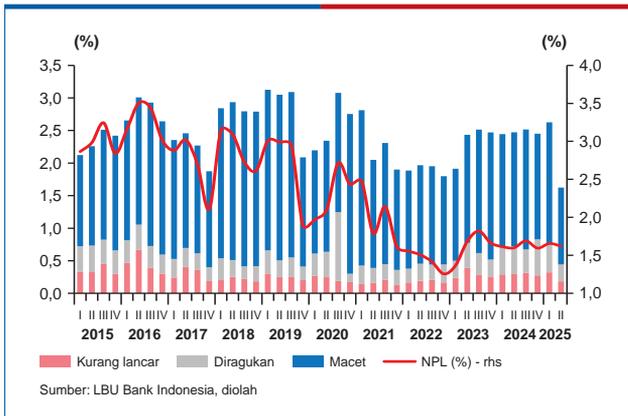
Grafik 4.9. Suku Bunga DPK Perbankan Riau

ini diduga disebabkan karena membaiknya risiko kredit investasi yang tercermin dari tingkat NPL yaitu dari 1,12% menjadi 1,08% pada triwulan II 2025.

Di sisi penghimpunan DPK, rata-rata tertimbang suku bunga simpanan di perbankan di Provinsi Riau tercatat sebesar 2,03%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,00%. Kenaikan suku bunga simpanan terutama terjadi pada deposito dan tabungan, sementara suku bunga giro tercatat menurun. Suku bunga simpanan dalam bentuk deposito tercatat sebesar 4,79% pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari triwulan lalu yaitu 4,72%. Sementara itu, tingkat suku bunga tabungan tercatat sedikit meningkat dari 0,64% menjadi 0,65%. Di sisi lain, tingkat suku bunga simpanan dalam bentuk giro tercatat turun dari 2,19% menjadi 2,05%.

1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bank Umum

Kualitas kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2025 tetap terjaga. Hal ini terindikasi dari capaian *Non Performing Loan* (NPL), sebagai indikator kualitas kredit yang disalurkan perbankan, pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 1,62%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,66%. Rasio kredit bermasalah tersebut masih jauh berada di bawah *threshold* yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%.



Grafik 4.10. Perkembangan NPL Kredit

Lebih lanjut, penurunan jumlah kredit bermasalah juga terjadi pada seluruh kategori mulai dari "Kurang Lancar", "Diragukan", hingga "Macet".

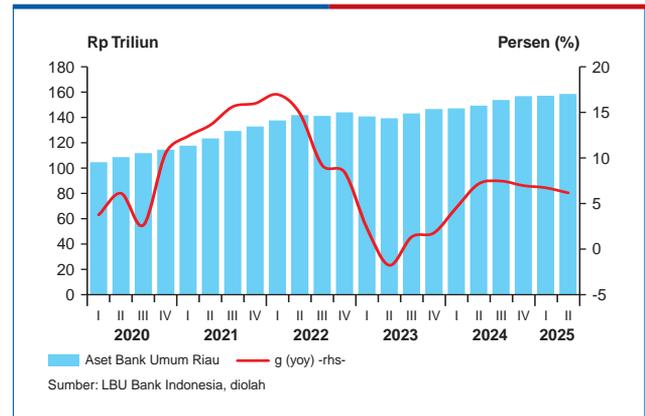
2. TOTAL ASET DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

2.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset perbankan di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh 6,18% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,74% (yoy). Dilihat dari nilainya, total aset bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp158,68 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat Rp157,29 triliun.

Berdasarkan kelompok kepemilikan Bank, meningkatnya nilai aset perbankan di Provinsi Riau terjadi pada seluruh jenis bank baik BUMN/D maupun swasta. Nilai aset perbankan BUMN/D (pangsa 69,8%) pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp110,77 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp110,52 triliun. Sementara itu, nilai aset bank swasta (pangsa 30,2%) tercatat sebesar Rp47,92 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp46,77 triliun.

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, peningkatan nilai aset terjadi pada kegiatan bank konvensional dan syariah. Nilai aset bank konvensional (pangsa 72,8%) pada triwulan II 2025 terpantau sebesar Rp115,52 triliun, naik dari triwulan sebelumnya



Grafik 4.11. Perkembangan Aset Perbankan Riau

sebesar Rp114,67. Sementara itu, nilai aset bank syariah (pangsa 27,2%) terpantau sebesar Rp43,16 triliun, naik dari triwulan sebelumnya sebesar Rp42,62 triliun.

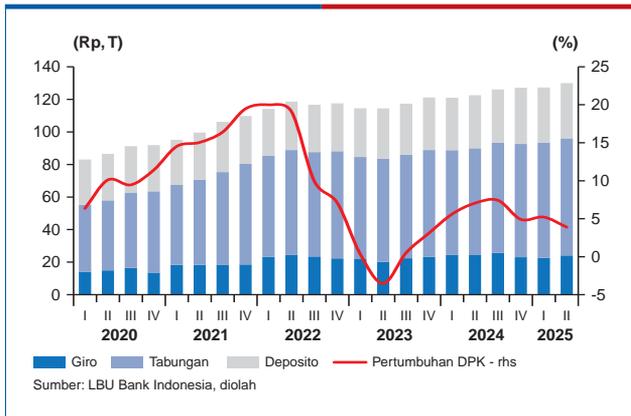
2.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan DPK perbankan di Provinsi Riau tercatat mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah DPK perbankan di Riau pada triwulan II 2025 secara nominal tercatat sebesar Rp129,96 triliun, tumbuh 6,07% (yoy) dibandingkan dengan posisi triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp127,30 triliun atau tumbuh 5,22% (yoy).

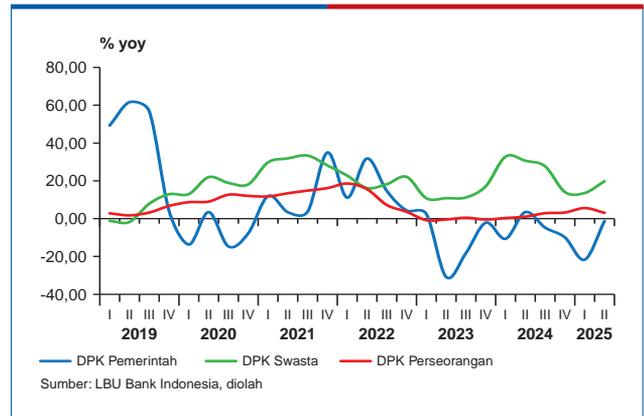
Berdasarkan kepemilikannya, DPK perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih didominasi oleh DPK perorangan (65,57%) dan swasta (26,89%). Sementara itu, DPK Pemerintah memiliki porsi sebesar 7,54%.

Berdasarkan golongan nasabah, percepatan pertumbuhan DPK di triwulan laporan bersumber dari pertumbuhan DPK swasta yang meningkat menjadi 19,79% (yoy) dari 13,58% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, percepatan tersebut tertahan oleh masih terkontraksinya pertumbuhan DPK pemerintah menjadi kontraksi 1,25% (yoy) dari 21,68% (yoy) serta melambatnya pertumbuhan DPK perorangan menjadi 3,10% (yoy) dari 5,59% (yoy).





Grafik 4.12. Perkembangan DPK Perbankan Riau

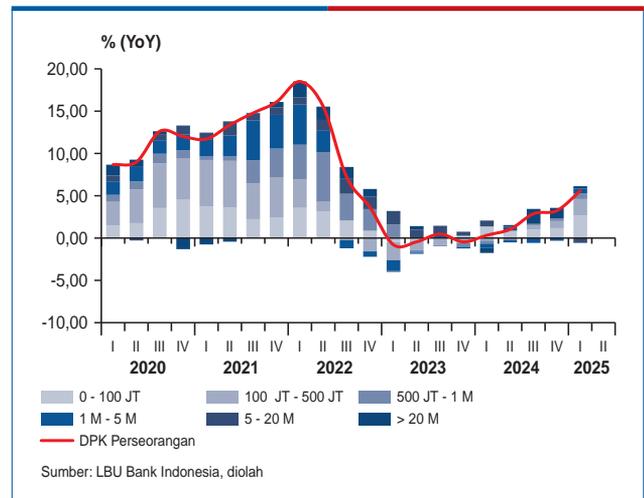


Grafik 4.13. DPK Berdasarkan Kepemilikan

Berdasarkan jenis simpanannya, DPK perbankan masih didominasi oleh tabungan dengan pangsa sebesar 55,20%, diikuti oleh deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 26,07% dan 18,73%. Pada triwulan II 2025 percepatan kinerja penghimpunan DPK terjadi karena perbaikan kontraksi pada jenis DPK giro serta masih tumbuhnya penghimpunan DPK jenis tabungan dan deposito.

DPK tabungan tumbuh positif sebesar 9,59% (yoy) sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yaitu 10,09% (yoy). Nominal DPK tabungan mengalami peningkatan dari Rp70,83 triliun menjadi Rp71,96 triliun. Sementara itu, DPK deposito secara nominal tercatat sebesar Rp33,85 triliun atau tumbuh 4,11% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy). Sementara itu, nilai DPK giro tercatat sebesar Rp24,15 triliun meningkat dari triwulan lalu sebesar Rp22,69 triliun. Kendati secara nominal meningkat, tetapi pertumbuhannya masih terkontraksi 0,83% (yoy), lebih dangkal dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,06% (yoy).

Lebih lanjut, berdasarkan nominal simpanan, pangsa DPK perorangan dengan nilai nominal di bawah Rp1 miliar memiliki pangsa terbesar mencapai 73,29%, diikuti dengan kelompok deposan dengan nominal di antara Rp1 miliar – Rp5 miliar, dan nominal di atas Rp5 miliar dengan masing-masing pangsa sebesar 17,19% dan 9,53%. Berdasarkan kelompok



Grafik 4.14. DPK Perorangan per Kelompok Nominal

nominalnya, peningkatan pertumbuhan DPK terutama terjadi pada kategori kelompok deposan dengan nominal simpanan antara Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar dengan simpanan mencapai Rp14,74 triliun, tumbuh lebih cepat dari triwulan sebelumnya yaitu dari 3,30% (yoy) menjadi 3,39% (yoy). Selanjutnya, kelompok deposan dengan nilai s.d. Rp1 miliar, nilai simpanannya juga terpantau tumbuh walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok deposan dengan nilai simpanan di atas Rp5 miliar, nilainya tercatat mengalami kontraksi dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2024.



3. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN SECARA SPASIAL

PENYALURAN KREDIT SPASIAL

Secara spasial, pangsa kredit terbesar terdapat di Kota Pekanbaru, diikuti Kota Dumai dan Kabupaten Kampar. Sejalan dengan percepatan penyaluran kredit Provinsi Riau di triwulan II 2025, pertumbuhan kredit pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tercatat lebih tinggi, kecuali di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kep. Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Kota Pekanbaru yang memiliki pangsa kredit terbesar di Riau (28,41%) mengalami pertumbuhan negatif 1,26% (yoy). Sementara itu, Kota Dumai yang memiliki pangsa kredit terbesar kedua di Riau (15,35%) tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dari 23,72% (yoy) menjadi 20,53% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, Kabupaten Kampar yang memiliki pangsa penyaluran kredit ketiga terbesar di Riau (11,34%) mencatatkan akselerasi pertumbuhan kredit dari 6,22% (yoy) menjadi 43,48% (yoy).

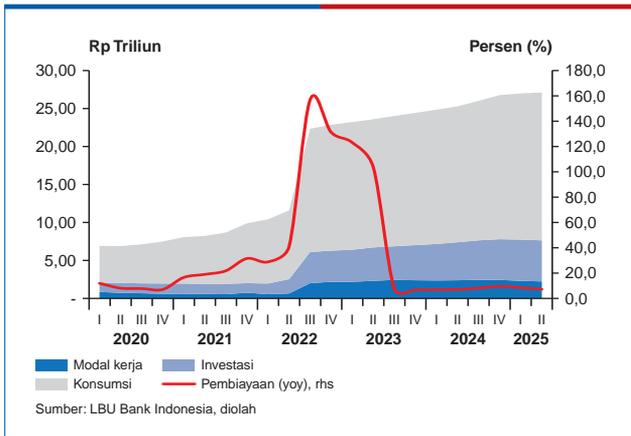
4. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Kinerja penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada triwulan II 2025 terpantau tumbuh melambat. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 7,30% (yoy), melambat dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,59% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada pembiayaan konsumsi, investasi, dan modal kerja. Pembiayaan konsumsi (pangsa 71,75%) pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh 8,80% (yoy), melambat dibandingkan triwulan lalu sebesar 8,81% (yoy). Sejalan dengan pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi (pangsa 20,00%) tercatat mengalami deselerasi pertumbuhan dari sebesar 12,84% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 8,45% (yoy) pada triwulan laporan. Pembiayaan modal kerja (pangsa 8,25%) mengalami terkontraksi yang lebih dalam dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,70% (yoy) menjadi 6,38% (yoy).

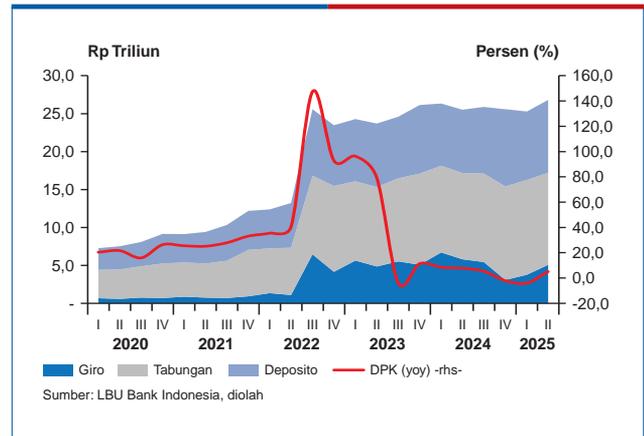
Tabel 4.2. Perkembangan Kredit di Riau Secara Spasial

No	Kab/Kota	Kredit Tw II 2025		g Tw I 2025 (yoy)	g Tw II 2025 (yoy)	Arah Pertumbuhan
		Rp (Miliar)	Pangsa (%)			
1	Kab. Kampar	19.036	11,34	6,22	43,48	↑
2	Kab. Bengkalis	7.909	4,71	7,59	12,42	↑
3	Kab. Indragiri Hulu	6.437	3,83	11,86	11,14	↓
4	Kab. Indragiri Hilir	9.419	5,61	1,93	1,51	↓
5	Kab. Rokan Hulu	16.932	10,09	6,04	28,32	↑
6	Kab. Rokan Hilir	7.563	4,51	-0,92	-0,32	↑
7	Kab. Pelalawan	9.447	5,63	-12,29	-16,83	↓
8	Kab. Siak	10.483	6,24	-15,93	-14,08	↑
9	KAb. Kuantan Singingi	4.695	2,80	7,44	8,12	↑
10	Kab. Kepulauan Meranti	2.491	1,48	235,83	227,42	↓
11	Kota Pekanbaru	47.693	28,41	2,28	-1,26	↓
12	Kota Dumai	25.770	15,35	23,72	20,53	↓
	Provinsi Riau	167.876	100,00	4,75	8,66	↑

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.15. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan

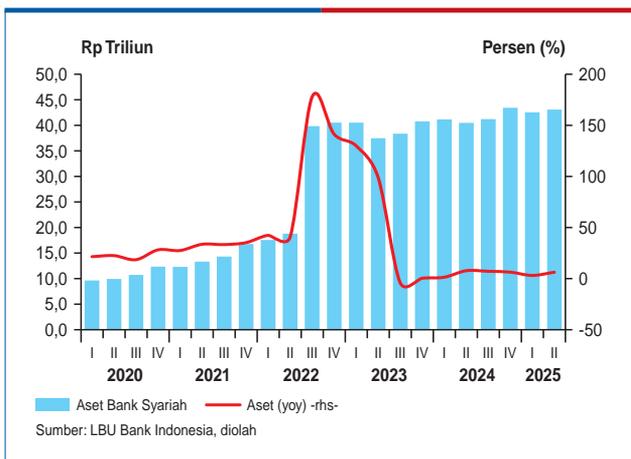


Grafik 4.17. Perkembangan DPK Perbankan Syariah

Dari sisi kualitas pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah Riau tercatat sebesar 2,38%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 2,24%. Adapun likuiditas perbankan syariah Riau yang tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tepantau lebih ketat pada triwulan II 2025 yaitu sebesar 101,18%, menurun dari triwulan I 2025 sebesar 106,90%. Rasio FDR yang mencapai lebih dari 100% mengindikasikan bahwa perbankan syariah di Provinsi Riau juga mengandalkan sumber dana selain DPK sebagai sumber permodalan dalam melaksanakan fungsi intermediasi kepada nasabahnya. Lain halnya dengan penyaluran pembiayaan, nilai aset dan penghimpunan DPK syariah pada triwulan II 2025 mencatatkan akselerasi. Laju pertumbuhan

aset perbankan syariah pada triwulan II 2025 sebesar 6,50% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Secara nominal, perkembangan aset tercatat meningkat dari Rp42,62 triliun menjadi Rp43,16 triliun. Lebih lanjut, kinerja DPK perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 5,07% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 4,06% (yoy). Secara nominal, DPK Syariah pada triwulan II 2025 mencapai Rp26,82 triliun, meningkat dari Rp25,26 triliun pada triwulan sebelumnya.

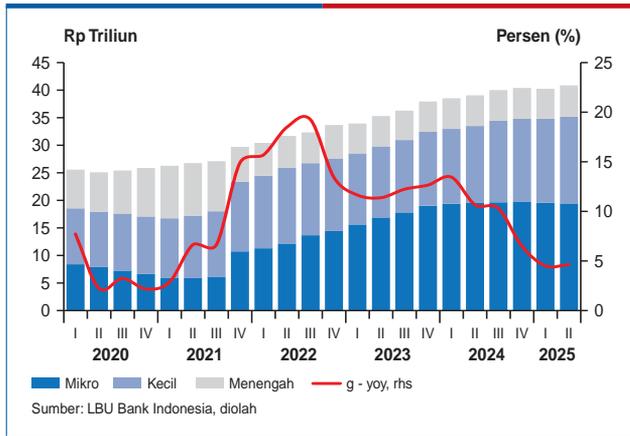
Berdasarkan jenis simpanannya, tabungan masih mendominasi struktur DPK perbankan Syariah dengan pangsa sebesar 45,29%, diikuti oleh deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 35,82% dan 18,89%.



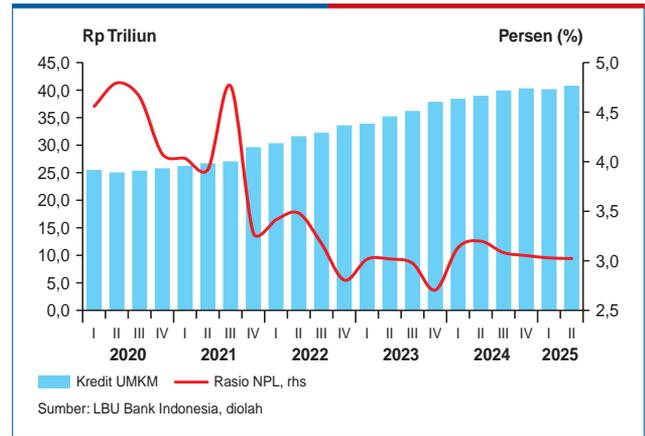
Grafik 4.16. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

5. PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Intermediasi UMKM tumbuh positif disertai dengan persepsi risiko yang terjaga pada level rendah. Penyaluran kredit UMKM terpantau tumbuh positif 4,63% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu 4,50% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, porsi kredit UMKM terhadap total kredit mencapai 39,58%, naik dari triwulan sebelumnya yang tercatat 39,34%. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit UMKM, jumlah rekening kredit



Grafik 4.18. Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM



Grafik 4.19. Perkembangan NPL Kredit UMKM

UMKM tercatat mengalami peningkatan. Jumlah rekening UMKM naik dari 436.204 rekening pada triwulan I 2025 menjadi 437.593 pada triwulan laporan. Secara nominal, *oustanding* pembiayaan UMKM mengalami peningkatan yaitu dari Rp40,24 triliun menjadi Rp40,87 triliun.

Kinerja positif penyaluran kredit UMKM juga didukung oleh implementasi kebijakan penyaluran kredit/ pembiayaan kepada UMKM berupa penetapan proporsi kredit terhadap total kredit yang disalurkan perbankan. Berdasarkan kategori debitur, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Riau didominasi oleh usaha mikro dengan pangsa 47,60%, diikuti oleh usaha kecil dan menengah dengan pangsa masing-masing sebesar 38,49% dan 13,92% terhadap total kredit UMKM.

Walaupun memiliki pangsa terbesar, tetapi penyaluran kredit UMKM pada kelompok usaha mikro di triwulan II 2025 tercatat terkontraksi 0,80% (yoy) dari yang sebelumnya tercatat tumbuh 0,96% (yoy). Sebaliknya, kredit UMKM pada kelompok usaha kecil terpantau tumbuh lebih cepat dari 12,54% (yoy) menjadi 13,23% (yoy) dan penyaluran kredit pada kelompok usaha menengah terpantau tumbuh positif 2,35% (yoy) setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 2,76% (yoy).

Berdasarkan sektor usahanya, meningkatnya penyaluran kredit UMKM terutama terjadi pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Penyaluran kredit UMKM pada sektor industri (pangsa 4,40%) tercatat tumbuh 5,10% (yoy) dari yang sebelumnya tercatat kontraksi 1,62% (yoy). Sementara itu, kinerja kredit UMKM pada sektor perdagangan (pangsa 29,55%) juga tercatat meningkat dari 0,84% (yoy) menjadi 2,92% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan kredit UMKM tertahan oleh perlambatan pertumbuhan kredit pertanian (pangsa 51,43%) yang tumbuh melambat dari 6,66% (yoy) menjadi 5,80% (yoy) serta sektor jasa (pangsa 8,25%) dari 2,97% (yoy) menjadi 1,41% (yoy).

Kualitas kredit UMKM pada triwulan II 2025 tetap terjaga dengan NPL berada pada level yang rendah dan di bawah ambang batas sebesar 5%. Kondisi ini merata terjadi pada UMKM Menengah, Kecil, dan Mikro. NPL kredit UMKM di Provinsi Riau pada triwulan laporan terpantau 3,02%, relatif stabil dari triwulan sebelumnya.





Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi *net-outflow* (lebih banyak uang keluar). Sementara itu, transaksi sistem pembayaran non-tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), kartu kredit, uang elektronik (UE), dan QRIS mencatatkan kinerja yang lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, transaksi sistem pembayaran menggunakan kartu debit masih lemah.



1. KONDISI UMUM

Pada triwulan II 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi *net-outflow* yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan *net-outflow* dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp860,37 miliar, lebih rendah dibandingkan *net-outflow* triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,34 triliun.

Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan II 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui SKNBI, BI-RTGS, kartu kredit, UE, dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi menggunakan kartu debit menunjukkan perlambatan. Lebih lanjut, nominal transaksi SKNBI di Provinsi Riau masih mengalami kontraksi sebesar 7,20% (yoy), namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,42% (yoy). Hal serupa juga terjadi pada volume transaksi melalui BI-RTGS yang terkontraksi 9,47% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,36% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi melalui APMK khususnya kartu kredit menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2025. Selain itu, kinerja nominal transaksi UE tercatat tumbuh 16,3% (yoy) atau senilai Rp2,02 triliun pada triwulan laporan. Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE yaitu senilai Rp1,46 triliun atau dengan pangsa sebesar 72,42%.

2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

2.1. Aliran Uang Masuk ke (*Inflow*) dan Keluar dari (*Outflow*) Bank Indonesia

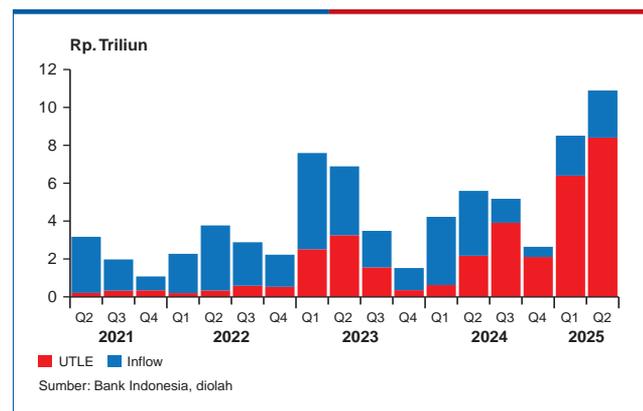
Aktivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) atau transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa indikator, di antaranya (1) jumlah *outflow*, (2) jumlah *inflow*, (3) kegiatan

pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE), dan (4) jumlah temuan uang palsu.

Pada triwulan II 2025, sistem pembayaran tunai di Provinsi Riau tercatat dalam posisi *net-outflow* sebesar Rp860,37 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,14 triliun. Berdasarkan kuartalan, nominal *outflow* pada triwulan II 2025 terkontraksi 36,24% (qtq) dari Rp5,24 triliun menjadi Rp3,34 triliun, sedangkan nominal *inflow* tumbuh sebesar 17,97% (qtq) dari Rp2,10 triliun menjadi Rp2,48 triliun. Tumbuhnya *inflow* pada triwulan II 2025 menjadi salah satu indikator telah berakhirnya periode HBKN Idulfitri sehingga masyarakat lebih banyak menyimpan uang kartalnya di bank.

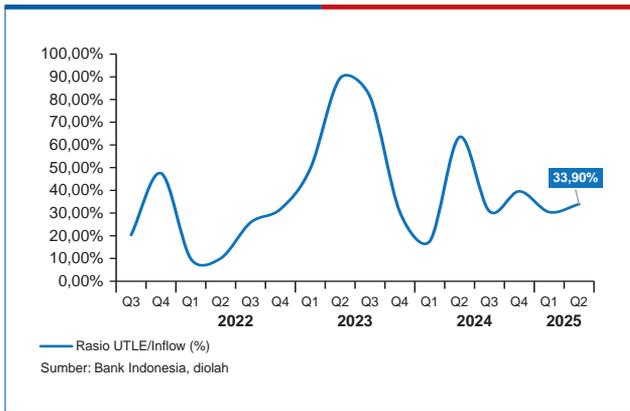
2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, serta tepat waktu dan layak edar (*fit for circulation*). Oleh sebab itu, Bank Indonesia Provinsi Riau secara berkala melakukan pelayanan penyediaan uang kartal kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perbankan). Pelayanan secara langsung dilakukan dalam bentuk penukaran UTLE melalui kas keliling yang diselenggarakan di dalam dan luar kota

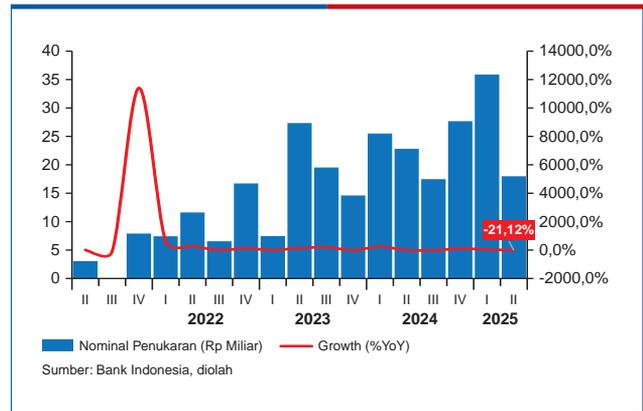


Grafik 5.1. Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan





Grafik 5.2. Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total Inflow



Grafik 5.3. Nominal Penukaran

Pekanbaru. Sementara itu, pelayanan penyediaan uang kartal secara tidak langsung dilakukan melalui penarikan uang oleh perbankan dan kas titipan di beberapa daerah di Provinsi Riau.

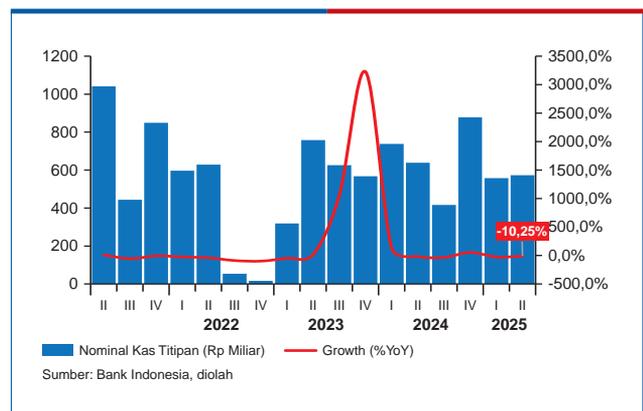
Selain itu, untuk menjamin terlaksananya *clean money policy*, pada triwulan II 2025, Bank Indonesia Provinsi Riau melakukan pemusnahan UTLE sebesar 33,90% dari *inflow*. Kegiatan pemusnahan UTLE tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat.

Guna memperkuat implementasi *clean money policy* dimaksud, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sebaran uang layak edar di seluruh wilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 44 (empat puluh empat) kantor bank umum untuk menerima pelayanan penukaran UTLE dari masyarakat. Sementara itu, untuk layanan yang bersifat langsung, Bank Indonesia secara konsisten melakukan kegiatan kas keliling.

Pada triwulan II 2025 Bank Indonesia Provinsi Riau tercatat telah melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali kas keliling ritel baik di dalam kota maupun di luar kota Pekanbaru. Selain itu, Bank Indonesia tetap mendorong pelaksanaan penukaran uang pecahan kecil di kantor-kantor cabang perbankan di Riau. Saat ini, pemesanan layanan penukaran dilakukan melalui aplikasi PINTAR. Berdasarkan

data dari aplikasi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Riau telah melaksanakan penukaran uang layak edar dengan nominal mencapai Rp17,99 miliar pada triwulan II 2025.

Sementara itu, kegiatan kas titipan di wilayah Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu untuk memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas ke seluruh wilayah Provinsi Riau tercatat mengalami peningkatan. Pada triwulan II 2025, volume kas titipan mencapai Rp573,8 miliar atau tumbuh 2,8% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan volume kas titipan triwulan II 2025 juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang kala itu tercatat mengalami kontraksi 10,25% (yoy).



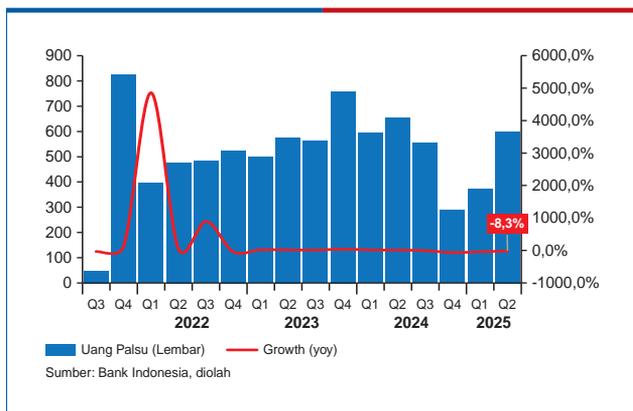
Grafik 5.4. Nominal Kas Titipan





2.3. Temuan Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya

Pada triwulan II 2025, temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, baik dari laporan perbankan maupun berdasarkan laporan masyarakat, tercatat sebanyak 600 lembar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan temuan pada triwulan I 2025 sebanyak 372 lembar. Bank Indonesia terus berupaya mengantisipasi penggunaan dan peredaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya di masyarakat dengan senantiasa melakukan berbagai langkah, di antaranya (1) memperluas keterjangkauan dan ketersediaan Uang Layak Edar di masyarakat, (2) meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang Rupiah, serta (3) optimalisasi transaksi non-tunai guna meminimalkan peluang pemalsuan uang.



Grafik 5.5. Perkembangan Temuan Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau

3. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI

Kinerja sistem pembayaran non-tunai di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 khususnya melalui SKNBI, BI-RTGS, kartu kredit, UE dan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, catatan transaksi menggunakan kartu debit masih terpantau lemah. Sementara itu, peningkatan mobilitas wisatawan yang keluar dari Provinsi Riau berimplikasi pada

pertumbuhan transaksi pembelian maupun penjualan valuta asing di Provinsi Riau.

3.1. Transaksi SKNBI

Volume transaksi non-tunai ritel di Riau yang diproses melalui SKNBI pada triwulan II 2025 mengalami kontraksi 5,38% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam yaitu 12,75% (yoy). Berdasarkan nominalnya, transaksi kliring terkontraksi 7,20% (yoy). Kontraksi ini juga lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -11,42% (yoy). Secara spasial, masih terkontraksinya transaksi menggunakan SKNBI didominasi oleh aktivitas transaksi di wilayah Kota Pekanbaru dengan pangsa 97,00%, dan sisanya berasal dari Kota Dumai.

Penurunan tersebut terjadi seiring perluasan implementasi BI-FAST sehingga menggeser preferensi masyarakat dalam bertransaksi ritel dari semula menggunakan SKNBI ke BI-FAST. Sebagai informasi, BI-FAST menyediakan biaya transaksi yang lebih murah dan *real time*. Pada triwulan II 2025, volume dan nominal transaksi melalui BI-FAST tercatat tumbuh masing-masing sebesar 32,83% (yoy) dan 28,5% (yoy). Selain itu, penurunan transaksi melalui SKNBI juga terindikasi dari meningkatnya penggunaan mekanisme pembayaran lainnya seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan UE.



Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Kliring (SKNBI) di Provinsi Riau





Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau

Rp Miliar	2022		2023				2024				2025	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Nilai Transaksi (Rp miliar)	47.067	55.295	43.230	41.640	45.389	62.802	35.830	40.733,29	43.460,15	51.740,79	43.606,73	41.318,21
Volume Transaksi (lembar)	22.079	24.184	20.073	17.991	21.201	21.776	17.936	18.042,00	20.412,00	21.038,00	15.360,00	16.334,00
Growth Nilai Transaksi (% yoy)	10,12	-18,24	-4,45	-26,98	-3,57	13,58	-17,12	-2,18	-4,25	-17,61	21,71	1,44
Growth Volume Transaksi (% yoy)	-6,59	-12,54	-14,35	-24,76	-3,98	-9,96	-10,65	0,28	-3,72	-3,39	-14,36	-9,47

Sumber: Bank Indonesia

3.2. Transaksi BI-RTGS

Pada triwulan II 2025, nominal transaksi melalui BI-RTGS mencatatkan pertumbuhan positif. Nominal transaksi melalui BI-RTGS tercatat senilai Rp43,61 triliun atau tumbuh 21,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang berkontraksi sebesar 17,61% (yoy). Namun demikian, volume transaksi melalui BI-RTGS tercatat berkontraksi 14,36% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2025 yang mencatatkan kontraksi sebesar 3,39% (yoy).

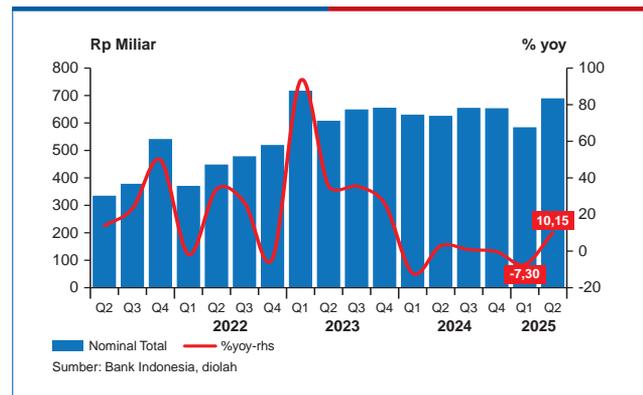
3.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Pada triwulan II 2025, volume maupun nominal transaksi menggunakan kartu kredit tumbuh positif. Volume transaksi menggunakan kartu kredit tercatat sebanyak 643,88 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 9,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,18% (yoy). Pertumbuhan juga terlihat pada nominal transaksi kartu kredit yang pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp690,28 miliar atau tumbuh positif sebesar 10,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,30% (yoy).

Berbanding terbalik dengan kartu kredit, volume transaksi kartu debit terpantau mengalami perlambatan. Volume transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan II 2025 tercatat sebanyak 33,31 juta transaksi atau berkontraksi 3,70% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,33% (yoy). Dari sisi nominal transaksi,



Grafik 5.7. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Riau

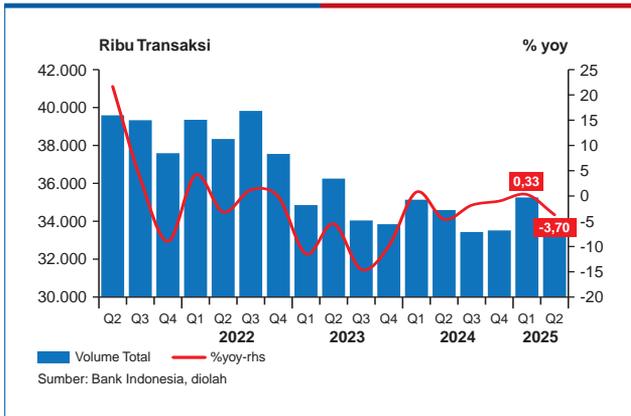


Grafik 5.8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Riau

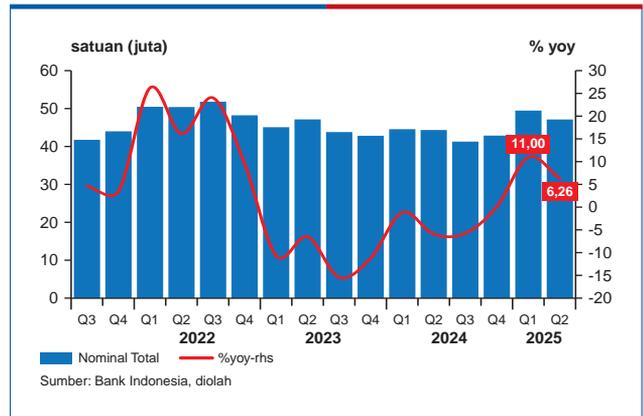
transaksi kartu debit pada triwulan II 2025 tercatat senilai Rp47,12 triliun atau tumbuh sebesar 6,26% (yoy).

Tersedianya berbagai instrumen pembayaran yang lebih beragam, seperti QRIS, turut mengubah preferensi masyarakat dalam bertransaksi sehingga menyebabkan fluktuasi dalam volume maupun nilai transaksi menggunakan kartu di Provinsi Riau.





Grafik 5.9. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debet di Riau



Grafik 5.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debet di Riau

3.4. Transaksi Uang Elektronik

Pada triwulan II 2025, transaksi menggunakan UE tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi UE yang digunakan untuk tujuan belanja tercatat tumbuh positif sebesar 14,51% (yoy) pada triwulan laporan. Lebih lanjut, nominal transaksi belanja masih mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE dengan nilai Rp1,46 triliun (pangsa 72,42%), diikuti oleh transaksi transfer dengan nominal Rp504,38 miliar (pangsa 24,96%), serta transaksi tarik tunai dengan nominal Rp52,86 miliar (pangsa 2,62%). Secara keseluruhan, nominal transaksi UE di Provinsi Riau pada triwulan II 2025

sebanyak Rp2,02 triliun atau tumbuh sebesar 16,26% (yoy). Sementara dari sisi volume, volume transaksi UE di Provinsi Riau pada triwulan II 2025 sebanyak 19,57 juta transaksi atau tumbuh sebesar 22,6% (yoy).

Tren peningkatan nilai transaksi UE ditengarai didorong oleh peningkatan preferensi konsumen menggunakan UE berbasis server, sejalan dengan semakin banyaknya penyedia layanan tersebut. Hal ini selaras dengan pertumbuhan jumlah pengguna UE di Provinsi Riau yang tumbuh 137,8% (yoy) pada triwulan II 2025 dengan jumlah total pengguna UE sebanyak 11,99 juta.



Grafik 5.11. Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau



Grafik 5.12. Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Riau



Tabel 5.2. Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau

Transaksi	2023		2024								2025			
	Tw IV		Tw I		Tw II		Tw III		Tw IV		Tw I		Tw II	
	Vol (RibU)	Nominal (Rp Miliar)	Volume (RibU)	Nominal (R. Miliar)										
Belanja	13.143.771	1.212.832	12.904.056	1.212.304	13.621.329	1.278.147	14.689.371	1.386.065	16.137.861	1.424.188	16.362.234	1.451.399	17.417.577	1.463.544
Transfer	1.936.577	405.067	2.034.986	418.975	2.201.599	417.645	2.053.669	434.676	2.037.968	452.213	2.043.143	495.830	2.012.681	504.379
Tarik Tunai	158.839	50.143	162.297	53.810	145.499	42.360	158.412	53.022	158.480	55.021	156.180	58.245	146.274	52.863
Total	15.239.187	1.668.042	15.101.339	1.685.089	15.968.427	1.738.152	16.901.452	1.873.763	18.334.309	1.931.422	18.561.557	2.005.475	19.576.532	2.020.786

Sumber: Bank Indonesia

3.5. Pengembangan Layanan Keuangan Non-tunai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui transformasi digital sistem pembayaran, Bank Indonesia turut berperan aktif memfasilitasi berbagai program elektronifikasi untuk meningkatkan implementasi transaksi non-tunai dan inklusi keuangan. Beberapa program yang telah dilakukan hingga triwulan II 2025, di antaranya (1) memfasilitasi elektronifikasi transaksi Pemda, (2) *monitoring* penyaluran bantuan sosial non-tunai, serta (3) mendukung pengembangan elektronifikasi transaksi ritel di sektor lainnya khususnya perluasan penerimaan QRIS di berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, penggunaan QRIS di Riau terus meningkat. Hingga Juni 2025, jumlah *merchant* QRIS di Riau meningkat 18,95% (yoy) dari semula 690,65 ribu *merchant* pada bulan Juni 2024 menjadi 821,53 ribu *merchant* pada Juni 2025. Tren peningkatan jumlah *merchant* tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk selalu berupaya mendorong elektronifikasi transaksi masyarakat.

Lebih lanjut, secara spasial mayoritas *merchant* QRIS di Riau masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru (pangsa 46,4%), Kota Dumai (pangsa 12,6%), dan Kabupaten Kampar (pangsa 7,5%).

Jumlah transaksi melalui kanal pembayaran QRIS meningkat seiring peningkatan jumlah pengguna/*user* QRIS. Jumlah pengguna QRIS di Provinsi



Grafik 5.13. Perkembangan Merchant QRIS di Riau

Riau hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 1,12 juta pengguna. Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti oleh peningkatan volume dan nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS. Pada triwulan II 2025 volume transaksi QRIS di Provinsi Riau tercatat sebesar 22,68 juta transaksi atau tumbuh 113,35% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, nominal transaksi juga tumbuh sebesar 89,26% (yoy) dari semula Rp1,33 triliun pada triwulan II 2024 menjadi Rp2,51 triliun pada triwulan II 2025. Berdasarkan perkembangan tersebut, diketahui bahwa rata-rata transaksi pengguna pada triwulan II 2025 yaitu sebesar Rp748,04 ribu, mengalami peningkatan nilai transaksi rata-rata per pengguna pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp656,86 ribu.





Dalam rangka mendorong transaksi digital, Bank Indonesia Provinsi Riau bersama *stakeholders* terkait telah melakukan berbagai program pada triwulan II 2025. **Pertama**, perluasan implementasi QRIS sebagai kanal transaksi digital, yang dilakukan melalui:

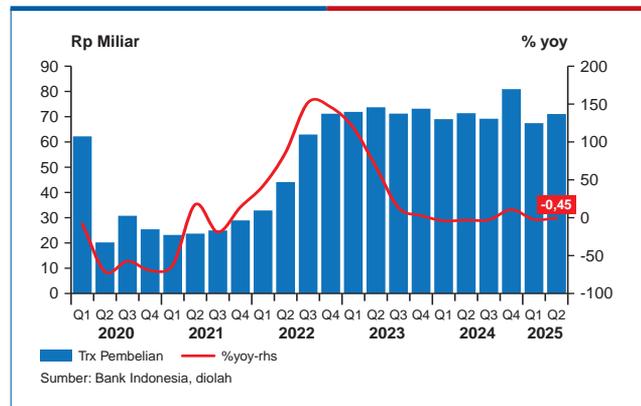
1. Sosialisasi dan *User Experience* QRIS Rp1,- kepada pelajar, mahasiswa, serta komunitas di Provinsi Riau.
2. Perluasan QRIS melalui kegiatan sosial keagamaan seperti *launching* Gerakan Sedekah dan Infaq Digital SERUMPUN (Sedekah Berkah untuk Masyarakat Riau, pakai QRIS Semakin Unggul).
3. Edukasi dan sosialisasi QRIS ke komunitas Wanita (PKK Kota Pekanbaru) dan edukasi kepada BUMDes melalui BPPMDDTT sebagai *merchant*.
4. Kegiatan TANJAK, yaitu pendekatan edukasi QRIS dalam sektor Pendidikan melalui pelaksanaan *Try Out* Akbar persiapan SNBT 2025 yang ditujukan kepada siswa SMA se-Provinsi Riau dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga dilakukan terhadap transaksi pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam ekosistem pembayaran di lingkup Pemerintah Daerah.

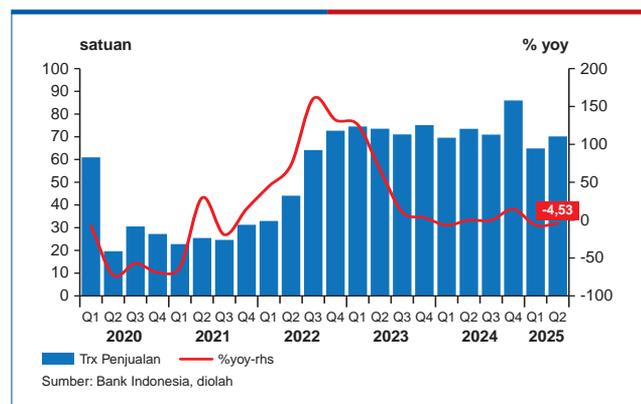
3.6. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

Pada triwulan II 2025, kinerja transaksi pembelian maupun penjualan valuta asing di Provinsi Riau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari 14 KUPVA-BB (Bukan Bank) yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, nominal

transaksi pembelian pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp71,08 miliar. Walaupun masih terkontraksi 0,45% (yoy), angka ini membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,28% (yoy). Sejalan dengan tren aktivitas pembelian, transaksi jual juga mengalami perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi 6,74% (yoy) dengan nilai Rp64,90 miliar pada triwulan I 2025 menjadi Rp70,20 miliar pada triwulan laporan, atau terkontraksi 4,53% (yoy). Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas wisata dari dan/atau menuju ke Provinsi Riau terutama selama masa liburan sekolah.



Grafik 5.14. Perkembangan Pembelian Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau



Grafik 5.15. Perkembangan Penjualan Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau



BOKS 3

Pekan QRIS Nasional (PQN) – SERINDIT (Semarak Rupiah dengan Transaksi Digital bersama QRIS) Tahun 2025 di Provinsi Riau

Pelaksanaan Pekan QRIS Nasional Tahun 2025 di Provinsi Riau

Pekan QRIS Nasional (PQN) tahun 2025 di Provinsi Riau mengusung judul acara SERINDIT (Semarak Rupiah dengan Transaksi Digital Bersama QRIS) – PQN 2025 dengan tema "*Rayakan Digitalisasi! QRISnya Satu, Menangnya Banyak!*" yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 17 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan momentum percepatan transformasi digitalisasi transaksi pembayaran melalui QRIS. Penyelenggaraan PQN 2025 di Provinsi Riau merupakan sinergi KPwBI Riau dengan Pemprov Riau, Pemkot Pekanbaru, BMPD Riau, Tim Penggerak PKK se-Provinsi Riau, serta berbagai komunitas yang dikemas secara inklusif dan menarik. Adapun rangkaian kegiatan PQN Provinsi Riau 2025, yaitu:

- **Pre-Event:** Kegiatan *pre-event* PQN 2025 di Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 4 s.d 15 Agustus 2025 yang dikemas dalam bentuk perlombaan antara lain Lomba *Influencer* Sile Pakai QRIS, SERINDIT *Photography Contest*, dan SERINDIT Ber-Pantun. Kegiatan ini diikuti oleh 88 orang dengan kategori peserta umum. Selain penilaian dari juri profesional, perlombaan ini juga dikolaborasikan dengan sistem voting melalui QRIS Riau untuk menentukan juara. Adapun perolehan transaksi QRIS dari rangkaian *pre-event* PQN 2025 Provinsi Riau sebanyak 7.042 transaksi. Selain itu, turut dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang disinergikan dengan pembekalan peserta QRIS Jelajah Indonesia (QJI) Tahun 2025 dengan tema SAHABAT QRIS (Sapa Hangat Bareng Aktivis Digital QRIS) yang dihadiri oleh 5 tim dengan masing-masing peserta sebanyak 3 orang. Pada kegiatan ini, telah dilakukan sosialisasi dan edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen, serta Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah.
- **Main Event PQN 2025 Provinsi Riau:** Puncak acara PQN 2025 Provinsi Riau dihadiri oleh ±6.500 orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang seperti pelajar, mahasiswa, perbankan, UMKM, komunitas dan masyarakat umum dengan melakukan scan QRIS Rp17,- sebagai syarat masuk ke lokasi acara. Pada kegiatan ini, seluruh transaksi pembayaran pada gerai UMKM dan *merchant* lainnya juga turut menggunakan QRIS. Di bawah ini merupakan rangkaian kegiatan pada puncak acara PQN 2025 Provinsi Riau.

a. *Opening Ceremony*

Kegiatan *opening ceremony* ditandai dengan launching SERINDIT x PQN 2025 yang dilakukan oleh ketua TP PKK Provinsi Riau dan Kepala KPwBI Provinsi Riau serta disaksikan oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan seluruh pimpinan perbankan di Kota Pekanbaru.

**b. Penandatanganan Komitmen Edukasi Bersama antara KPwBI Riau dengan Forum Anak Riau**

Penandatanganan komitmen edukasi bersama antara KPwBI Riau dan Forum Anak Riau dilakukan oleh Deputi Kepala KPwBI Riau dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau serta disaksikan oleh Ketua TP PKK Prov Riau dan Kepala KPwBI Riau. Hal ini sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi nyata dalam memperluas edukasi khususnya mengenai sistem pembayaran dan Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah kepada seluruh anak bangsa khususnya di Provinsi Riau.

c. Edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen, dan CBP Rupiah

Edukasi mengenai QRIS, PeKA, dan CBP Rupiah dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan a.l melalui perlombaan Ranking 1 yang diikuti oleh 150 siswa SMA/SMK di Kota Pekanbaru, melalui media dongeng pada lomba mewarnai tingkat SD se-Kota Pekanbaru yang diikuti oleh 150 siswa), serta edukasi interaktif bersama orkes melayu "Al-Hafizh" Pekanbaru kepada 5.000 pengunjung.

d. Kick Off QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025 dan pelaksanaan Misi 1 QJI 2025

Kegiatan PQN 2025 di Provinsi Riau juga disinergikan dengan pelaksanaan Kick Off QRIS Jelajah Budaya Indonesia Tahun 2025 serta pelaksanaan misi pertama dengan tema QRIS. Peserta QJI 2025 yang berjumlah 5 (lima) tim melakukan edukasi QRIS dan Pelindungan Konsumen serta User Experience QRIS kepada pengunjung PQN. Pada misi pertama QJI 2025 tersebut, telah diperoleh transaksi QRIS sebanyak 200 kali transaksi.

e. SERINDIT Championship – Kompetisi Semarak HUT RI ke-80

Rangkaian perlombaan untuk menyemarakkan HUT RI ke-80 meliputi seluruh lapisan masyarakat Riau berupa lomba menghias tumpeng yang diikuti oleh 18 tim (terdiri dari 3 peserta) dari seluruh TP PKK se-Provinsi Riau, lomba panjat pinang yang diikuti oleh masyarakat umum, lomba balap karung tingkat SMP se-Kota Pekanbaru, lomba makan kerupuk tingkat SD se-Kota Pekanbaru, hingga lomba menyanyi dan e-sport yang diikuti oleh perbankan sebagai sinergi rangkaian PORSEBANK 2025. Secara keseluruhan, SERINDIT Championship diikuti hampir 300 peserta.

f. Festival Kampung Pangan Unggul dan Kreatif (FESPA UNIK)

Dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Provinsi Riau, PQN 2025 di Provinsi Riau juga disinergikan dengan kegiatan Festival Kampung Pangan Unggul dan Kreatif (FESPA UNIK) yang berkolaborasi dengan Dinas Pangan Pekanbaru mengikutsertakan 6 kelurahan di Kota Pekanbaru untuk berlomba dalam penjualan berbagai produk hasil diversifikasi olahan pangan dengan menggunakan transaksi QRIS.



3. Capaian Kegiatan

Pelaksanaan PQN 2025 di Provinsi Riau berhasil meningkatkan volume transaksi QRIS secara signifikan. Selama rangkaian kegiatan, tercatat sebanyak **19.127 transaksi QRIS**, yang mencerminkan semakin luasnya akseptasi digitalisasi transaksi pembayaran di Provinsi Riau. Kegiatan ini melibatkan **6.245 peserta** edukasi, serta menjangkau **673.000 penduduk provinsi Riau** melalui media sosial.

Keberhasilan penyelenggaraan PQN 2025 di Provinsi Riau menunjukkan komitmen KPwBI Provinsi Riau dalam mendorong transformasi digital di sektor pembayaran dan memperkuat literasi serta inklusi keuangan di masyarakat.

Gambar 1 Kegiatan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025 di Provinsi Riau





Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 6

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kinerja ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2025 masih melanjutkan penurunan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan lapangan usaha, penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha unggulan Riau seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Di sisi lain, beberapa indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Petani (NTP) masih menunjukkan kinerja yang relatif baik.



1. GAMBARAN UMUM

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2025 masih menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Februari 2024 di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Rilis data BPS pada Februari 2025 menunjukkan peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

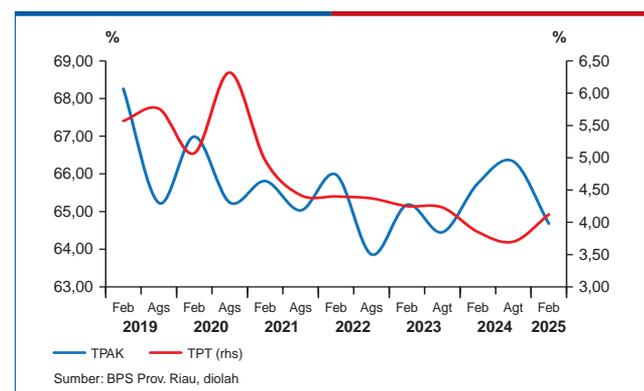
Peningkatan TPT dipengaruhi oleh turunnya serapan tenaga kerja di sektor lapangan usaha utama Riau, yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pendidikan, serta kesehatan. Hal ini ditengarai seiring dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor industri pengolahan, penundaan penambahan kerja pada sektor konstruksi karena terbatasnya proyek pembangunan, pelemahan daya beli masyarakat, dan dampak efisiensi/realokasi anggaran Pemerintah pada tahun 2025. Kondisi ini turut dikonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja dari -1,13 pada triwulan II 2024 menjadi -1,92 pada triwulan II 2025.

Meskipun demikian, indikator kemiskinan di Riau masih menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 yang tercatat menurun menjadi 6,16% dari 6,67% pada Maret 2024. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2025 tercatat bernilai sebesar 186,27, sedikit menurun dari 197,13 pada triwulan I 2025. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan NTP pada subsektor unggulan Riau seperti tanaman perkebunan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan.

2. KONDISI KETENAGAKERJAAN DAERAH

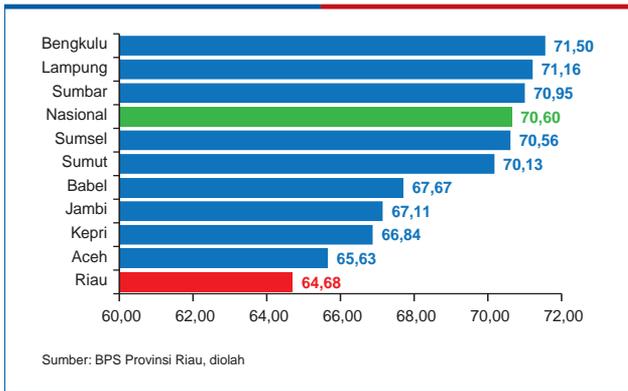
Merujuk pada rilis data ketenagakerjaan BPS per Februari 2025, sebagaimana Tabel 6.1, terlihat bahwa jumlah PUK di Provinsi Riau mengalami peningkatan 1,73% (yoy). PUK merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (usia >15 tahun). Pada kenyataannya, penduduk usia tersebut tidak selalu dalam status bekerja atau aktif mencari kerja (status ini disebut Angkatan Kerja) tetapi ada pula yang berstatus Bukan Angkatan Kerja antara lain karena sedang menempuh pendidikan. Di Provinsi Riau, jumlah PUK pada Februari 2025 tercatat sebanyak 4,99 juta orang, meningkat 84,6 ribu dari Februari 2024. Peningkatan jumlah PUK ini berkontribusi pada peningkatan jumlah Angkatan Kerja dari 3.222,76 ribu orang pada Februari 2024 menjadi 3.224,81 ribu orang pada Februari 2025, atau meningkat 0,06% (yoy). Sementara itu, jumlah Bukan Angkatan Kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1.678,71 ribu orang pada Februari 2024 menjadi 1.761,28 ribu orang, atau meningkat 4,92% (yoy).

Lebih lanjut mengenai kondisi Angkatan Kerja, secara umum pada triwulan II 2025 masih melanjutkan tren pelemahan dari periode sebelumnya. Hal ini terlihat pada Grafik 6.1 yang menunjukkan menurunnya TPAK dan di sisi lain meningkatnya TPT. Lebih lanjut, sebagaimana Tabel 6.3, peningkatan TPT terindikasi dari berkurangnya serapan tenaga kerja



Grafik 6.1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau

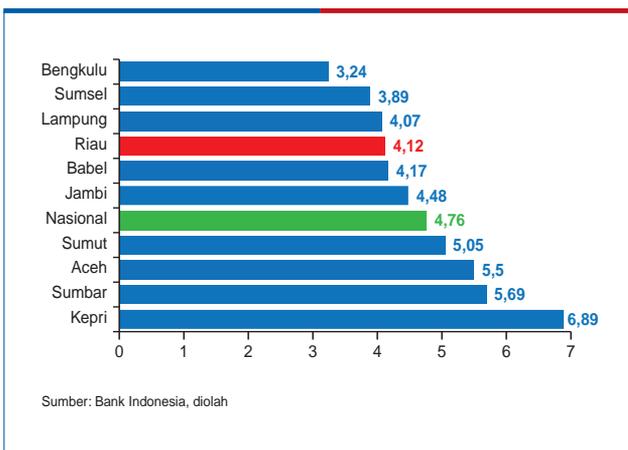




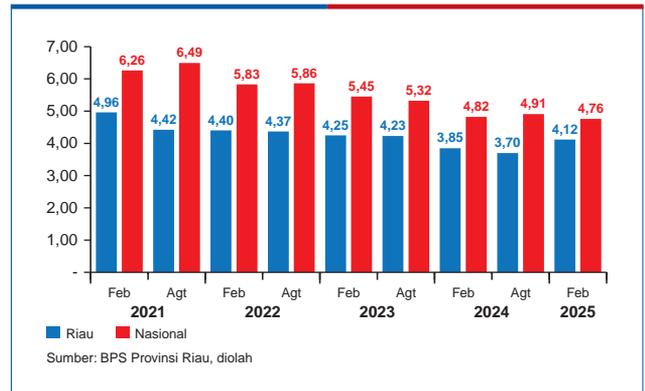
Grafik 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera (dalam %)

di sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan jasa keuangan.

Selanjutnya, TPAK Riau pada Februari tercatat sebesar 64,68%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 65,75%. Penurunan TPAK Riau tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah PUK yang lebih didominasi oleh peningkatan Bukan Angkatan Kerja yang lebih signifikan daripada peningkatan Angkatan Kerja. Berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPAK disumbang oleh penurunan TPAK perempuan dari 46,25% menjadi 43,78%. Di sisi lain, penurunan TPAK tersebut ditahan oleh peningkatan TPAK laki-laki dari 84,43% pada Februari 2024 menjadi 84,72% pada Februari 2025. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kepulauan Sumatera, TPAK Riau tercatat



Grafik 6.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera (dalam %)

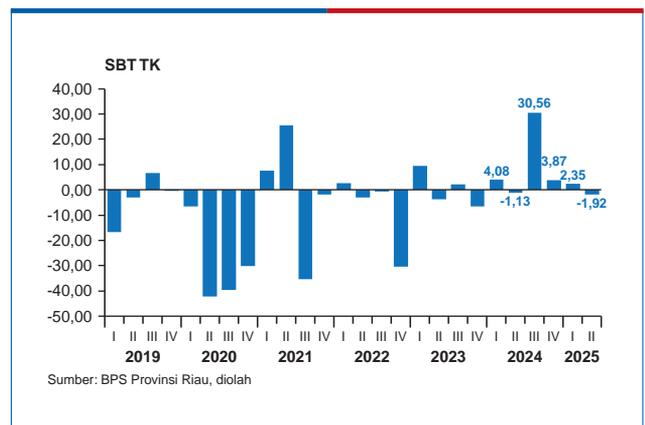


Grafik 6.3. Perkembangan TPT Nasional dan TPT Provinsi Riau

paling rendah dibandingkan provinsi lain dan rata-rata Nasional, sebagaimana terlihat pada Grafik 6.2.

Selanjutnya, TPT Riau mengalami peningkatan dari 3,85% pada Februari 2024 menjadi 4,12% pada Februari 2025. Peningkatan TPT tersebut mengindikasikan adanya tambahan jumlah pengangguran di Provinsi Riau, termasuk mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan maupun mempersiapkan usaha. Walaupun meningkat, TPT Riau masih lebih rendah daripada TPT Nasional sebesar 4,76% (Grafik 6.3) maupun TPT sebagian besar provinsi di Sumatera (Grafik 6.4).

Kondisi peningkatan TPT ini dikonfirmasi oleh hasil SKDU Bank Indonesia yang menunjukkan semakin dalamnya penurunan SBT penggunaan tenaga kerja dari -1,13 pada triwulan II 2024 menjadi -1,92 pada triwulan II 2025 sebagaimana Grafik 6.5.



Grafik 6.5. Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Dunia Usaha di Provinsi Riau




Tabel 6.1. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribuan Orang)

INDIKATOR	2022		2023		2024		2025	Feb'25 Terhadap Feb'24	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Growth	Indikator
Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)	4.766,90	5.189,24	4.873,51	4.863,74	4.901,47	4.946,20	4.986,08	1,73	↑
Angkatan Kerja	3.145,10	3.313,82	3.176,68	3.134,79	3.222,76	3.280,73	3.224,81	0,06	↑
Bekerja	3.006,59	3.168,93	3.041,63	3.002,33	3.098,76	3.159,37	3.091,84	-0,22	↓
Pengangguran	138,51	144,89	135,05	132,45	124,00	121,36	132,97	7,23	↑
Bukan Angkatan Kerja	1.621,80	1.875,43	1.696,83	1.728,95	1.678,71	1.665,48	1.761,28	4,92	↑
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,98%	63,86%	65,18%	64,45%	65,75%	66,33%	64,68%	-1,63	↓
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,40%	4,37%	4,25%	4,23%	3,85%	3,70%	4,12%	7,17%	↑

Sumber: BPS Provinsi Riau (Februari 2025), diolah

Tabel 6.2. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribuan Orang)

PENDIDIKAN	2022		2023		2024		2025	Feb'25 Terhadap Feb'24		
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Pangsa	Growth	Indikator
SD ke bawah	1.007,22	1.079,84	1.006,06	906,22	928,55	932,90	894,67	29%	(3,65)	↓
SMP	570,27	560,71	508,04	541,78	565,80	543,76	517,90	17%	(8,47)	↓
SMA Umum	715,34	819,56	851,36	843,14	843,97	918,98	891,49	29%	5,63	↑
SMA Kejuruan	315,90	289,34	325,93	311,62	311,76	294,20	296,53	10%	(4,89)	↓
DI/II/III dan Universitas	84,16	83,13	66,26	70,78	78,00	76,99	72,33	2%	(7,27)	↓
Universitas	313,70	336,36	283,98	328,80	370,68	392,54	418,92	14%	13,01	↑
Total	3.006,59	3.168,94	3.041,63	3.002,34	3.098,76	3.159,37	3.091,84	100%	(0,22)	↓

Sumber: BPS Provinsi Riau (Februari 2025), diolah

Tabel 6.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	Ribuan Orang				Pangsa %	Feb'25 Terhadap Feb'24	
	Feb '22	Feb '23	Feb '24	Feb '25	Feb'25	Growth	Indikator
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.056,74	980,72	983,79	1.000,93	32,37%	1,75	↑
Industri Pengolahan	270,59	265,06	303,76	259,08	8,38%	-14,71	↓
Perdagangan	586,96	647,61	633,27	622,94	20,15%	-1,63	↓
Konstruksi dan Real Estate	169,45	166,87	185,07	166,30	5,38%	-10,14	↓
Pengangkutan dan Pergudangan	122,33	125,75	81,74	104,33	3,37%	27,64	↑
Pertambangan dan Penggalian	29,12	46,61	47,68	44,64	1,44%	-6,38	↓
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	28,67	41,29	19,60	14,30	0,46%	-27,04	↓
Lainnya *	742,76	767,72	843,84	879,33	28,44%	4,21	↑
Total	3.006,62	3.041,63	3.098,75	3.091,85	100,0%	-0,22	↓

 * Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari Penyedia Akomodasi Mamin, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Kategori Lainnya
 Sumber: BPS Provinsi Riau (Februari 2025), diolah

Lebih lanjut pada Tabel 6.3, terlihat bahwa struktur penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Riau pada triwulan laporan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ditinjau secara sektoral, penyerapan tenaga kerja utama di Riau pada Februari

masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha utama, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Secara kumulatif ketiga sektor ekonomi tersebut mampu menyerap 60,9% dari total tenaga kerja di Riau.



Sejalan dengan tingginya pangsa serapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut, penurunan penyerapan tenaga kerja pada 2 (dua) sektor, yaitu perdagangan dan industri pengolahan mendorong peningkatan TPT Riau. Selain itu, peningkatan TPT juga didorong oleh turunnya serapan tenaga kerja di beberapa sektor lain seperti konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, pendidikan, serta kesehatan.

Di sisi lain, terdapat peningkatan serapan tenaga kerja di sektor utama lainnya yaitu pertanian yang meningkatkan secara terbatas sebesar 1,74% (yoy). Selain itu, sektor administrasi pemerintah serta pengangkutan dan pergudangan turut mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Indikator lain yang menarik untuk ditinjau adalah sebaran penduduk bekerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada Tabel 6.2, terlihat bahwa serapan jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP, SMK, dan Diploma mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah pekerja dari tingkat pendidikan SMA dan Universitas mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibandingkan Februari 2024. Lebih dari itu, pangsa tenaga kerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah, yaitu 74,52%, sementara pendidikan SMK dan pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) masing-masing hanya berpangsa 9,59% dan 15,89%.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan rencana hilirisasi industri.

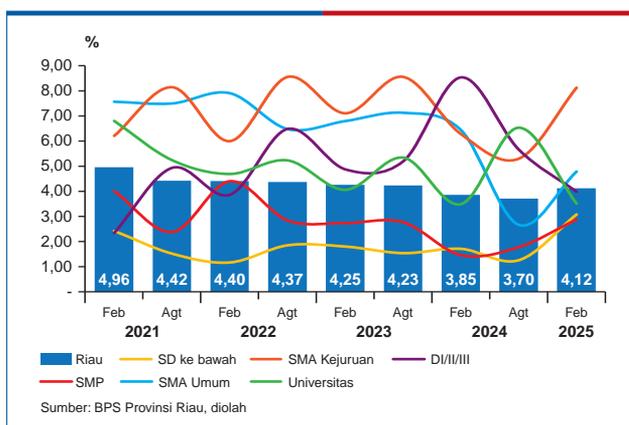
Di sisi lain, perbandingan kondisi TPT antara Februari 2025 dan Februari 2024 pada Grafik 6.6 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP, dan SMK mengalami peningkatan. Sementara untuk tingkat pendidikan SMA dan Diploma mengalami penurunan sedangkan untuk tingkat pendidikan Universitas relatif stabil.

3. KONDISI KESEJAHTERAAN DAERAH

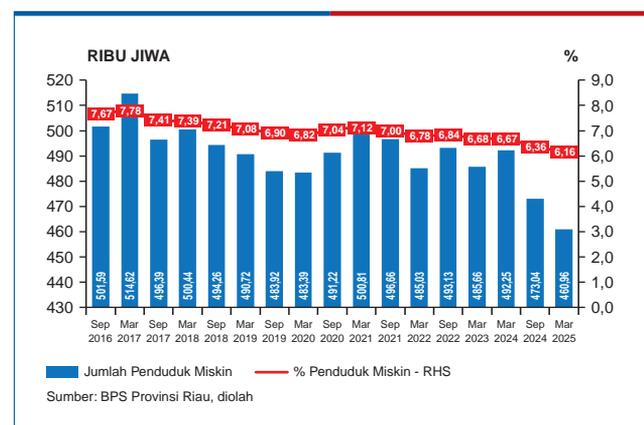
3.1. Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terindikasi membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,16%, lebih rendah dari September dan Maret 2024 masing-masing 6,36% dan 6,67%. Berlanjutnya tren penurunan kemiskinan di Riau mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk yang relatif membaik.

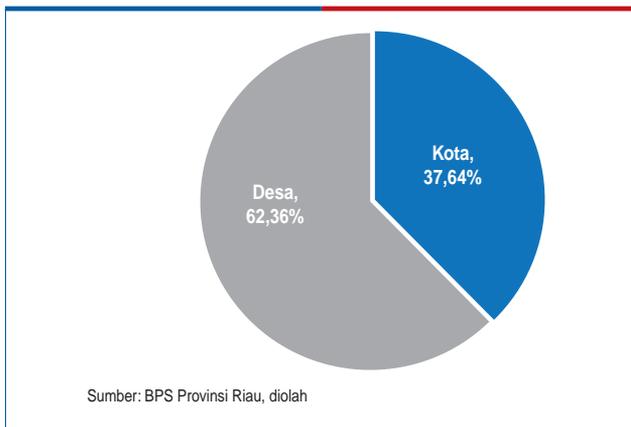
Tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 sebesar 6,16% merupakan persentase penduduk miskin terendah setidaknya sejak tahun 2016 sebagaimana Grafik 6.7. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 mencapai 460,96 ribu jiwa, menurun sebanyak 31,29 ribu jiwa dari Maret 2024.



Grafik 6.6. Perkembangan TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



Grafik 6.7. Jumlah Penduduk Miskin di Riau



Grafik 6.8. Sebaran Penduduk Miskin di Riau

Berdasarkan lokasinya, sebagaimana Grafik 6.8, profil sebaran penduduk miskin di Riau pada Maret 2025 masih terkonsentrasi di daerah perdesaan dengan pangsa 62,36%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya 59,19% pada Maret 2024. Sementara itu, pangsa penduduk miskin di perkotaan tercatat menurun menjadi 37,64% dari 40,81% pada Maret 2024.

Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tambah dari kegiatan perekonomian masih lebih cepat dirasakan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penguatan program pemerataan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan investasi dibutuhkan untuk memperkecil *gap* antara wilayah perdesaan dan perkotaan sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan demikian, laju perpindahan penduduk dari desa menuju kota juga dapat semakin dikendalikan. Program pemerataan dimaksud juga dapat dibiayai dengan optimalisasi dana desa.

Terlepas dari pangsanya, tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penduduk miskin di perdesaan menurun menjadi 287,45 ribu orang pada Maret 2025 dari 291,34 ribu orang pada Maret 2024, atau turun 1,34% (yoy). Turunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan ini sejalan dengan membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) secara tahunan, yaitu dari 168,55 pada

triwulan II 2024 menjadi 186,27 pada triwulan II 2025 sebagaimana Grafik 11. Membaiknya NTP ini didorong oleh peningkatan NTP pada subsektor utama yaitu perkebunan rakyat. Sementara itu, kemiskinan di perkotaan juga tercatat turun dari 200,91 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 173,52 ribu orang pada Maret 2025, atau turun 13,63%. Pesatnya penurunan tingkat kemiskinan perkotaan ini sejalan dengan meningkatnya *output* sektor ekonomi utama yang menyerap banyak tenaga kerja pada triwulan II 2025 seperti industri pengolahan dan perdagangan.

3.2. Garis Kemiskinan

Pada Maret 2025, angka Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan, baik di perdesaan maupun perkotaan. Angka GK mencerminkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam 1 bulan yang dibagi dalam GK Makanan (GKM) dan GK Non Makanan (GKNM). Dilihat dari Tabel 6.4, GK di Riau pada Maret 2025 tercatat tumbuh 2,27% menjadi Rp713.117 per kapita/bulan, yang terdiri dari Rp525.806 GKM dan Rp187.311 GKNM.

Peningkatan GK Riau mayoritas bersumber dari kenaikan GKM (73,73%), sedangkan GKNM seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan hanya berkontribusi sekitar 26,27%. Kontribusi komoditas makanan yang masih dominan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut masih berperan penting dalam penentuan tingkat kemiskinan di Riau. Berdasarkan data BPS pada Maret 2025, terdapat 5 (lima) komoditas makanan dengan andil terbesar terhadap GK, baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu: (1) beras, (2) rokok kretek filter, (3) daging ayam ras, (4) telur ayam ras, dan (5) cabe merah. Sedangkan pada komoditas non-makanan, penyumbang GK didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Salah satu penyebab relatif meningkatnya GK adalah kenaikan harga komoditas pangan yang tercermin dari tingkat inflasi komoditas, seperti beras, daging ayam ras, dan rokok kretek. Peningkatan

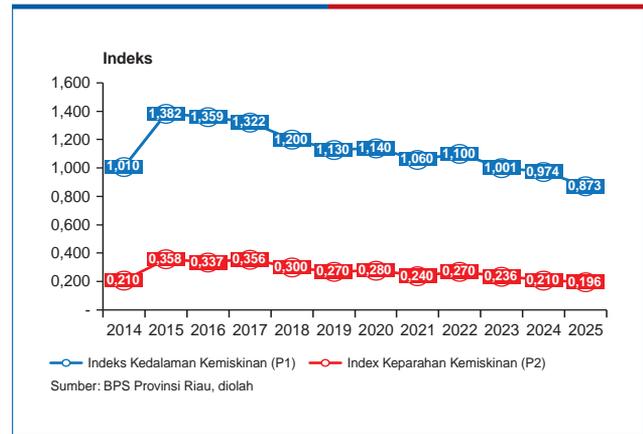
Tabel 6.4. Garis Kemiskinan Provinsi Riau

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Mar-17	318.174	145.074	463.248
Mar-18	342.425	148.954	491.379
Mar-19	361.135	152.604	513.739
Mar-20	400.297	170.165	570.462
Mar-21	419.858	175.412	595.270
Mar-22	450.681	191.327	642.008
Mar-23	495.115	203.126	698.241
Mar-24	529.025	211.197	740.222
Mar-25	542.999	215.175	758.174
Perdesaan			
Mar-17	346.208	104.373	450.581
Mar-18	357.685	114.001	471.686
Mar-19	368.149	23.242	391.391
Mar-20	394.776	131.654	526.430
Mar-21	409.818	136.989	546.807
Mar-22	435.905	146.319	582.224
Mar-23	475.721	156.983	632.704
Mar-24	501.450	167.924	669.374
Mar-25	514.581	168.483	683.064
Kota + Desa			
Mar-17	335.922	120.571	456.493
Mar-18	351.845	128.099	479.944
Mar-19	365.515	135.097	500.612
Mar-20	396.883	147.175	544.058
Mar-21	413.593	152.344	565.937
Mar-22	441.535	164.377	605.912
Mar-23	483.092	175.519	658.611
Mar-24	511.959	185.337	697.296
Mar-25	525.806	187.311	713.117

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

harga komoditas pangan di Riau kerap disebabkan oleh *supply shock* seperti gangguan produksi dan pergeseran periode tanam akibat gangguan cuaca, bencana alam, kenaikan HET, serta transmisi kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan untuk menahan laju peningkatan GKM, diperlukan penguatan program pengendalian inflasi untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.

Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Riau pada periode Maret 2025 mengalami penurunan, begitu pula dengan Indeks Keparahan



Grafik 6.9. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

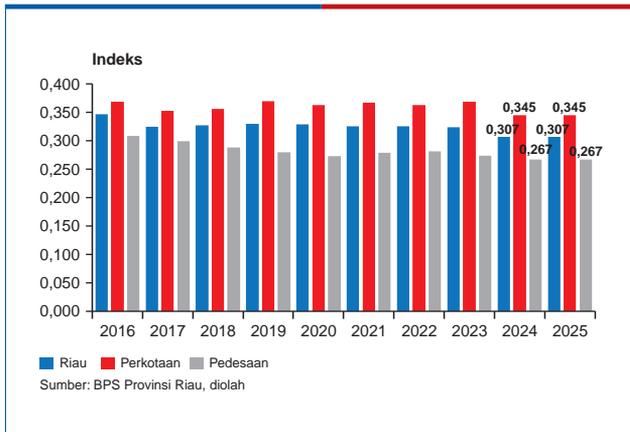
Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menurun dari 0,974 pada Maret 2024 menjadi 0,873 pada Maret 2025. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan representasi rata-rata ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Riau semakin dekat dengan GK atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Riau semakin rendah.

Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sedikit menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) tercatat dari 0,21 pada Maret 2024 menjadi 0,196 pada Maret 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Riau sedikit menurun, atau sebaran pengeluaran penduduk miskin di Riau sedikit menyempit.

3.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Dimensi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah selain indeks P_1 dan P_2 adalah rasio gini yang terlihat stabil. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio gini yang tercatat sebesar 0,307 pada Maret 2025, sama dengan kondisi Maret 2024. Ketimpangan atau pemerataan pendapatan





Grafik 6.10. Perkembangan Rasio Gini (Periode September)

di Riau masih dapat dijaga untuk tetap berada di kategori sedang ($0,30 \leq G \leq 0,50$) dan rendah ($G < 0,30$). Secara spasial, apabila dibandingkan dengan posisi Maret 2024, rasio gini perkotaan dan pedesaan tidak mengalami perubahan, masing-masing adalah 0,345 dan 0,267.

3.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Indikator kesejahteraan lainnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif petani. Tingkat kesejahteraan petani di Riau pada triwulan II 2025 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Indikator NTP pada triwulan II 2025 tercatat menurun sebesar 5,51% (qtq), atau tercatat sebesar 186,27 pada Juni 2025 dari 197,13 pada Maret 2025. Penurunan NTP Riau terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan di saat yang bersamaan terjadi peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) menurun

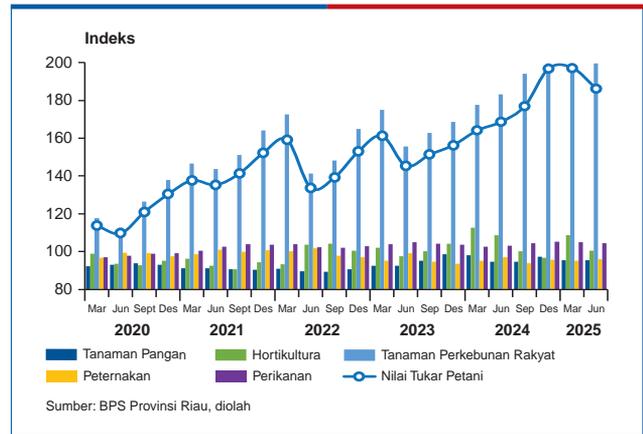
dari 234,50 menjadi 222,44, atau turun sebesar 5,14% (qtq). Di saat yang bersamaan, indeks harga yang dibayar petani (Ib) justru meningkat dari 118,96 menjadi 119,42, atau meningkat 0,39% (qtq). Secara umum, hal ini mengindikasikan adanya penerimaan yang lebih rendah dari komoditas yang diproduksi daripada kenaikan harga yang harus dibayar dalam rangka memproduksi komoditas tersebut ditambah kebutuhan konsumsi rumah tangga petani. Kendati demikian, secara umum, NTP Riau masih berada di atas 100 yang artinya tingkat kesejahteraan petani relatif terjaga.

Lebih lanjut, penurunan NTP terjadi di hampir seluruh subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan. Hanya subsektor peternakan yang mencatatkan kenaikan NTP tetapi itupun tidak esensial. Penurunan NTP dari subsektor tanaman perkebunan rakyat menjadi penggerak utama menurunnya NTP Riau pada triwulan II 2025 mengingat subsektor ini merupakan pos unggulan yang menyerap banyak tenaga kerja. Penurunan NTP pada subsektor tersebut sebesar 12,82% (qtq) atau dari 218,02 menjadi 205,20.

Secara lebih rinci, NTP berdasarkan subsektor di Riau masih berada di atas 100 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, hortikultura, dan perikanan sehingga tingkat kesejahteraan petani relatif terjaga. Namun demikian, NTP subsektor tanaman pangan dan peternakan sedikit berada di bawah angka 100, yaitu 95,34 dan 95,84 dengan demikian perlu mendapatkan perhatian lebih agar *net income* petani pada subsektor tersebut dapat segera menjadi positif sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya.



Secara spasial, kendati mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, NTP Riau tercatat sebagai yang tertinggi kedua di wilayah Sumatera, setelah Bengkulu dengan 199,87. Sementara terhadap nasional, mayoritas provinsi di wilayah Sumatera berada di atas NTP nasional yaitu sebesar 121,72 serta berada di atas indeks dasar (=100). Hal tersebut mengindikasikan kesejahteraan petani di Riau relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Sumatera dan Nasional.



Grafik 6.11. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau





Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 7

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025 diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 4,19% – 4,85% ditopang oleh perbaikan net ekspor. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) utama yang membaik pada tahun 2025, di antaranya Industri Pengolahan dan LU Pertanian yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Selain itu, sektor tersier (jasa-jasa) diperkirakan juga akan membaik seiring pemulihan permintaan terutama permintaan domestik. Lebih lanjut, inflasi Provinsi Riau pada tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, serta berada pada batas atas sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan dominan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Transportasi; dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.



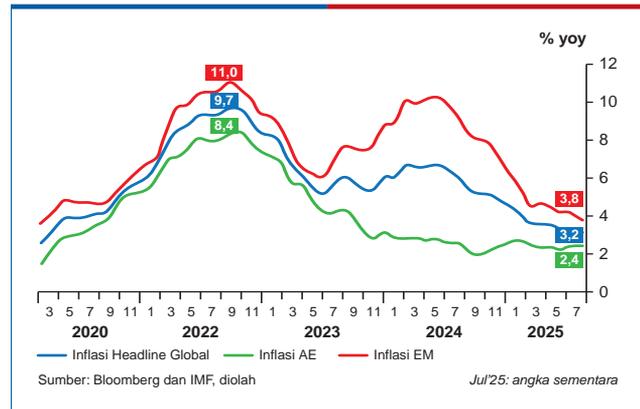
1. PROSPEK EKONOMI GLOBAL 2025

Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda namun dengan risiko yang masih tinggi. Ekonomi global pada 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 3,0%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rilis *World Economic Outlook* (WEO) sebelumnya pada April 2025. Dengan demikian, ekonomi global diperkirakan relatif lebih lambat dibandingkan tahun 2024, yakni dari sebelumnya 3,3% menjadi 3,0% pada tahun 2025¹.

Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh melambat, yaitu dari sebelumnya sebesar 1,8% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 1,5% (yoy) pada tahun 2025 disebabkan oleh estimasi kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Eropa yang masing-masing tumbuh dari 2,8% (yoy) dan 0,9% (yoy) pada tahun 2024 menjadi masing-masing tumbuh sebesar 1,9% dan 1,0% (yoy) pada tahun 2025. Lebih kuatnya kinerja ekonomi kawasan Eropa sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, termasuk fiskal akomodatif, dan kenaikan ekspor.

Sementara itu, kinerja ekonomi negara berkembang diperkirakan melambat dari 4,2% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,1% (yoy) pada tahun 2025. Tertahannya kinerja ekonomi global dipengaruhi oleh tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian global meningkat.

Divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi. Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tetap kuat ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi. Sementara itu, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan



Grafik 7.1. Perkembangan Inflasi Global

perekonomian global yang lambat dan dampak implementasi kenaikan tarif impor oleh AS. Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat ketidakpastian perdagangan dan kondisi geopolitik.

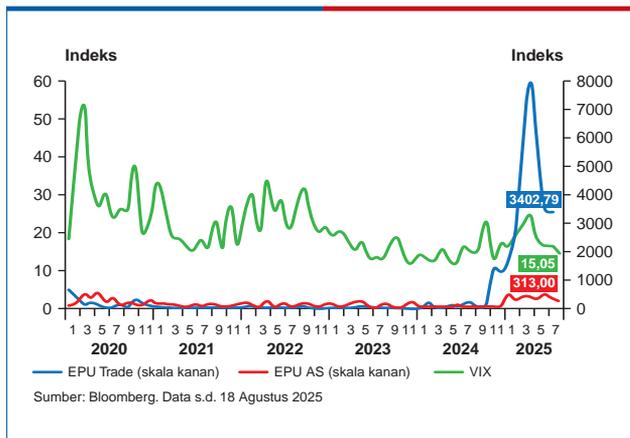
Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dipengaruhi kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari prakiraan serta arah kebijakan bank sentral AS. Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan menurunnya inflasi mendorong sebagian besar bank sentral menempuh kebijakan moneter yang akomodatif, kecuali Jepang. Di AS, tekanan inflasi yang cenderung menurun mendorong semakin kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan. Meskipun demikian, dalam jangka pendek ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut dan perlu tetap diwaspadai guna menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global.

Sementara itu, penurunan inflasi dunia terus berlanjut dengan penurunan inflasi negara-negara maju relatif lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang. Pada triwulan II 2025 (hingga Juli 2025), inflasi global dan negara-negara maju menunjukkan tren penurunan, sejalan dengan itu, negara-negara berkembang terpantau mengalami pelambatan. Ke depan, inflasi global diperkirakan melandai ke 4,2% (yoy) pada tahun 2025 dan 3,6% pada 2026².

1. IMF World Economic Outlook July 2025

2. IMF World Economic Outlook July 2025





Grafik 7.2. Indeks Ketidakpastian Global

Fragmentasi geopolitik-geoekonomi juga berpengaruh pada divergensi aliran perdagangan dan investasi antarnegara yang lebih menguntungkan negara-negara maju, khususnya AS. Pertumbuhan perdagangan dunia diperkirakan turun dari 3,5% pada 2024 menjadi 2,6% pada 2025, lebih rendah dari rerata satu dekade sebelum Covid-19 sebesar 4,9%. Di samping karena perbedaan pola peningkatan permintaan antarnegara, penurunan perdagangan ini juga disebabkan restriksi perdagangan yang berasal dari peningkatan tarif.

Di tengah prospek masih tertahannya ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat seperti tahun 2024, didukung oleh peningkatan investasi dan inflasi yang terkendali dalam target sasaran. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4%. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang baik didukung terjaganya daya beli seiring meredanya tekanan inflasi yang diperkirakan kembali pada kisaran sasaran 2,5%±1% di 2025.

Kinerja permintaan domestik diperkirakan tetap kuat sepanjang 2025, ditopang oleh terjaganya komponen konsumsi RT sejalan dengan peningkatan aktivitas

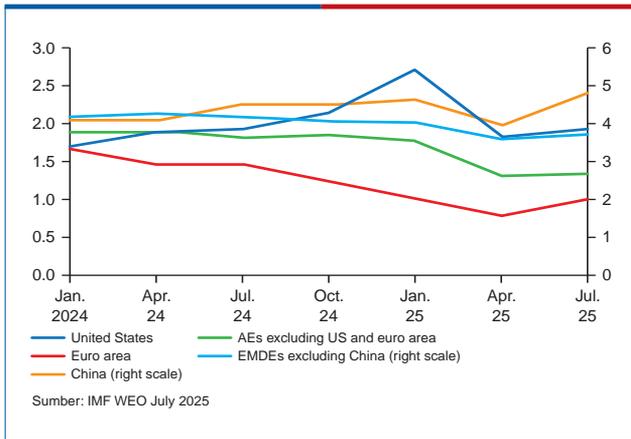
ekonomi masyarakat dan penyelenggaraan event internasional. Sementara itu, prospek investasi lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama pada investasi bangunan. Peran fiskal daerah diperkirakan berlanjut, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi. Adapun kinerja ekspor diperkirakan terjaga meski lebih rendah dari prakiraan, sejalan dengan pelambatan perekonomian global.

Perekonomian Provinsi Riau pada 2025 diperkirakan tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Riau tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,19% – 4,85% (yoy). Dari sisi penawaran, percepatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh percepatan kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Dari sisi permintaan, percepatan ekonomi Riau pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan net ekspor LN.

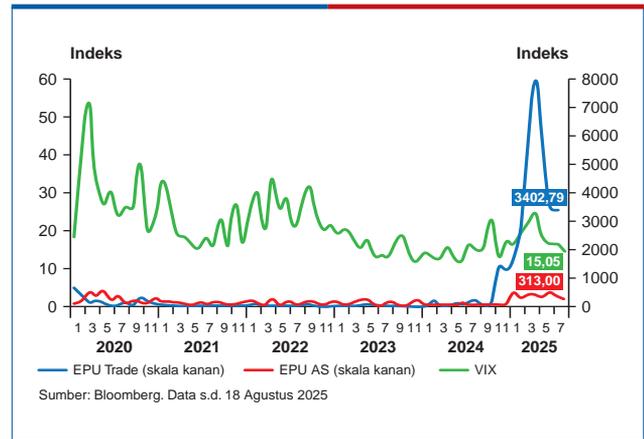
Hilirisasi menjadi kunci utama pertumbuhan perekonomian Riau. Peningkatan nilai tambah dari hilirisasi dapat mendukung pertumbuhan ekspor luar negeri Provinsi Riau. Perdagangan antardaerah Riau juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Kinerja sektor pertanian diperkirakan meningkat, sementara kinerja Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik CPO dan produksi *pulp* and *paper* dan ekspor yang meningkat. Potensi perbaikan negara ASEAN, serta negara tujuan ekspor LN non-tradisional diperkirakan menjaga tetap positifnya ekspor LN Riau pada tahun 2025. Ekonomi India diperkirakan tumbuh stabil di angka 6,4% di tahun 2025, serta akan relatif stabil pada tahun 2026. Kawasan ASEAN-5 diperkirakan juga tetap terjaga sejalan sebagaimana tercermin pada perkiraan pertumbuhan dari sebelumnya 4,6% pada tahun 2024 menjadi 4,1% pada tahun 2025.





Grafik 7.3. Tren PDB Global



Grafik 7.4. Indeks Ketidakpastian dan Volatilitas Global

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, volume perdagangan dunia pada tahun 2025 diperkirakan melambat dibandingkan 2024. Volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% (yoy) pada tahun 2024, menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 2,6% (yoy). Hal tersebut tercermin pada ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional berdasarkan laporan *World Economic Outlook* dari *Internasional Monetary Fund*.

Meskipun pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat, harga komoditas global diperkirakan masih terjaga pada level yang tetap tinggi pada tahun 2025. Hal tersebut diperkirakan turut menjaga kinerja ekspor utama Provinsi Riau.

Tabel 71. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Sejumlah Negara Maju dan Berkembang (% yoy)

Negara	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Dunia	-2,8	6,3	3,5	3,3	3,3	3,0
Negara Maju	-4,2	5,6	2,6	1,7	1,8	1,6
Amerika Serikat	-2,8	5,9	1,9	2,8	2,8	2,0
Kawasan Eropa	-6,1	5,6	3,4	0,4	0,9	1,0
Jepang	-4,2	2,2	1,0	1,5	0,1	1,0
Negara Berkembang	-1,8	6,9	4,1	4,4	4,3	4,0
Tiongkok	2,2	8,4	3,0	5,2	5,0	4,6
India	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,5	6,5
ASEAN-5	-4,4	4,0	5,5	4,0	4,6	4,4
Amerika Latin	-7,0	7,4	4,2	2,4	2,4	1,9
1 Negara Berkembang Eropa	-1,6	7,3	1,2	3,3	3,4	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	-2,6	4,3	5,4	2,0	2,4	3,4

Sumber: IMF WEO. * Proyeksi Bank Indonesia





Tabel 7.2. Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Indonesia (% yoy)

KOMODITAS	2022					2023					2024					2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1	Q2	Q3*	YTD*
Tembaga	17,4	-1,8	-17,7	-16,4	-5,2	-10,2	-11,0	8,6	3,1	-3,3	-4,7	16,8	11,2	12,8	8,8	10,3	-4,3	4,5	2,6
Batu Bara	94,1	73,2	11,1	-1,6	32,3	-2,9	-27,7	-35,7	-35,8	-25,9	-27,7	-16,3	0,2	-11,3	-15,3	-14,4	-16,8	-20,7	-15,2
CPO	56,7	55,5	-12,2	-24,9	15,3	-35,6	-42,0	-3,2	5,9	-25,9	0,5	6,2	5,2	31,3	10,5	17,1	0,3	4,9	2,5
Karet	1,7	2,2	-6,0	-19,8	-4,9	-21,1	-27,3	-8,0	11,5	-13,5	17,9	44,3	40,6	40,0	35,3	9,3	-9,2	-8,1	-4,2
Nikel	59,4	66,7	16,0	30,3	42,1	-6,7	-22,6	-7,0	-31,8	-17,3	-35,7	-16,9	-19,9	-7,2	-21,3	-6,3	-17,7	-7,9	-9,2
Timah	80,6	25,3	-30,3	-43,1	0,0	-38,6	-29,4	13,8	14,6	-16,8	0,2	25,3	185	23,4	16,7	21,0	0,5	5,7	7,5
Aluminium	54,3	20,2	-11,0	-14,7	9,4	-24,9	-21,3	-6,6	-5,5	-15,7	-8,2	12,3	10,0	16,9	7,4	17,1	-3,9	7,4	4,1
Kopi	82,5	50,8	18,3	-21,2	24,6	-26,4	-19,3	-28,6	-2,1	-20,1	7,1	19,9	55,9	65,7	36,4	100,7	63,9	21,5	44,1
Lainnya	5,2	6,4	7,3	6,3	6,3	-1,5	-1,7	-2,2	-3,1	-2,1	-1,0	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-0,2	1,1	0,1	0,1
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	47,0	37,7	1,3	-6,8	15,3	-12,7	-21,7	-12,2	-12,0	-16,0	-8,2	1,7	6,1	8,7	1,5	2,9	-5,0	-4,9	-3,3
Minyak (Brent)**	101	113	101	88	101	81	78	87	84	83	83	85	80	75	81	76	68	70	71

** Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (% yoy)

Sumber: Bloomberg. Data sampai 18 Agustus 2025

2. PROSPEK EKONOMI REGIONAL 2025

2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2025

Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,19 – 4,85% (yoy), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja net ekspor LN. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan prospek ekonomi nasional, kinerja positif konsumsi swasta diperkirakan menjadi penopang utama ekonomi Riau di tahun 2025. Terjaganya daya beli masyarakat, yang didukung oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga terjaganya harga kelapa sawit mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Selain konsumsi swasta, ekspor dan perdagangan antardaerah Riau juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Secara sektoral, prospek ekonomi Riau yang lebih tinggi disebabkan oleh perbaikan kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi

tertahan oleh kinerja pada LU Pertambangan. Prospek ekonomi yang tetap positif juga mendorong kinerja LU sektor tersier, antara lain Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

2.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Permintaan

Untuk keseluruhan tahun 2025, kinerja ekonomi Riau dari sisi permintaan diperkirakan mengalami peningkatan, ditopang oleh perbaikan konsumsi swasta serta ekspor luar negeri. Terjaganya kinerja konsumsi swasta yang bersumber dari konsumsi Rumah Tangga diperkirakan tumbuh tetap kuat. Akan tetapi, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) diperkirakan melambat dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu, Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024).

Sementara itu, kinerja ekspor LN Riau diperkirakan masih tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Meskipun demikian, dengan adanya pergeseran ekspor antar daerah untuk memenuhi kebutuhan luar negeri, Net Ekspor Antar Daerah pada tahun 2025 diperkirakan berkontraksi. Sejalan dengan peningkatan ekspor luar negeri tersebut, impor Riau juga diperkirakan akan mengalami percepatan.





Konsumsi Swasta

Prospek konsumsi swasta pada 2025 diperkirakan tumbuh terbatas, akan tetapi masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Riau. Kinerja konsumsi swasta Provinsi Riau diperkirakan tetap tumbuh positif ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi RT. Perbaikan pendapatan masyarakat diperkirakan sejalan dengan penyesuaian UMP sebesar 6,5%. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK) pada Triwulan II 2025, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dalam 6 (enam) bulan mendatang masih berada pada rentang level optimis. Akan tetapi, konsumsi LNPRT diperkirakan melambat sehubungan dengan selesainya pesta demokrasi di tahun 2024.

Prospek positif konsumsi swasta juga didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia, antara lain insentif PPNDTP 11% rumah tapak dan rumah susun, serta berlanjutnya pelonggaran kebijakan *loan/financing to value* (LTV/FTV) kredit properti dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Selain itu, pertumbuhan konsumsi swasta pada keseluruhan tahun 2025 juga didukung oleh inflasi yang terjaga pada kisaran sasaran.

Meskipun demikian, konsumsi swasta Provinsi Riau pada tahun 2025 diperkirakan masih dibayangi perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih rendah, serta prospek pelambatan ekonomi global pada tahun 2025 yang berdampak pada penurunan lapangan pekerjaan yang terindikasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 yang pada 4,12%, meningkat dari Februari 2024 yang berada di 3,85% menahan pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi.

Investasi

Ke depan, kinerja investasi diperkirakan tetap kuat dan tumbuh positif pada tahun 2025 terutama ditopang oleh investasi non-bangunan. Pertumbuhan investasi diperkirakan terutama bersumber dari investasi

non-bangunan, investasi korporasi swasta di sektor industri pengolahan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi oleh perusahaan sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik dan peningkatan ekspor luar negeri, terutama pada industri pengolahan CPO, serta peningkatan kapasitas industri pengolahan *pulp* dan kertas. Investasi korporasi swasta di sektor industri pengolahan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi. Peningkatan kapasitas produksi oleh perusahaan sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik, terutama pada industri pengolahan CPO, serta peningkatan kapasitas industri pengolahan *pulp* dan kertas.

Namun demikian, kinerja investasi bangunan diperkirakan melambat seiring dengan penyelesaian proyek pembangunan seperti penyelesaian ruas Tol Bangkinang-Pangkalan di Provinsi Riau dan juga penundaan penyelesaian penghubung dengan ruas tol seksi XIII Koto Kampar – Pangkalan. Hal ini terkonfirmasi dari penyaluran kredit konstruksi pada triwulan II 2025 yang berada di 5,18% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2025 yang berada di 9,60% (yoy).

Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Pada tahun 2025, kinerja fiskal melambat seiring penurunan pagu belanja APBD. Pelambatan realisasi diperkirakan sejalan dengan penurunan pagu belanja daerah APBD dari Rp11,02 triliun menjadi Rp9,69 triliun pada tahun 2025, serta penurunan pagu APBN Provinsi Riau dari Rp33,87 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp32,78 triliun di tahun 2025. Penurunan APBD disebabkan *readjustment* pagu belanja sesuai dengan perkiraan pendapatan berdasarkan kondisi terkini.

Akselerasi program eletronifikasi transaksi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan realisasi belanja di daerah.





Ekspor Dan Impor Barang Dan Jasa

Di tengah prospek pelambatan ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Riau diperkirakan tetap tumbuh. Dari sisi eksternal, potensi perbaikan ekonomi ASEAN, salah satu mitra dagang utama Riau, serta potensi kenaikan ekspor komoditas olahan *pulp* dan kertas Riau diperkirakan berkontribusi tetap kuatnya ekspor LN Riau pada tahun 2025. Sementara itu, prospek *net* ekspor juga ditopang oleh tetap pertumbuhan ekspor CPO dan hilirisasi nya seperti *oleochemical* yang memberikan nilai tambah lebih tinggi bagi ekspor luar negeri. Secara keseluruhan, prospek net ekspor di Riau berpotensi lebih tinggi dengan pemulihan permintaan negara mitra dagang utama. Hal tersebut juga diimbangi peningkatan impor kebutuhan bahan baku pada industri pengolahan. Akan tetapi, dari sisi domestik, perdagangan antardaerah Riau diperkirakan berkontraksi sejalan dengan prospek pergeseran pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri yang tinggi mengurangi porsi penjualan domestik.

Impor luar negeri diperkirakan mengalami percepatan. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan impor barang antara untuk memenuhi kebutuhan LU Industri Pengolahan. Akan tetapi, impor barang modal dan impor barang konsumsi diperkirakan mengalami perlambatan.

Net Ekspor Antar Daerah diperkirakan berkontraksi di tahun 2025. Dengan peningkatan permintaan ekspor LN atas komoditas CPO dan turunannya, diperkirakan akan ada *shifting* pangsa ekspor antar daerah untuk memenuhi kebutuhan ekspor LN.

2.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), untuk keseluruhan tahun 2025, seluruh LU diperkirakan tumbuh positif. Sumber pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025 berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor ekonomi tersier. Peningkatan

kinerja LU tersebut utamanya ditopang oleh kinerja LU yang berorientasi ekspor. Namun demikian, kinerja sektor pertambangan diperkirakan melambat pada tahun 2025 sehingga diperkirakan menahan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat pada tahun 2025, terutama bersumber dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Produktivitas perkebunan Riau yang tetap karena upaya peremajaan yang telah dilakukan 5 tahun lalu sebesar 160 ribu hektar atau 5,62% dari total luas lahan kelapa sawit di Riau, diperkirakan menopang pertumbuhan LU Pertanian pada tahun 2025. Membaiknya kinerja perkebunan kelapa sawit tersebut ditopang oleh kondisi cuaca yang mendukung dan meningkatnya harga TBS. Peningkatan ini terutama sejalan dengan berakhirnya periode El-Nino sehingga mendorong capaian panen sub LU tabama dan hortikultura. Produksi padi diperkirakan membaik, mendorong peningkatan kinerja LU Pertanian di seluruh wilayah seiring dengan dampak El-Nino yang lebih lemah, terutama pada masa puncak panen awal tahun. Di samping faktor perbaikan cuaca, implementasi sejumlah program intensifikasi dan peningkatan produksi juga mendukung capaian produksi pertanian pada 2025.

Program *replanting* 5 tahun lalu yang sebesar 160 ribu hektar atau sekitar 5,62% dari luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau, lebih tinggi dari periode sebelumnya, diperkirakan akan mendorong peningkatan produktivitas komoditas kelapa sawit. Lebih lanjut, meningkatnya luas tanaman yang menghasilkan setelah *replanting* dan intensifikasi lahan turut mendorong tumbuh tingginya kinerja LU Pertanian. Kinerja LU Pertanian juga diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan kebutuhan produksi CPO dan biodiesel yang akan mendorong produksi TBS menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.





LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan di Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih kuat. Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan akan tetap ditopang oleh industri berbasis CPO seiring peningkatan permintaan ekspor dan hilirisasi menuju produk turunan seperti *oleochemical*. Selain itu, tingginya permintaan domestik, seiring berlanjutnya program B40 yang diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dan menargetkan Indonesia bebas impor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2027, diperkirakan akan menopang permintaan CPO.

LU Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan tumbuh melambat di tahun 2025. Berlanjutnya *natural declining* migas, serta *unplanned shut down* yang terjadi menahan pertumbuhan yang lebih tinggi. *Natural declining* migas yang diperkirakan sekitar 10% setiap tahunnya dan *unplanned shutdown* ditengarai menahan pertumbuhan LU Pertambangan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan kegiatan eksplorasi & produksi sejak tahun 2024 diharapkan akan menahan pelambatan LU Pertambangan yang lebih dalam.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta proyek swasta korporasi, maupun rumah tangga. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis oleh Pemerintah, serta proyek pembangunan oleh Pemda. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Akan tetapi, penurunan APBD pemerintah daerah dapat menghambat pertumbuhan LU konstruksi terkait proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah.

LU Perdagangan

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja LU Perdagangan diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Termoderasinya pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan dipengaruhi oleh konsumsi yang belum setinggi prakiraan, seiring tertahannya pertumbuhan harga komoditas, antara lain TBS dan karet. Di samping itu, penyesuaian stimulus fiskal berupa insentif pajak yang lebih rendah juga diperkirakan berkontribusi pada melambatnya LU perdagangan pada tahun 2025.

Namun demikian, terjaganya daya beli masyarakat yang sejalan dengan kenaikan pendapatan, masih tingginya permintaan, peningkatan UMP, serta berlanjutnya program insentif kendaraan listrik dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP), dan optimalisasi MBG di semester kedua diperkirakan menjadi faktor utama tetap tumbuh positifnya kinerja LU Perdagangan di tahun 2025.

LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

LU Penyedia Akomodasi dan Makan Minum pada 2025 diperkirakan tetap kuat. Kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum pada 2025 diperkirakan tetap kuat, meskipun akan melambat dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan *Meeting, Incentive, Conferences, and Exhibition* (MICE) berskala besar yang terus bertambah, serta rencana penambahan rute dan frekuensi penerbangan domestik.

Di sisi lain, efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat menahan pertumbuhan LU Akmamin. Pemotongan anggaran belanja untuk kegiatan seminar, *focus group discussion* (FGD), dan perjalanan dinas dapat menghambat pertumbuhan LU Akmamin di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut terindikasi dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang yang lebih rendah pada Triwulan I dan Triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.





2.2. Prospek Inflasi Provinsi Riau 2025

Inflasi global diperkirakan akan lebih terkendali pada tahun 2025. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2025 memprakirakan inflasi global akan menurun dari 5,7% pada tahun 2024 menjadi 4,2% pada tahun 2024 dan 3,5% pada tahun 2026. Penurunan inflasi pada negara maju diperkirakan dapat lebih cepat dibandingkan negara berkembang di topang oleh inflasi inti secara umum diperkirakan akan menurun secara bertahap.

Sejalan dengan perkembangan inflasi global, Pemerintah dan Bank Indonesia turut menyakini inflasi Nasional pada tahun 2025 dan 2026 tetap terkendali dengan rentang target sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Terkendalnya inflasi nasional turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selain itu, efektivitas upaya perbaikan pasokan dan distribusi pangan, ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif digitalisasi.

Sejalan dengan prakiraan inflasi Nasional, inflasi Riau tahun 2025 diperkirakan turut terkendali dalam sasaran inflasi Nasional, didukung oleh inflasi komponen *Volatile Food* (VF) dan *Core Inflation* (CI)

yang lebih terkendali di tengah kenaikan tekanan inflasi kelompok *Administered Prices* (AP). Prospek tersebut didasari oleh hal-hal sebagai berikut: (i) Inflasi komponen VF diperkirakan terkendali pada rentang sasaran seiring dengan peningkatan permintaan seiring dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Bansos, Peningkatan Indeks Harga *Imported Inflation* (IHIM) Pangan yg memengaruhi *imported inflation*, penguatan stabilisasi harga dan pasokan pangan terus dilakukan TPIP/TPID melalui GNPIP 2025. (ii) inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau, serta (iii) inflasi AP yang mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilisasi tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respons kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar *stakeholders* terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.

3. RISIKO

Kondisi perekonomian Riau masih dibayangi beberapa risiko (*downside risk*), di antaranya diperkirakan berasal dari: (i) komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang dipengaruhi oleh prospek harga komoditas internasional yang mengalami pelambatan, volume perdagangan dunia yang termoderasi lebih dalam, serta eskalasi ketegangan geopolitik yang memengaruhi transaksi perdagangan dan harga komoditas global; (ii) Faktor cuaca ekstrim yang memengaruhi produksi komoditas di Riau, (iii) Peningkatan biaya *freight* kapal untuk pengiriman komoditas internasional akibat pemutaran jalur rute kapal sebagai dampak



Grafik 7.5. Ekspektasi Inflasi



perang Timur, serta (iv) Penurunan produksi karet yang disebabkan berkurangnya pasokan bahan baku karena banyaknya petani dan perusahaan yang melakukan konversi lahan karet menjadi kelapa sawit.

Bank Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih baik, khususnya dari sisi permintaan, dengan terus mendorong stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang cepat, aman, dan handal, serta bersinergi erat dengan Pemerintah Daerah dan otoritas terkait. Beberapa upaya akan terus dilakukan dalam mendorong kinerja ekonomi Riau, antara lain:

1. **Penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait untuk mendorong penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.** Hal ini dilakukan agar investasi pada produk turunan komoditas utama Riau dapat lebih beragam dan mengarah pada produk konsumsi yang bernilai tambah tinggi.
2. **Dukungan atas penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas dan ketersediaan energi, terutama pada kawasan industri, yang ditopang oleh instrumen tata ruang, perizinan, dan insentif pajak daerah.** Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatan alokasi belanja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.
3. **Optimalisasi anggaran melalui percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.** Aktivitas konsumsi pemerintah akan berdampak luas terhadap elemen perekonomian di Riau. Alokasi anggaran yang tepat guna dapat mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor produksi. Selain itu, pentingnya mendorong pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah seperti melalui program wakaf produktif terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis.
4. **Mengembangkan sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada sektor pariwisata dan**

UMKM. Pengembangan sektor pariwisata dan UMKM dapat dilakukan melalui (i) pengembangan desa wisata; (ii) penguatan dan integrasi *database* pelaku UMKM; (iii) penguatan dan korporatisasi UMKM; (iv) pengembangan model bisnis UMKM berbasis halal *value chain*; (v) Pelatihan dan pendampingan digitalisasi bagi UMKM agar dapat naik kelas; serta (vi) pendampingan dan fasilitasi UMKM melalui *business matching* dan promosi perdagangan di dalam dan/atau luar negeri.

5. **Meningkatkan transaksi ekonomi melalui sistem pembayaran nontunai.** Tren digitalisasi yang meningkat harus dimanfaatkan dalam menciptakan perekonomian yang lebih efisien, termasuk dalam lingkup pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong elektronifikasi dan transaksi digital, yaitu pemanfaatan kanal pembayaran digital pada pembayaran pajak dan retribusi untuk mendorong pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Dari sisi inflasi, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali dalam sasarnya pada tahun 2025.

Upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat oleh TPID Riau pada tahun 2025, melalui:

1. **Program OPSI PADI Riau Dukungan Ketahanan Pangan Riau**

Dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan Nasional (SPN), serta upaya mengatasi defisit neraca pangan di Provinsi Riau, TPID Riau mencanangkan Program Optimalisasi Produksi Padi (OPSI) Riau Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan Riau. OPSI PADI Riau 2025 mencanangkan Peningkatan Produksi Padi seluas 50.000 Ha terdiri dari Peningkatan Indeks





Pertanaman (IP) seluas 30.000 ha, Peningkatan Produktivitas seluas 10.000 ha, Rehabilitasi Sawah Terlantar (RST) seluas 5.000 ha, dan Cetak Sawah Baru (CSB) seluas 5.000 Ha. Target akhir luas area tanam pada tahun 2029 akan menjadi 112.493 Ha dan produksi padi Riau menjadi 493.566 ton GKP atau setara dengan 252.267 ton beras.

2. Peran BUMD Pangan Riau

Mendorong peran kelembagaan melalui BUMD melalui **Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN)** pada tanggal 8 Juli 2025 dan Korporasi Petani sehingga dapat menjadi *off-taker* pasokan. Seluruh OPD terkait dapat mendorong optimalisasi peran *off-taker* lokal termasuk memfasilitasi *linkage* kemitraan dengan industri, serta pemanfaatan *cold storage* untuk penyimpanan komoditas pangan.

3. **Penguatan kerjasama antardaerah (KAD)** yang ditindaklanjuti dengan transaksi berkelanjutan setelah adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS), baik yang bersifat *Government to Government (G2G)* maupun *Business to Business (B2B)*, serta disinergikan dengan Fasilitas Distribusi Pangan dan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/SPHP.
4. **Pembentukan dan Perluasan Kios Pangan Pengendali Inflasi**

TPID Riau akan menambah Kios Pengendalian Inflasi Terkendali. Selain itu, memperkuat skema Pasar Tani yang melibatkan petani untuk langsung berjualan di Pasar Murah, dengan harga jual di atas harga jual ke distributor/pegepul namun masih di bawah harga jual pasar.

Secara umum, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penahan inflasi tahun 2025 yang perlu dicermati sebagai berikut:

Tabel 7.3. Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Riau Tahun 2025

Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2025	Faktor Penahan Inflasi Tahun 2025
<p>VOLATILE FOOD (VF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Defisit neraca pangan mendorong tingginya ketergantungan pada pasokan daerah lain Peningkatan permintaan seiring dengan program Makan Bergizi Gratis dan Bansos. Peningkatan Indeks Harga Imported Inflation (IHIM) Pangan yg memengaruhi <i>imported inflation</i> Kegagalan panen di beberapa sentra produksi pada musim kemarau yang menyebabkan penurunan jumlah pasokan komoditas <p>CORE INFLATION (CI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, harga komoditas global (a.l CPO dan emas perhiasan) Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 sebesar 6,5% dibandingkan 2024 Tren peningkatan permintaan pada momen HBKN Pola musiman kenaikan sewa rumah, kontrak rumah, pendidikan, mobil <p>ADMINISTERED PRICES (AP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian skema subsidi pemerintah terkait energi Pembatasan penyaluran BBM subsidi Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Kenaikan tarif tol Pekanbaru-Bangkinang-Kota Kampar 	<p>VOLATILE FOOD (VF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Efektivitas program TPID dalam perbaikan produksi dan pengelolaan pasokan komoditas pangan yang lebih efisien Program OPSI PADI Riau untuk meningkatkan produksi padi Riau 2025 Pembentukan BUMD Pangan Riau 2025 dan Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN) <p>CORE INFLATION (CI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan moneter yang bersifat <i>pre-emptive</i> dan <i>forward looking</i> guna menjaga inflasi inti ke dalam target sasaran Ekspektasi inflasi yang terjaga <p>ADMINISTERED PRICES (AP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diskon tarif listrik 50% pada Jan-Feb 2025 Penurunan tarif parkir Kota Pekanbaru sejak Februari 2025 Diskon tarif angkutan udara pada periode HBKN Nataru 2024/2025 dan HBKN Idulfitri 2025 Diskon tarif angkutan udara 13%-14% & tarif tol 20% pada HBKN Idulfitri '25





Halaman ini sengaja dikosongkan



Daftar Istilah

Administered Price

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

Base Effect

Efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi.

BEC

Pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.

Barang Modal (Capital Goods)

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

BI 7 Day Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

CPO (Crude Palm Oil)

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.



Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang diterima perbankan dari masyarakat, berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persisten).

Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat dan permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

Inflow

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin

Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.



Kredit Konsumsi

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

Kliring

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaraan kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di Kantor Pusat Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Kliring Kredit

Kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di Kantor Pusat Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (*paperless*).

Liaison

Suatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan, dan deposito).

Net Interest Income (NTI)

Pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.





Nilai Tukar Petani (NTP)

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Non Core Deposit (NCD)

Dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan, dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

PDRB Riil

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

Quarter to quarter (qtq)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi triwulan tertentu terhadap posisi triwulan sebelumnya.

Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Ls terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Ls, semakin baik kondisi bank yang bersangkutan.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) - Net

Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit.





Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Survei Konsumen

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

Survei Penjualan Eceran

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Uang Kartal

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

Volatile Food

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

Year on year (yoy)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal Hari Besar Keagamaan Nasional, tahun ajaran baru, dsb).



Pengarah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau:

Panji Achmad

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau:

Sudiro Pambudi

Editor

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi Sumatera Utara

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi:

Franciskus Arnold Sitanggang

Kontributor

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi:

Hafidh Jati Husodo
Naufal Muhammad
Yusnifili Harefa
Akbar Harahap Hidayat
Acnaf Djamal Syaus
Annatasya Putri Salsabila



BANK INDONESIA

Jl. Jend. Sudirman No. 464
Pekanbaru - Riau